ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

MEMAHAMI DIMENSI DIMENSI KEMISKINAN MASYARAKAT ADAT

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara

icco

Sajogyo
Institute
https://sajogyo-institute.org

MEMAHAMI DIMENSI-DIMENSI KEMISKINAN MASYARAKAT ADAT

ICCO
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)

Copyright © AMAN, ICCO 2010

Isi buku ini boleh direproduksi dan didistribusikan untuk keperluan non-komersil jika pemberitahuan sebelumnya telah disampaikan kepada pemegang hak cipta serta sumber dan nama-nama penulis dicantumkan.

Dipublikasikan oleh
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),
ICCO
ICCO: www.icco.nl
AMAN: www.aman.or.id

Editor
Restu Achmaliadi
Moh. Shohibuddin

Penulis
Restu Achmaliadi
Moh. Shohibuddin
Angky Samperante
George Sitania
Kamardi
Nus Ukru

Foto-foto
Dokumentasi AMAN

ISBN 978-979-17989-1-4

dicetak oleh Kippy

PANCASILA

KETUHANAN YANG MAHA ESA

KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

PERSATUAN INDONESIA

KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAK-SANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN / PERWAKILAN

KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

AMAN

AMAN adalah organisasi sosial kemasyarakatan independen yang beranggotakan komunitas-komunitas Masyarakat Adat dari berbagai wilayah di Indonesia. **AMAN** adalah forum bersama untuk Masyarakat Adat memperjuangkan kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan martabat budaya mereka.

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

AMAN beranggotakan komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang setuju dan menerima Anggaran Dasar dan aturan-aturan Organisasi **AMAN**. Masyarakat Adat adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun, memiliki dan berdaulat atas tanah dan kekayaan alam di wilayahnya, hidup berdasarkan aturan-aturan adat, serta memiliki lembaga adat yang mengelola keberlangsungan hidup sosial, politik dan ekonomi masyarakatnya.

AMAN dibentuk pada tanggal 17 Maret 1999 di Jakarta melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) yang pertama. Setelah itu, telah diadakan KMAN II di Lombok, Nusa Tenggara Barat pada September 2003 dan KMAN III pada Maret 2007 di Pontianak, Kalimantan Barat.

Hingga Agustus 2009, pada Rapat Kerja Nasional AMAN, komunitas-komunitas Masyarakat Adat yang sudah terdaftar, diverifikasi dan disahkan sebagai anggota AMAN berjumlah 1.163 komunitas. Demi kelancaran dan efektivitas kerja-kerja bersama komunitas, AMAN telah membentuk 17 Pengurus Wilayah (PW – Setingkat Propinsi) dan 29 Pengurus Daerah (PD – Setingkat Kabupaten).

Visi, Misi, dan Prinsip-Prinsip AMAN

AMAN berazaskan sistem-sistem adat yang beragam dan Pancasila

Visi AMAN adalah:

"Terwujudnya kehidupan masyarakat adat yang berdaulat, adil, sejahtera, bermartabat, dan demokratis".

Misi AMAN adalah :

- Mengembalikan kepercayaan diri, harkat, dan martabat Masyarakat Adat Nusantara.
- Meningkatkan rasa percaya diri, harkat, dan martabat perempuan Masyarakat Adat Nusantara sehingga mereka mampu menikmati hak-haknya.
- Mengembalikan kedaulatan Masyarakat Adat Nusantara untuk mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
- Mencerdaskan dan meningkatkan kemampuan Masyarakat Adat mempertahankan dan mengembangkan kearifan adat untuk melindungi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
- Mengembangkan proses pengambilan keputusan yang demokratis.
- Membela dan memperjuangkan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat.
- Prinsip-Prinsip AMAN adalah keberlanjutan, keberagaman, kebersamaan, keadilan, demokrasi, keseimbangan, dan hak azasi manusia.

Struktur dan Pelaksana Organisasi AMAN Periode 2007-2012

Sejak KMAN III, struktur organisasi AMAN terdiri dari Dewan AMAN (DAMAN) yang berfungsi sebagai penasehat dan pengawas organisasi, dan Sekretaris Jendral, yang berfungsi sebagai Badan Eksekutif - Pelaksana Harian Organisasi.

Dewan AMAN terdiri dari 42 orang anggota, dengan 7 orang Koordinator Nasional yang mewakili 7 Region, yakni : Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali & Nusa Tenggara, Maluku and Papua.

Sekretaris Jendral bertanggungjawab untuk menjalankan kebijakan dan melaksanakan program-program kerja organisasi. Sekretaris Jendral dipilih

dan bertanggungjawab kepada anggota AMAN melalui KMAN. Demi kelancaran pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan Masyarakat Adat Nusantara, Sekretaris Jendral menunjuk seorang Deputi/Wakil dan membentuk 10 Direktorat sebagai pelaksana program-program AMAN, antara lain : 1) Direktorat Operasional dan Manajemen; 2) Direktorat Informasi dan Komunikasi; 3) Direktorat Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4) Direktorat Advokasi Internasional dan Urusan Luar Negeri; 5) Direktorat Dukungan Komunitas; 6) Direktorat Urusan Perempuan Adat; 7) Direktorat Urusan Pemuda Adat; 8) Direktorat Pengembangan Organisasi dan Kaderisasi; 9) Direktorat Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat; dan 10) Direktorat Urusan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Adat.

Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang AMAN, silakan menghubungi

Rumah AMAN

Jl. Tebet Utara II.C No.22
Jakarta Selatan 12820
Indonesia

T/F: +62 21 8297954

email: rumahaman@cbn.net.id

www.aman.or.id

ICCO

ICCO adalah sebuah organisasi antar gereja untuk kerjasama pembangunan. Kami bekerja di 53 negara yang tersebar di Afrika, Asia, Amerika Selatan dan Eropa Timur. Kami memberikan dukungan dan pertimbangan keuangan global kepada organisasi dan jejaring lokal yang bekerja untuk mewujudkan akses yang lebih baik kepada fasilitas pokok, memprakarsai pembangunan ekonomi dan meningkatkan kedamaian dan demokrasi.

Kami menjalin kerja sama yang erat dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil, termasuk organisasi-organisasi pembangunan, organisasi-organisasi pendidikan dan dunia usaha. Dengan cara ini, kami berupaya meningkatkan kondisi hidup masyarakat di Amerika Selatan, Asia, Afrika dan Eropa Timur dan membantu mereka untuk menjadi mandiri secara ekonomi. Untuk membangun kekuatan kami, kami membentuk aliansi ICCO bersama Edukans, Kerk in Actie, Oikocredit, Prisma, Share People. Selain itu, kami juga berkolaborasi dengan beberapa mitra lain di negara Belanda, Eropa dan di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kami di,

www.icco.nl

ICCO South East Asia and Pasific
Jl.Tukad Batanghari IX/8
Panjer, Denpasar-80225
Bali - Indonesia

T: +62 (361) 8955801
Fax: +62 (361) 8955805

DAFTAR ISI

PROLOG

MEMAHAMI DIMENSI-DIMENSI KEMISKINAN MASYARAKAT ADAT I

Oleh: Moh. Shohibuddin

Perspektif Relasional Mengenai Kemiskinan I

Dimensi-dimensi Kemiskinan yang Dimunculkan IV

Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan VII

Mencermati Ekspansi Kapitalisme "Dari Bawah" XII

Identifikasi Krisis Agraria pada Masyarakat Adat XVI

Penutup XIX

1

***AWALAN* :**
MASYARAKAT ADAT, KESEJAHTERAAN, DAN FAKTA-FAKTA KEMISKINAN 1

*Oleh: Restu Achmaliad*i

Masyarakat Adat dan Nasibnya yang Tak Kunjung Berubah 1

Konsep-konsep Pembangunan dan Kemiskinan..... 6

Angka dan Fakta-Fakta Kemiskinan..... 16

Mencari Kriteria dan Indikator Kemiskinan Ala Masyarakat Adat..... 22

2

KONFLIK DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT: Studi Lapangan Gampong Alue Capli, Mukim Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara 27

Oleh: Angky Samperante

Latar Belakang..... 27

Penduduk dan Sejarah Singkat Alue Capli..... 29

Kehidupan Sosial Ekonomi dan Permasalahannya **31**

Konflik Bersenjata dan Pengorbanan Masyarakat **34**

Kesejahteraan Masyarakat Adat **38**

Kesimpulan **41**

3

SEDULUR SIKEP BERHAK MENENTUKAN JALAN HIDUPNYA SENDIRI **45**

Oleh: Restu Achmaliadi dan George Sitania

Sejarah dan Sebaran **45**

Apa itu Sedulur Sikep? **46**

Struktur Sedulur Sikep **48**

Realitas-realitas **49**

Tekanan Negara dan Kehidupan Sekitar **40**

Miskin dan Kaya **52**

Kenyataan Berbagai Program Pembangunan **52**

Penutup **58**

4

KEMISKINAN MENURUT CARA PANDANG MASYARAKAT ADAT
Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Barat – NTB **59**

Oleh : Kamardi

Tentang Nusa Tenggara Barat (NTB) **59**

Masyarakat Adat Desa Bentek : Desa Pertanian Yang Plural **60**

Asal Usul Dan Struktur Sosial **60**

Identifikasi Masalah-Masalah Pembangunan **62**

Kesejahteraan Menurut Masyarakat **64**

Tanggapan Masyarakat Terhadap Konsep Kesejahteraan Yang Berlaku Sekarang **65**

Kemiskinan Menurut Masyarakat Adat **66**

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP PENANGGULANGAN 69

Kemiskinan Yang Berlaku Sekarang 69

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN MASYARAKAT ADAT BISA 69

Sejahtera Dan Miskin 69

Hubungan Sistem Adat Dan Kemiskinan -Kesejahteraan 74

5

MENGUKUR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT TANA AI, NUSA TENGGARA TIMUR 81
Oleh: Nus Ukru

Letak dan Sumber Kehidupan Masyarakat Adat Tana Ai ... 81

Sejarah Asal Usul Masyarakat Tana Ai 81

Sistem Tenurial di Tana Ai 85

Pemerintahan Adat 89

Masalah-masalah Pembangunan..... 91

Kesejahteraan Menurut Masyarakat Adat 91

Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan dan Kemiskinan 92

6

***AKHIRAN*: MASYARAKAT ADAT MENILAI KESEJAHTERAAN DIRI 97**
Oleh : Restu Achmaliadi

Paksaan yang Sulit Dielakkan 97

Sejahtera Lahir dan Batin..... 100

BHINNEKA TUNGGAL IKA
Pahlawan Nasional Indonesia
Abdoel Moeis (1883–1959)
Ki Hadjar Dewantara (1889–1959)
Raden Mas Soerjopranoto (1871–1959)
Mohammad Hoesni Thamrin (1894–1941)
K.H. Samanhoedi (1868–1956)
Raden H. Oemar Said Tjokroaminoto (1883–1934)
Danoedirdja Setiaboeddhi (1897–1950)
Raja Si Singamangaradja XII (1849–1907)
Dr. G.S.S.J. Ratulangi (1890–1949)
dr. Soetomo (1888–1938)
K.H. Ahmad Dahlan (1868–1923)
H. Agus Salim (1884–1954)
Jend. Gatot Soebroto (1907–1962)
Sukardjo Wirjopranoto (1903–1962)
Dr. Ferdinand Lumban Tobing (1899–1962)
K.H. Zainul Arifin (1909–1963)
Tan Malaka (1884–1949)
Mgr. Albertus Soegijapranata, S.J. (1896–1963)
Ir. R. Djoeanda Kartawidjaja (1911–1963)
Dr. Sahardjo, S.H. (1909–1963)
Tjoet Nja' Dhien (1848–1908)
Tjoet Nja' Meutia (1870–1910)
Raden Adjeng Kartini (1879–1904)
dr. Tjipto Mangoenkoesoemo (1886–1943)
K.H. Fakhruddin (1890–1929)
K.H. Mas Mansoer (1896–1946)
Alimin bin Prawirodirdjo (1889–1964)
dr. Moewardi (1907–1948)
K.H. Abdul Wahid Hasjim (1914–1953)
Sri Susuhunan Paku Buwono VI (1807–1849)
K.H. Mohammad Hasjim Asj'arie (1875–1947)
RMT Ario Soerjo (1896–1948)
Jend. Besar Soedirman (1916–1950)
Jend. Oerip Soemohardjo (1893–1948)
Prof. Dr. Mr. Soepomo (1903–1958)
Dr. Soelaiman Effendi Koesoemah Atmadja (1898–1952)
Jend. Ahmad Yani (1922–1965)
Letjen R. Soeprapto (1920–1965)
Letjen Mas Tirtodarmo Harjono (1924–1965)
Letjen Siswondo Parman (1918–1965)
Mayjen Donald Isaac Pandjaitan (1925–1965)
Mayjen Soetojo Siswomihardjo (1922–1965)
Kapten Pierre Tendean (1939–1965)
Aipda Karel Satsuit Tubun (1928–1965)
Brigjen Katamso Darmokusumo (1923–1965)
Kol. Sugijono Mangunwijoto (1926–1965)
Soetan Sjahrir (1909–1966)
Laks. R. Edy Martadinata (1921–1966)
Raden Dewi Sartika (1884–1947)
Prof. Dr. Wilhelmus Zakaria Johannes (1895–1952)
Pangeran Antasari (1809–1862)
Sersan Usman *alias* Djanatin bin H. Ali (1943–1968)
Kopral Harun *alias* Tohir bin Said (1947–1968)
Jend. Basoeki Rachmat (1921–1969)
Arie Frederik Lasut (1918–1949)
Martha Christina Tiahahu (1800–1818)
Maria Walanda Maramis (1872–1924)
Supeno (1916–1949)
Sultan Ageng Tirtajasa (1631–1683)
Wage Rudolf Soepratman (1903–1938)
Nyai Hj. Siti Walidah Ahmad Dahlam (1872–1946)
K.H. Zainal Moestafa (1907–1944)
Sultan Hasanuddin (1631–1670)
Kapitan Pattimura (1783–1817)
Pangeran Diponegoro (1785–1855)
Tuanku Imam Bondjol (1772–1864)
Tengku Tjik di Tiro (1836–1891)
Teuku Oemar (1854–1899)
dr. Wahidin Soedirohoesodo (1852–1917)
Raden Oto Iskandar di Nata (1897–1945)
Robert Wolter Monginsidi (1925–1949)
Prof. Mr. Mohammad Yamin (1903–1962)
Laksda Josaphat Soedarso (1925–1962)
Prof. dr. R. Soeharso (1912–1971)
Marsda Prof. dr. Abdurrachman Saleh (1909–1947)
Marsda Mas Agustinus Adisutjipto (1916–1947)
Teuku Njak Arief (1899–1946)
Nji Ageng Serang (1752–1828)
Hj. Rangkayo Rasuna Said (1910–1965)
Marsda Abdul Halim Perdana Kusuma (1922–1947)
Marsma R. Iswahjudi (1918–1947)
Brigjen I Gusti Ngurah Rai (1917–1946)
Soeprijadi (1923–1945)
Sultan Agung Anyokrokusumo (1593–1645)
Untung Suropati (1660–1706)
Tengku Amir Hamzah (1911–1946)
Sultan Thaha Sjaifuddin (1816–1904)
Sultan Mahmud Badaruddin II (1767–1852)
Dr. Ir. H. Soekarno (1901–1970)
Dr. H. Mohammad Hatta (1902–1980)
Raden Pandji Soeroso (1893–1981)
Radin Inten II (1834–1856)
KGPAA Mangkunegara I (1725–1795)
Sri Sultan Hamengku Buwono IX (1912–1988)
Sultan Iskandar Muda (1593–1636)
I Gusti Ketut Jelantik (????–1849)
Frans Kaisiepo (1921–1979)
Silas Papare (1918–1978)
Marthen Indey (1912–1986)
Sultan Nuku Muhammad Amiruddin (1738–1805)
Tuanku Tambusai (1784–1882)
Syekh Yusuf Tajul Khalwati (1626–1699)
R.A. Hj. Fatimah Siti Hartinah Soeharto (1923–1996)
Raja Haji Fisabilillah (1727–1784)
H. Adam Malik (1917–1984)
Marsma Tjilik Riwut (1918–1987)
La Maddukelleng (1700–1765)
Sultan Syarif Kasim II (1893–1968)
H. Ilyas Yacoub (1903–1958)
Prof. Dr. Hazairin, S.H. (1906–1975)
Abdul Kadir (1771–1875)
Hj. Fatmawati Soekarno (1923–1980)
Ranggong Daeng Romo (1915–1947)
Brigjen H. Hasan Basry (1923–1984)
Jend. Besar Abdul Haris Nasution (1918–2000)
Jend. GPH Djatikoesoemo (1917–1992)
Andi Djemma (1901–1965)
Pong Tiku *alias* Ne' Baso (1846–1907)
Prof. Mr. R. H. Iwa Koesoema Soemantri (1899–1971)
H. Nani Wartabone (1907–1986)
Maskoen Soemadiredja (1907–1986)
Andi Mappanyukki (1885–1967)
Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad (1808–1873)
K.H. Ahmad Rifa'i (1786–1870)
Gatot Mangkoepradja (1898–1968)
Ismail Marzuki (1914–1958)
Kiras Bangun *alias* Garamata (1852–1942)
Bagindo Azizchan (1910–1947)
Andi Abdullah Bau Massepe (1918–1947)
Dr. Mr. H. Teuku Mohammad Hasan (1906–1997)
R.M. Djokomono Tirto Adhi Soerjo (1880–1918)
K.H. Noer Ali (1914–1992)
H. Pajonga Daeng Ngalle (1901–1958)
Opu Daeng Risadju (1880–1964)
Izaak Huru Doko (1913–1985)
Sri Sultan Hamengku Buwono I (1717–1792)
H. Andi Sultan Daeng Radja (1894–1963)
Mayjen dr. Adenan Kapau Gani (1905–1968)
Mr. dr. Ide Anak Agung Gde Agung (1921–1999)
Mayjen Prof. Dr. Moestopo (1913–1986)
Brigjen Ignatius Slamet Rijadi (1927–1950)
Dr. Mohammad Natsir (1908–1993)
K.H. Abdul Halim (1887–1962)
Soetomo *alias* Bung Tomo (1920–1981)
Laksda Jahja Daniel Dharma *alias* John Lie (1911–1988)
Prof. Dr. Ir. Herman Johannes (1912–1992)
Prof. Mr. R. Achmad Soebardjo (1896–1978)
Dr. Johannes Leimena (1905–1977)
Mayor Dr. Johannes Abraham Dimara (1916–2000)
Mr. Sjafruddin Prawiranegara (1911–1989)
K.H. Idham Chalid (1921–2010)
H. Abdul Malik Karim Abdullah (1908–1981)
Ki Sarmidi Mangunsarkoro (1904–1957)
I Gusti Ketut Pudja (1908–1977)
Sri Susuhunan Paku Buwono X (1866–1939)
Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahjono (1900–1986)
dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat (1879–1957)
Lambertus Nicodemus Palar (1900–1981)
Letjen Tahi Bonar Simatupang (1920–1990)
Letjen Djamin Ginting (1921–1974)
Soekarni Kartodiwirjo (1916–1971)
H. R. Mohamad Mangoendiprodjo (1905–1988)
K.H. Abdul Wahab Hasbullah (1888–1971)

PROLOG

MEMAHAMI DIMENSI-DIMENSI KEMISKINAN MASYARAKAT ADAT

Oleh: Moh. Shohibuddin[1]

"A relational view, then, understands poverty as the effect of social relations ... in terms of ***inequalities of power****."*
— David Mosse (2007)

Perspektif Relasional Mengenai Kemiskinan

Tanpa disadari, kita seringkali terjebak dalam satu cara pandang yang melihat masalah kemiskinan sebagai sebuah "kondisi", dan bukannya "konsekuensi". Artinya, pandangan mengenai "kemiskinan" sebagai problem sosial disamakan dengan keadaan tertentu "si miskin" pada satu saat. Cara pandang itu memang memudahkan untuk dapat mengukur kemiskinan dari indikator-indikator yang bersifat generik, seperti kondisi tempat tinggal, jenis dan jumlah asupan gizi, tingkat pendapatan dan kepemilikan aset, dan sebagainya. Kemiskinan kemudian dilihat sebagai "atribut negatif" dari ukuran-ukuran ini dalam suatu

1 Penulis adalah peneliti pada Sajogyo Institute (SAINS) Bogor, dan anggota Tim Pengajar mata kuliah "Kajian Agraria" pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB.

gradasi. Demikianlah, kondisi kemiskinan lantas dapat dibedakan menjadi beberapa tingkatan. Sebagai misal, kita mengenal istilah-istilah: Keluarga Pra Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III plus; yakni kategori-kategori yang biasa dipakai oleh pemerintah untuk menggambarkan tingkat-tingkat kesejahteraan keluarga.

Cara pandang non-relasional semacam itu biasanya memang menjadi "pegangan baku" para perencana kebijakan dan aparat penyelenggara pembangunan di lembaga-lembaga pemerintah maupun organisasi-organisasi pembangunan internasional. Hal ini karena yang menjadi kepedulian utama mereka adalah bagaimana mengembangkan program-program intervensi yang bersifat generik untuk pengentasan kemiskinan sehingga indikator-indikator makro tentang kesejahteraan dan pembangunan manusia dapat dicapai (misalnya saja, pendapatan per kapita, partisipasi pendidikan, akses layanan kesehatan, dll).

Cara pandang demikian ini memang berguna untuk membuat "potret" orang miskin pada satu penggal waktu tertentu. Namun, ia akan "gagap" sama sekali untuk bisa memahami bahwa kondisi kemiskinan yang dipotret itu sebenarnya merupakan "endapan" dari proses-proses historis yang dinamis, sering dalam kurun waktu yang panjang, dengan berbagai kontinuitas maupun patahannya. Potret semacam itu pasti juga gagal menangkap bahwa kondisi kemiskinan, baik di level rumah tangga ataupun komunitas, sebenarnya memiliki perjalanan sejarah dan dinamika yang berbeda-beda dalam hal proses pembentukan, durabilitas dan bahkan juga reproduksinya. Sebagai misal, status dan kondisi kemiskinan boleh saja serupa pada berbagai komunitas adat. Namun, tanpa memahami proses pembentukannya dan mekanisme-mekanisme sosial yang membuat ketimpangan dan kemiskinan itu terus bertahan dan berlanjut (bahkan dicipta kembali), maka yang ditangkap sebenarnya hanyalah "hilir" dan "muara" permasalahan kemiskinan, sementara "hulu" yang menimbulkan kondisi kemiskinan itu dan "aliran-aliran" yang menjadi mekanisme-mekanisme produksi dan reproduksinya tidak akan dipahami dengan baik. Dalam hal demikian, maka penentuan level-level kesejahteraan ataupun introduksi program-program pengentasan kemiskinan yang konvensional dapat dipastikan hanya akan menyasar pada "symptom permasalahan" semata, sementara problem kemiskinan pada akarnya tidak tertangani secara baik (untuk tidak mengatakan dihindari sama sekali).

Secara praktis, konstruksi kemiskinan semacam di atas hanya akan mengantarkan pada "kebijakan ujung pipa" (Winoto 2008) dalam program-

program pengentasan kemiskinan. Kebijakan ini pasti tidak akan mampu menghentikan proses reproduksi dan pelipatgandaan kemiskinan oleh kebijakan pembangunan yang berlangsung selama ini. Sebagai ilustrasi, suatu keluarga yang karena satu bantuan pemerintah (misalnya Bantuan Langsung Tunai) dapat naik ke satu jenjang peringkat kesejahteraan yang lebih tinggi, tidak ada jaminan sama sekali bahwa segera setelah itu ia tidak jatuh ke jenjang semula, atau bahkan lebih bawah lagi—selama kondisi dan lingkungan yang menyebabkan kemiskinannya tidak kunjung diatasi. Apa yang dialami desa-desa transmigran di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, bisa menjadi contoh yang menarik di sini. Penduduk miskin dari Bali dan Lombok yang ditransmigrasikan ke daerah ini pada akhir 1970-an dan awal 1980-an telah sukses meningkatkan taraf hidup mereka menjadi jauh lebih sejahtera dibandingkan di kampung asal. Akan tetapi, pada awal 2000-an mereka dipaksa untuk direlokasikan ke tempat lain karena desa-desa mereka termasuk dalam Kuasa Pertambangan, yang entah bagaimana telah bertumpang tindih dengan areal transmigrasi.

Kelemahan cara pandang kemiskinan semacam ini menegaskan pentingnya perspektif yang lebih relasional di dalam melihat kemiskinan, yaitu dengan memandangnya sebagai "konsekuensi" dari relasi-relasi kuasa yang timpang yang menimbulkan marginalisasi satu kelompok masyarakat tertentu. Dalam konteks kemiskinan masyarakat adat, relasi-relasi kuasa itu terutama sekali melibatkan relasi antara negara dengan komunitas adat melalui berbagai aturan hukum dan kebijakan pembangunan yang diintrodusir dan dijalankan oleh pemerintah. Salah satu arena dari relasi kuasa itu, khususnya dalam konteks masyarakat agraris, adalah relasi-relasi agraria yang timpang di antara para subyek agraria (komunitas lokal, kelompok pendatang, negara, perusahaan, elit feodal, dll.).

Dengan menempatkan kemiskinan dalam konteks ketimpangan relasi kuasa di antara berbagai aktor ini, maka dimungkinkan untuk dapat disibakkan proses-proses historis yang "menciptakan ketimpangan distribusi kekuasaan, kemakmuran dan kesempatan di tengah masyarakat" (Du Toit dalam Mosse 2007). Dengan demikian, persoalan mengapa orang menjadi miskin, atau mengapa kemiskinan terus saja bertahan dan bahkan dicipta ulang, dapat ditelesuri secara lebih jernih proses-proses pembentukannya, yaitu sebagai hasil dari beroperasinya berbagai relasi kuasa yang timpang di antara berbagai pihak; ketimbang dilihat sebagai produk dari proses-proses sosial yang abnormal dan patologis.

Dimensi-dimensi Kemiskinan yang Dimunculkan

Buku yang ada di hadapan sidang pembaca ini menghimpun berbagai laporan hasil studi mengenai kemiskinan di empat lokasi di Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Studi ini dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam rangka memotret kondisi kemiskinan masyarakat adat di lokasi-lokasi penelitian serta mengangkat persepsi lokal mengenai indikator kemiskinan dan kesejahteraan. Secara ilustratif, laporan-laporan itu memberikan kesaksian mengenai proses historis dan dinamika sosial-ekonomi macam apa yang menimbulkan kemiskinan pada berbagai komunitas adat di tanah air. Laporan-laporan itu juga menemukan bahwa "wajah" kemiskinan di tiap-tiap komunitas adat ternyata berlainan dan terbentuk melalui proses sejarah yang berbeda-beda pula. Namun secara umum, intervensi negara-lah (melalui ragam kebijakan dan program pemerintah) yang dituding sebagai faktor paling dominan yang telah melahirkan dampak perubahan besar pada kehidupan masyarakat lokal.

Masing-masing laporan ini berdiri sendiri dan menyoroti aspek-aspek kemiskinan dan kesejahteraan yang berbeda pada komunitas tinelitinya. Hal ini tampaknya disengaja oleh para pelaksana penelitian untuk memperoleh gambaran kemiskinan yang beragam, dan sekaligus untuk mengangkat konstruksi masyarakat adat mengenai makna dan kriteria kemiskinan dan kesejahteraan. Konstruksi lokal semacam ini memang biasanya luput dari perspektif kemiskinan yang bercorak linier dari para perencana kebijakan maupun aparat pelaksana program pembangunan di daerah, sehingga penelitian jenis ini diharapkan akan banyak memberikan kontribusi empiris yang mencerahkan.

Apabila dicermati, setidaknya ada lima dimensi kemiskinan yang diangkat oleh laporan-laporan studi yang dihimpun dalam buku ini. Pertama adalah dimensi kemiskinan yang terkait dengan persoalan identitas dan struktur sosial masyarakat adat yang khas. Inilah isu yang banyak disuarakan oleh AMAN dalam berbagai pernyataan dan publikasinya, yaitu menyangkut rekognisi negara atas identitas dan cara hidup komunitas adat. Ketiadaan rekognisi atas hal ini misalnya dalam agama resmi yang diakui negara, ataupun dalam berbagai pelayanan publik yang disediakan pemerintah, telah menyebabkan terjadinya krisis identitas dan budaya yang mencerminkan dimensi kemiskinan batiniah.

Dimensi kemiskinan yang kedua adalah menyangkut terbatasnya akses masyarakat adat pada pendidikan dan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah karena berbagai sebab. Salah satu faktor penyebab yang disoroti oleh laporan dari Jawa Tengah adalah bahwa pendidikan formal yang disediakan oleh pemerintah tidak memberi tempat pada nilai-nilai dan ideal kehidupan yang dijunjung oleh komunitas lokal. Akibatnya, pendidikan formal justru dilihat sebagai ancaman atas identitas dan kehidupan komunitas ini. Faktor-faktor lain tidak secara khusus ditonjolkan dalam laporan-laporan studi ini, dan biasanya merupakan kondisi yang umum dihadapi di daerah pedesaan yang terpencil, misalnya sarana dan prasarana yang terbatas, tenaga pendidikan dan medis yang terbatas dan kurang berkualitas, dan lain-lain.

Dimensi ketiga dan keempat berkaitan erat dengan kemiskinan yang bersangkut paut dengan relasi-relasi agraria yang timpang, baik antara komunitas lokal dengan pihak-pihak dari luar (negara, korporasi, dan lain-lain) maupun di antara sesama warga komunitas itu sendiri. Relasi agraria yang merupakan dimensi kemiskinan ketiga berkenaan dengan persoalan *tenurial security,* yakni penguasaan atas sumber-sumber agraria setempat dan jaminan keamanannya. Laporan dari NTB dan NTT secara khusus menyoroti dimensi ini, yakni kasus penetapan kawasan hutan lindung dan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan di wilayah adat tanpa didahului oleh proses konsultasi dan persetujuan dari komunitas adat setempat.

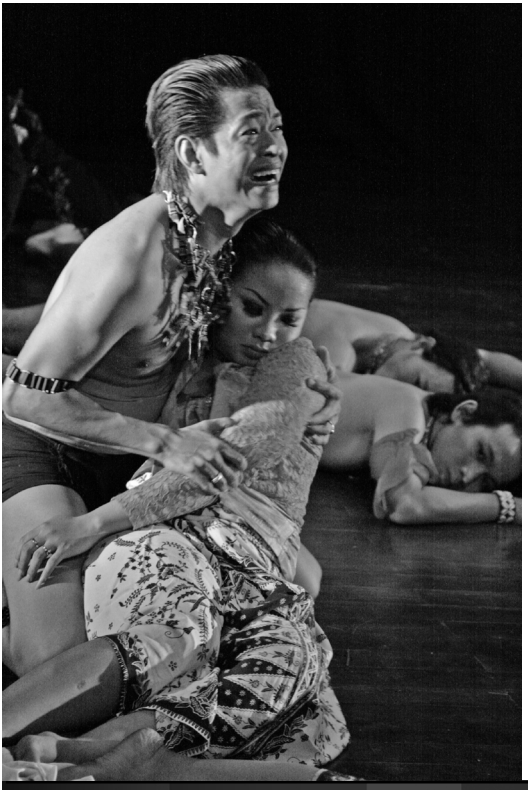

Adapun relasi agraria yang merupakan dimensi kemiskinan keempat berkaitan dengan relasi-relasi produksi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengusahaan sumber-sumber agraria setempat. Hal ini mencakup berbagai bentuk hubungan penyakapan (tenancy), perburuhan dan permodalan yang melibatkan sesama anggota komunitas sendiri maupun dengan pihak di luarnya. Aspek ini secara khusus disoroti oleh

laporan studi dari Aceh yang mengangkat meluasnya praktik-praktik hubungan penyakapan dan perburuhan yang tidak adil di antara sesama warga komunitas sendiri.

Akhirnya, tetapi bukan paling akhir, dimensi kemiskinan yang kelima terkait dengan isu keberlanjutan layanan alam. Isu ini mengemuka dari laporan penelitian di Aceh dan NTT yang menemukan terjadinya degradasi fungsi ekologis (khususnya terkait dengan wilayah catchment area) baik akibat dari konflik dan bencana alam (kasus di Aceh) maupun akibat dilanggarnya konsep tata ruang tradisional mengenai "tempat keramat" oleh kebijakan penetapan areal HGU oleh pemerintah. Dalam tabel berikut ini dijelaskan secara lebih rinci kelima dimensi kemiskinan di atas dan manifestasinya di masing-masing lokasi.

Tabel 1
Pemetaan Dimensi-dimensi Kemiskinan di Empat Lokasi Studi

LOKASI PENELITIAN / DIMENSI KEMISKINAN	ALUE CAPLI (PROVINSI ACEH)	SEDULUR SIKEP (PROVINSI JATENG)	BENTEK (PROVINSI NTB)	TANAH AI (PROVINSI NTT)
1. KSE Terkait Struktur dan Organisasi Lokal				
• Identitas Budaya		Tidak diakui dan dimarjinalkannya cara hidup orang Samin	Mahalnya biaya upacara adat bagi komunitas pemeluk Budha dan Hindu Bali	
• Struktur Kepemimpinan			Komunitas pemeluk Budha dan Hindu Bali tidak mendapat akses pada kepemimpinan desa yang didomuniasi warga Muslim	
2. KSE Terkait dengan Hak-hak Dasar				
• Hak-hak Ekonomi	Kerawanan pangan	Program bantuan yang tidak sesuai dengan sistem penghidupan masyarakat	Program bantuan yang tidak sesuai dengan sistem penghidupan masyarakat	Kerawanan pangan
• Hak-hak Sosial dan Budaya	Terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan	Pengabaian hak untuk hidup menurut keyakinan dan budaya sendiri	Terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan	Terbatasnya akses pendidikan dan kesehatan

• Hak-hak Sipil dan Politik	Konflik dan pelanggaran HAM	Pelayanan publik yang diskriminatif		Program resettlement yang berdampak buruk
3. KSE Terkait Sistem Tenurial				
• Akses dan Kontrol atas SDA			Penetapan hutan lindung tanpa konsultasi	Penetapan hutan lindung dan HGU tanpa konsultasi
• Diferensiasi Agraria	Ketimpangan penguasaan tanah	Ketimpangan penguasaan tanah	Ketimpangan penguasaan tanah	
4. KSE Terkait Hubungan Produksi				
• Hubungan-hubungan Penyakapan	Sistem sewa dan gadai yang tidak adil			
• Hubungan-hubungan Perburuhan	Upah buruh yang rendah			
• Produktivitas Pertanian	Konversi sawah ke tambak (produksi pangan menurun); serangan virus udang			Pergeseran dari pola polyculture ke monoculture (tanaman komersial) --> produksi pangan terancam

Diolah penulis dari laporan hasil studi di empat lokasi

Pada bagian berikut ini, dari kelima dimensi kemiskinan di atas uraian akan difokuskan pada dimensi-dimensi yang terkait dengan penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber agraria, yakni dimensi ketiga hingga keenam. Hal ini mengingat dimensi yang pertama dan kedua sudah banyak dikupas dalam berbagai publikasi AMAN sendiri (lihat: Kartika dan Gautama 1999, AMAN 2002 dan 2003).

Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan[2]

Kasus-kasus "pencaplokan" wilayah adat untuk dijadikan kawasan hutan dan perkebunan seperti dilaporkan oleh studi dari NTB dan NTT merupakan contoh kontemporer dari apa yang pernah Marx sebut sebagai

2 Bagian ini banyak dicuplik dari tulisan Shohibuddin dan Soetarto (2009).

proses *enclosure*,[3] yaitu "sejarah pemisahan produser dari alat produksinya"; "ketika sejumlah besar orang tiba-tiba dicerabut secara paksa dari caranya menjalankan hidup, dan terlempar menjadi proletariat bebas yang 'melulu bergantung' pada pasar tenaga kerja" (dikutip dalam Fauzi, *in press*). Memang, bagi negara agraris seperti Indonesia, kepastian penguasaan atas tanah dan sumber-sumber agraria lainnya (*land and resource tenure*) sangatlah penting karena hal itu merupakan "masalah penghidupan dan kemakmuran suatu bangsa" (meminjam judul buku Moch. Tauchid). Oleh karena itu, jaminan *tenurial security* atau perlindungan atas kepastian dan keberlangsungan penguasaan rakyat atas tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi keharusan tersendiri. Amanat konstitusi kita secara tegas menyatakan keharusan menjadikan tanah dan kekayaan alam yang dikandungnya sebagai sumber bagi "sebesar-besar kemakmuran rakyat" (Pasal 33 UUD 1945).

Masalah tenurial mencuat sebagai dimensi kemiskinan yang menonjol ketika terjadi suatu dominasi dalam relasi-relasi agraria menyangkut klaim penguasaan atas sumberdaya tertentu. Hal ini terjadi terutama karena aturan-aturan hukum yang dikeluarkan negara dalam menetapkan hak atas sebidang tanah dan sumber-sumber alam lainnya seringkali tidak mengadopsi atau bahkan bertolak belakang dengan praktik-praktik sehari-hari dan kebiasaan yang telah turun temurun berlaku dalam sebuah masyarakat. Di sinilah terjadi persoalan legitimasi penguasaan, yaitu antara yang berdasarkan *de jure* dan *de facto*. Legitimasi secara *de jure* mendasarkan pada kepemilikan formal menurut aturan hukum yang dianggap sah oleh negara atau pemerintah. Sedangkan legitimasi secara *de facto* mengacu pada cara-cara kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan yang dipercayai, digunakan, dikenal dan berlaku berdasarkan hukum atau aturan yang dipraktikkan oleh masyarakat selama ini, misalnya berdasarkan praktik-praktik adat setempat (Afiff 2005). Afiff menggambarkan tumpang tindih klaim semacam ini melalui gambar sebagai berikut.

3 Secara harfiah *enclosure* berarti pemagaran, namun yang dimaksudkan di sini adalah suatu proses pergeseran penguasaan tanah yang mengakhiri hak-hak tradisional melalui mekanisme pengaplingan tanah-tanah yang berciri sumberdaya bersama menjadi tanah-tanah pribadi dengan batasan yang tegas.

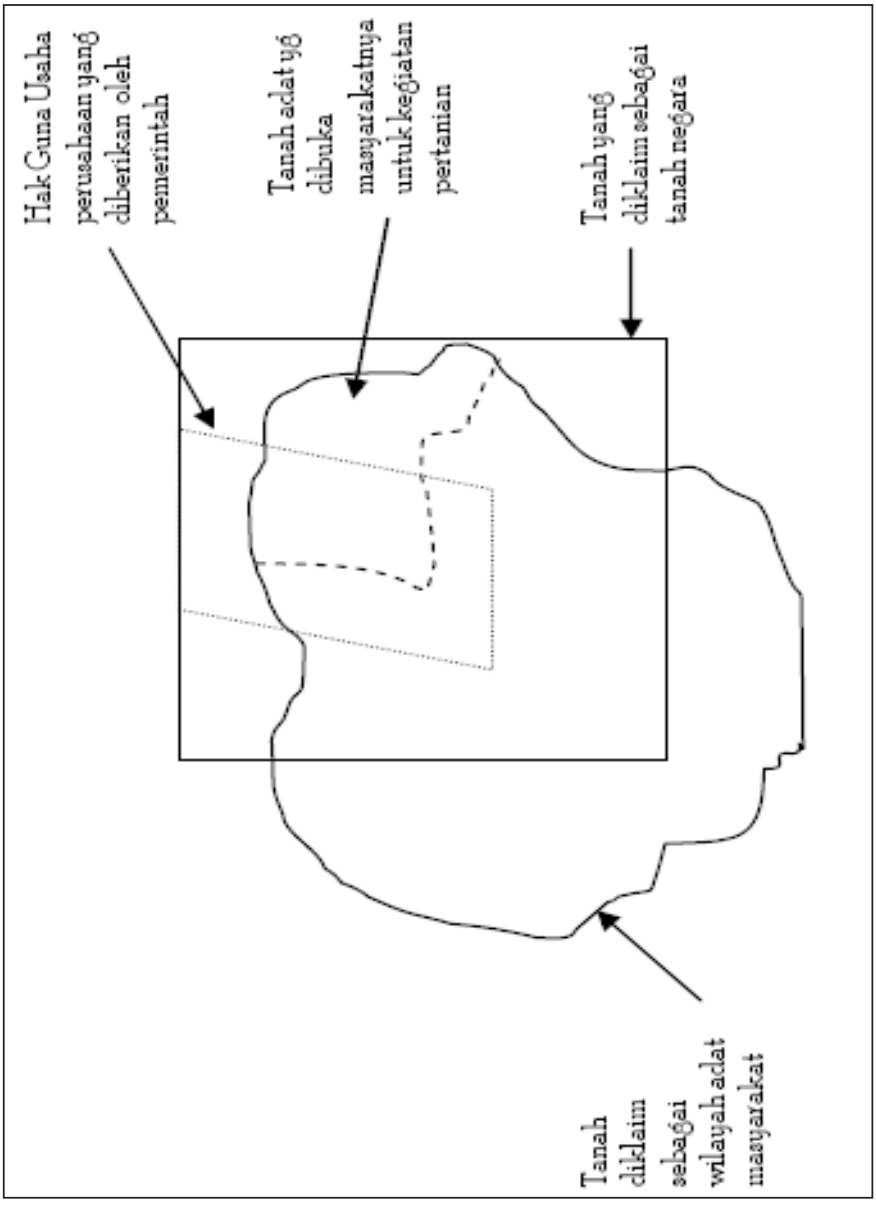

Dalam kaitan ini, maka momen historis pembentukan kemiskinan pada masyarakat adat sebenarnya bermula dari konflik tenurial semacam di atas, yaitu ketika dominasi negara dalam relasi-relasi agraria telah menyebabkan tercerabutnya hak-hak masyarakat lokal atas tanah dan sumberdaya alam lainnya di satu sisi, dan di sisi lain terakumulasinya

penguasaan sumber-sumber agraria itu pada badan-badan usaha atau perorangan yang memiliki kekuatan modal besar. Seperti dijelaskan Fauzi (2002: 341):

> "… penyebab utama dari konflik *tenurial* bersumber dari adanya dominasi suatu sistem penguasaan yang datang atau berasal dari hukum negara, yang secara sepihak memberikan layanan begitu besar pada pemilik-pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam mengelola sumber tanah dan sumberdaya alam lain termasuk hasil-hasil hutan. Sementara itu, hak-hak masyarakat setempat yang telah hidup dan mengembangkan suatu sistem tersendiri untuk mengelola tanah dan sumberdaya alam lain tersebut diabaikan dan dilanggar dengan begitu saja.

Dengan demikian, problem kemiskinan dan krisis pedesaan yang banyak terjadi pada masyarakat lokal sebenarnya berakar dari "krisis agraria" semacam ini. Inilah krisis yang menyeruak seiring dengan terjadinya proses "ekspansi kapitalisme" ke dunia pedesaan pra-kapitalis; suatu proses transformasi besar (*great transformation*) yang secara drastis merombak relasi-relasi sosial dalam proses produksi, khususnya relasi kepemilikan (*property relations*). Dalam proses inilah tanah-tanah dan kekayaan alam mulai diputuskan dari relasi-relasi sosial pra-kapitalis, dan kemudian dijadikan sebagai bagian dari modal dalam sirkuit cara produksi kapitalis. Di lain pihak, para petani yang pada mulanya memiliki hubungan erat dengan tanah dan kekayaan alam itu dilepaskan dari hubungan tersebut secara brutal, dan lantas dibiarkan lepas sebagai tenaga kerja bebas (Fauzi, *in print*).

Dalam literatur Marxian, proses inilah yang diistilahkan dengan "akumulasi primitif", yaitu ketika kekayaan dan keuntungan diakumulasikan sebagai syarat perlu bagi terjadinya titik tolak perkembangan kapitalisme. Hal yang penting digarisbawahi di sini adalah bahwa proses akumulasi ini tidaklah berlangsung sekali jadi pada tahap awal perkembangan kapitalisme semata, namun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari cara produksi kapitalis itu sendiri. Dengan demikian, dalam kasus masyarakat adat, proses akumulasi primitif ini tidak hanya berlangsung pada masa awal persentuhan dengan negara-negara Barat—mula-mula melalui hubungan perdagangan dan kemudian berlanjut menjadi dominasi dan penjajahan. Alih-alih, proses akumulasi ini, seperti ditunjukkan de Angelis (2004), tak lain adalah daya dari modal itu sendiri sebagai *enclosing social forces* atau kekuatan-kekuatan sosial yang menimbulkan proses pengkaplingan.

Proses ekspansi kapitalisme semacam inilah yang melahirkan proses marjinalisasi dan terbentuknya kemiskinan pada masyarakat adat, namun juga pada masyarakat pedesaan secara umum. Seperti dikemukakan de Angelis (2004: 58), "… there is no enclosure of commons without at the same time the destruction and fragmentation of communities." Dalam arti demikian, maka penetapan sepihak atas kawasan hutan dan perkebunan di wilayah masyarakat adat oleh pemerintah juga dapat disebut sebagai akumulasi primitif ini. Demikian pula, proses-proses perubahan agraria yang dipicu oleh introduksi komoditi global juga melibatkan bentuk-bentuk baru akumulasi primitif melalui proses pasar, seperti akan dijelaskan di bawah nanti.

Dalam kaitan ini, Wiradi (2009a) mengemukakan tiga jenis "ketimpangan agraria" yang tercipta dari proses ekspansi kapitalisme semacam di atas, yaitu: (1) ketimpangan dalam hal pemilikan dan penguasaan tanah; (2) ketimpangan dalam hal peruntukan tanah; dan (3) ketimpangan dalam hal persepsi dan konsepsi mengenai agraria.

Ketimpangan pertama bertumpu pada asumsi tidak seimbangnya rasio kuantitas dan kualitas antara pemilik dan penguasa tanah dengan mereka yang tidak memiliki tanah dan tidak mempunyai kuasa atas tanah. Ketimpangan kedua terkait dengan azas fungsi tanah. Ambisi pemerintah atas pencapaian industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi yang dihela oleh usaha skala modal besar telah menggeser prioritas pembangunan dari sektor pertanian ke industri yang padat modal. Peruntukan tanah diprioritaskan untuk mendukung industrialisasi ini sehingga tanah pertanian banyak dialihfungsikan kepada peruntukan industri, termasuk melalui penggusuran para petani kecil.

Adapun ketimpangan ketiga tampak dari pertarungan kepentingan dan klaim atas tanah antara negara melawan masyarakat adat. Klaim negara didasarkan pada konsep-konsep hukum positif (formal/legal dari Barat), sementara masyarakat adat berpijak pada berbagai hak atas tanah menurut konsepsi adat masing-masing. Di satu sisi rakyat menganggap tanah adalah tumpuan kehidupannya, sementara di sisi lain negara merasa berhak untuk meminta "pengorbanan" dari rakyat agar menyerahkan tanahnya demi "pembangunan" (cf. Gunawan 2008).[4]

4 Sepanjang sejarahnya, ekspansi kapitalisme yang melahirkan ketiga konteks ketimpangan di atas pada dasarnya merupakan sejarah perampasan tanah yang brutal; suatu sejarah "yang ditulis dengan tinta api dan darah" untuk meminjam istilah yang digunakan Karl Marx ketika membahas sejarah perampasan tanah (*enclosure*) di Inggris pada masa awal perkembangan kapitalisme.

Kesudahan dari pertarungan agraria dalam ketiga konteks ketimpangan di atas sudah dapat kita tebak, yaitu marjinalisasi komunitas adat dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti dipaparkan oleh berbagai laporan dalam buku ini, tampilan nyata dari marjinalisasi itu terlihat jelas pada merebaknya kemiskinan dalam sistem sosial mereka, sementara dalam sistem ekologis terjadi kerusakan dan degradasi lingkungan secara luas. Dengan dua tampilan tersebut maka potensi perkembangan "ko-evolusioner" antara dunia sosial dan dunia fisik pada komunitas adat pun meluruh, padahal potensi inilah yang awalnya menciptakan prakondisi bagi terwujudnya keseimbangan yang dinamis dalam interaksi komunitas adat dengan alam (cf. Noorgard 1994).

Mencermati Ekspansi Kapitalisme "Dari Bawah"

Namun selain berlangsung "dari atas" berkat fasilitasi dan dukungan ekstra ekonomi dari negara (baik negara kolonial maupun pasca kolonial), ekspansi kapitalisme sebenarnya juga bisa berlangsung "dari bawah", yakni melalui hubungan-hubungan agraris di antara anggota masyarakat sendiri menyangkut perebutan akses dan kontrol atas tanah, modal dan tenaga kerja. Seperti akan ditunjukkan di bawah, proses ekspansi kapitalisme "dari bawah" ini, tanpa ayal, juga telah berlangsung dengan massif pada masyarakat adat yang dampaknya tidak kalah besarnya dibandingkan proses ekspansi kapitalisme yang berlangsung "dari atas".

Yang menarik adalah bahwa proses semacam ini juga berlangsung bahkan di dalam konteks aksi "reklaim tanah dari bawah" (*land reform by leverage*), baik yang terorganisir maupun bukan. Banyak gerakan sosial pedesaan yang amat sadar diri dalam memobilisasi perlawanan kolektif terhadap "kapitalisme dari atas", namun biasanya gagal mencermati proses-proses "kapitalisme dari bawah" yang berlangsung di antara mereka sendiri. Padahal yang terakhir ini juga dapat menimbulkan dampak akumulasi dan penyingkiran yang serupa dari proses yang pertama, hanya kali ini terjadi di antara kelas-kelas sosial di dalam masyarakat sendiri.

Secara singkat, proses akumulasi yang berlangsung dari bawah di antara masyarakat sendiri ini pada dasarnya terjadi melalui apa yang disebut sebagai "diferensiasi agraria". White (1998: 20) mendefinisikan proses diferensiasi agraria ini sebagai:

> "… suatu perubahan yang kumulatif dan permanen dalam berbagai cara di mana kelompok-kelompok yang berbeda di dalam masyarakat desa—dan beberapa di luarnya—mendapatkan akses kepada hasil-hasil dari jerih payah tenaga kerjanya sendiri ataupun orang lain, menurut perbedaan penguasaan mereka atas sumber-sumber produksi, dan seringkali menurut ketimpangan yang kian meningkat dalam hal akses atas tanah".

Berdasarkan definisi White di atas, menjadi jelas bahwa perbedaan akses sebagian penduduk desa atas tanah dan sumber-sumber produksi lainnya telah melahirkan adanya perbedaan kekuasaan di antara mereka di dalam mengekstraksi surplus produksi dan mengakumulasi kekayaan. Hal ini pada gilirannya akan menciptakan pengelompokan kelas-kelas sosial-ekonomi yang makin menajam di pedesaan. Demikianlah, melalui proses diferensiasi agraria ini masyarakat desa yang semula relatif homogen berubah menjadi semakin terstratifikasi ke dalam kelas-kelas sosial ekonomi.

Apa yang disinggung dalam laporan buku ini mengenai berkembangnya sistem gadai dan sewa tanah di Aceh yang amat mencekik adalah kisah kecil mengenai proses diferensiasi ini. Demikian pula, perbedaan sikap di antara warga Sedulur Sikep di Jawa Tengah dalam menyikapi bantuan dan program pemerintah juga merupakan "penanda" dari perubahan relasi-relasi agraria yang lebih besar yang sedang berlangsung di komunitas itu, dan tidak bisa dijelaskan hanya sebagai cerminan dari pergeseran moral dan identitas di antara mereka (cf. Hefner 1999). Sayangnya, proses perubahan agraria di pedesaan yang massif akibat berlangsungnya "kapitalisme dari bawah" ini juga tidak banyak diulas dalam laporan-laporan yang termuat di buku ini. Padahal proses itulah (selain penetrasi dari negara) yang juga menjelaskan mengapa terjadi perubahan penghidupan yang amat drastis di pedesaan, khususnya dalam hal penguasaan tanah dan hubungan produksi serta kesempatan kerja dan pendapatan.

Di banyak tempat, proses diferensiasi ini didorong oleh komersialisasi sistem pertanian yang kian meningkat, baik sebagai dampak intensifikasi pertanian pangan yang padat modal (melalui pelaksanaan Revolusi Hijau) ataupun introduksi komoditi ekspor (cash crop). Untuk kasus pertama, penelitian Survey Agro Ekonomi (SAE) pada dekade 1970-1980-an memberikan perbandingan menarik mengenai bagaimana proses perubahan agraria yang berlangsung pasca pelaksanaan Revolusi Hijau di desa-desa pertanian padi sawah. Secara padat, aspek-aspek perubahan agraria itu

diringkaskan oleh Wiradi (2009b: 136-137) sebagai berikut:

- Terjadinya proses pemusatan penguasaan tanah, baik melalui sewa-menyewa, gadai-menggadai, maupun melalui pemilikan dengan pembelian.
- Tingkat ketunakismaan yang bertambah tinggi. Kesempatan para tunakisma untuk dapat menguasai tanah melalui sewa-menyewa dan bagi hasil semakin terbatas karena ada kecenderungan para pemilik tanah lebih suka menggarap tanahnya sendiri daripada menggarapkannya (melalui sewa/bagi hasil) kepada orang lain.
- Walaupun umumnya proporsi pendapatan dari sektor non-pertanian lebih besar daripada yang bersumber dari sektor pertanian, namun luas kepemilikan tanah ternyata berjalan sejajar dengan tingkat kecukupan. Ini berarti bahwa jangkauan terhadap sumber-sumber di luar sektor pertanian lebih dimiliki oleh para pemilik tanah luas daripada pemilik tanah sempit atau lebih-lebih para tunakisma.
- Pada strata pemilikan tanah yang sempit dan tunakisma terdapat proporsi rumah tangga miskin yang lebih besar. Dengan demikian berarti bahwa pemilikan tanah tetap merupakan faktor yang turut menentukan tingkat hidup di pedesaan.

Sementara itu, untuk kasus kedua, studi Tania Li tentang "booming komoditas kakao" di dataran tinggi Sulawesi Tengah memberikan perbandingan menarik mengenai bagaimana proses komersialisasi pertanian yang didorong oleh introduksi komoditi pasar. Dengan merujuk pada komunitas Lauje, Li (2002: 422) menunjukkan bahwa:

> "Introduksi tanaman komersial di wilayah perbukitan komunitas Lauje telah memotong siklus perladangan berpindah. Pohon kakao mulai ditanam di tanah ladang berpindah bersama-sama dengan tanaman jagung, dan terus diulang pada tahun-tahun berikutnya, sehingga tidak ada lagi ladang yang tersisa. Dan seiring dengan transformasi lanskap ini terjadi pula transformasi sosial yang berlangsung dalam tiga tahap. Hal ini mencakup *enclosure*, komoditisasi, dan akumulasi yang timpang (*uneven accumulation*) atas tanah, hingga pada satu titik di mana banyak petani Lauje secara efektif saat ini menjadi tuna wisma.

Lebih lanjut, tiga tahapan proses diferensiasi agraria seiring dengan introduksi tanaman kakao ini diuraikan secara rinci oleh Li sebagai berikut (2002: 422-423):

> "Tahap transformasi pertama adalah privatisasi tanah melalui penyingkiran ahli waris lainnya: tindakan menanam pohon kakao pada ladang berpindah akan membuatnya tertutup bagi orang lain, dan akan mengeluarkannya dari ladang yang menjadi warisan bersama sebuah keluarga besar. Pada serbuan penanaman tahap awal, petani yang lebih banyak mempunyai modal, tenaga kerja dan pengetahuan genealogis mengenai di mana leluhurnya dulu pernah membuka hutan mampu mengkonsolidasikan penguasaan atas areal tanah yang luas. Sebaliknya, mereka yang lebih lambat memulai, dan mereka yang tidak memiliki klaim warisan leluhur, gagal memiliki tanah…"

> "Pada tahap kedua, tanah yang telah diprivatisasi melalui penanaman kakao, mulai diperlakukan sebagai komoditi yang dapat dijual ke pihak ketiga, suatu transaksi yang secara umum dianggap permanen. Para petani yang terdesak oleh kebutuhan uang tunai menjual areal belukar yang baru mereka tanami kakao kepada tetangganya yang lebih mampu, satu bidang tanah pada satu saat, sampai mereka kini mendapati diri mereka menjadi buruh upah pada tanah yang pernah menjadi milik mereka…"

> "Tahap ketiga adalah berlangsungnya proses konsentrasi dan penyisihan, yaitu ketika para elit dari dataran rendah dan pengusaha dari kota yang mempunyai banyak modal membeli kebun-kebun kakao di dataran tinggi…"

Dari perbandingan dua kasus di atas dapat terlihat dengan jelas bagaimana cara dan mekanisme perubahan agraria yang terjadi seiring berlangsungnya *capitalism from below*, dan pengaruhnya pada pembentukan kemiskinan dan kesenjangan di tengah penduduk pedesaan. Memang, pada tataran empiris, proses-proses transformasi kehidupan, sumber nafkah dan basis sumberdaya masyarakat pedesaan selalu dibentuk dan didorong oleh kedua kekuatan ini sekaligus ("kapitalisme dari atas dan dari bawah"). Oleh

karena itu, perhatian terhadap keduanya, terutama mekanisme-mekanisme yang menciptakan akumulasi di satu sisi dan pemiskinan di sisi lain, harus dilakukan secara berimbang. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai proses-proses agraria yang berlangsung di lapangan dan kekuatan-kekuatan pengarahnya dalam kedua arus kapitalisme tersebut (dari atas dan dari bawah).

Identifikasi Krisis Agraria pada Masyarakat Adat

Berkaitan dengan urgensi di atas, maka menjadi tantangan tersendiri bagi AMAN untuk merintis pengembangan instrumen identifikasi krisis agraria pada masyarakat adat untuk dapat menemukenali akar, proses, mekanisme dan tampilan dari kemiskinan relasional yang berlangsung pada berbagai komunitas adat. Tantangan serupa dalam konteks yang berbeda juga pernah dikemukakan oleh Tania Li (2001) yang menyatakan bahwa hanya melalui pemahaman atas proses perubahan agraria seperti itu maka pola-pola dan sebab-sebab kemiskinan dan ketimpangan pada komunitas lokal dapat lebih dijernihkan. Dan dari pemahaman semacam inilah menurut Li baru dimungkinkan adanya respon-respon yang lebih politis (dan bukan sebatas manajerial) pada berbagai level, termasuk dalam konteks strategi gerakan sosial.

Tantangan semacam ini perlu direspon oleh AMAN, khususnya belajar dari pengalaman gerakan-gerakan petani yang terlibat dalam berbagai aksi reklaim tanah atau *land reform by leverage*. Banyak kasus menunjukkan bahwa pasca okupasi tanah ternyata proses-proses akumulasi, penyisihan dan diferensiasi agraria juga berlangsung di tengah-tengah para pelaku aksi reklaim ini yang mengingkari semangat keadilan agraria yang mereka perjuangkan. Temuan awal riset Sajogyo Institute bersama Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional pada tahun 2009 ini misalnya menemukan bahwa para pelaku reklaim tanah di dataran tinggi Jawa Barat ternyata gagal memahami struktur ekonomi sayur mayur yang dicirikan oleh pasar output yang monopsonistik dan pasar input yang monopolistik sebagai struktur ketidakadilan agraria yang harus ditentang. Bahkan patronase yang tidak adil antara bandar-petani kecil juga berkembang luas di antara para petani pelaku reklaim ini sendiri, sedemikian rupa sehingga proses akumulasi kekayaan dan diferensiasi agraria juga sudah mulai terlihat mencolok.

Dalam konteks urgensi di atas, tulisan ini ingin menawarkan suatu kerangka penelitian yang dapat mengintegrasikan variabel-variabel dinamis yang berkaitan dengan soal tenurial, hubungan-hubungan produksi, keberlanjutan layanan alam, dan organisasi sosial untuk dapat mengidentifikasi kondisi *socio-economic insecurity* suatu masyarakat secara lebih komprehensif dan relasional. Untuk itu, sebagai uraian penutup, pada bagian di bawah ini akan disajikan empat dimensi kerentanan sosial-ekonomi (*socio-economic insecurity*) sebagai suatu "denominator umum" untuk mencirikan relasi-relasi agraria dan yang terkait yang menentukan kondisi kemakmuran dan kemiskinan masyarakat. Empat dimensi kerentanan sosial-ekonomi (KSE) dimaksud secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Kerentanan yang terkait dengan penguasaan tanah dan sumberdaya lainnya (*land and resource tenure*);
2. Kerentanan dalam konteks relasi-relasi produksi;
3. Kerentanan dalam konteks keberlanjutan layanan alam; dan
4. Kerentanan yang terkait dengan relasi-relasi kuasa dalam isu organisasi sosial dan kepemimpinan.

Dalam tabel berikut ini disajikan secara lebih rinci variabel-variabel apa saja yang akan menentukan keamanan atau kerentanan sosial-ekonomi suatu masyarakat dalam keempat dimensi di atas.

Tabel 2
Variabel-variabel Dinamis Penentu Kerentanan Sosial-Ekonomi (KSE)

KSE Terkait Penguasaan Tanah dan Sumberdaya Alam Lainnya (TSL)	KSE Terkait Relasi-relasi Produksi	KSE Terkait Keberlanjutan Layanan Alam	KSE Terkait Isu Organisasi dan Kepemimpinan
• Akses dan kontrol atas TSL dan ketimpangannya • Dasar-dasar klaim atas TSL dan ketimpangannya • Dimensi gender dalam penguasaan TSL dan ketimpangannya • Kaitan tipe-tipe tata guna tanah dengan kepastian/ kerentanan tenurial • Isu pluralisme hukum & pengaruhnya terhadap kepastian/ kerentanan tenurial • Pengaruh pengakuan formal dalam bentuk sertifikasi terhadap kepastian/ kerentanan tenurial • Diferensi agraria dan kelas-kelas sosial-ekonomi di desa • Proses-proses transformasi yang terjadi dalam konteks perubahan ekonomi politik dan ekologi yang lebih luas	• Hubungan-hubungan penyakapan dan pola interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat • Hubungan-hubung-an perburuhanan dan pola interaksi di antara pihak-pihak yang terlibat • Perubahan kelembagaan penyakapan dan hubungan kerja dan faktor-faktor penyebabnya • Dimensi gender dalam hubungan-hubungan produksi • Transformasi kesempatan kerja pedesaan akibat perubahan sistem produksi, alih komoditi, perubahan bentang alam, dll.	• Persepsi mengenai alam, kepemilikan, dan akses yang didefiniskan secara berlainan menurut latar belakang budaya dan kelas • Setting kelembaga-an yang mempenga-ruhi pola interaksi manusia dengan alam • Transformasi alam akibat perubahan pola produksi, komoditi, rezim pengelolaan, dll • Isu-isu terkait dengan daya dukung ekologi dan perubahan iklim	• Relasi-relasi kuasa terkait otoritas dan legitimasi • Relasi-relasi kuasa terkait elit dan orang biasa • Relasi-relasi kuasa terkait etnis asli dan etnis pendatang • Relasi-relasi kuasa antara lelaki dan perempuan • Relasi-relasi kuasa antar komunitas desa • Relasi-relasi kuasa terkait kesenjangan generasi dan isu keberlanjutan antar generasi • Relasi-relasi kuasa antara komunitas desa dengan lingkungan ekologi politik yang lebih luas (pemerintah, LSM, dll)

Kerangka penelitian di atas barulah merupakan sebuah inventarisasi variabel-variabel kunci yang harus dikembangkan lebih lanjut konseptualisasi dan teorisasinya. Bagaimanapun, hal itu dapat menjadi langkah awal untuk melihat bagaimana relasi-relasi agraria merupakan proses kunci dalam melihat bagaimana akumulasi kekayaan terjadi dengan sisinya yang lain adalah terciptanya marginalisasi dan kemiskinan.

Penutup

Uraian di atas telah menunjukkan berbagai dimensi kemiskinan dan arti penting krisis agraria sebagai faktor penting pembentuk kemiskinan dalam konteks masyarakat agraris. Atas dasar itu, maka pemahaman atas krisis agraria itu dan perjuangan merombaknya harus menjadi bagian dari strategi dasar AMAN dalam menjawab problem kemiskinan pada masyarakat adat.

Pada bagian penutup ini penulis ingin mengundang para pendukung dan pelaku gerakan masyarakat adat untuk mengembangkan instrumen yang memadai guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses-proses diferensiasi agraria yang telah berlangsung pada berbagai komunitas adat di tanah air. Dalam kaitan ini, empat kelompok variabel penentu kerentanan sosial-ekonomi yang diajukan di atas adalah sumbangan penulis yang bisa dijadikan titik tolak untuk diperbaiki, dimodifikasi dan dikembangkan lebih lanjut dalam rangka pengembangan instrumen dimaksud. Penulis percaya bahwa hanya dengan menyadari persoalan krusial ini dan mengembangkan kemampuan untuk menemukenalinya, maka proses-proses yang mendasari pembentukan kemiskinan dan marginalitas pada masyarakat adat dapat diterangi dan dijernihkan, sehingga respon pada berbagai tingkatan (*multi-layers*) dan yang melibatkan lintas pelaku (*cross-borders*) dapat diupayakan secara lebih tepat dan efektif.

Tantangan kini terpulang kepada AMAN untuk mewujudkan undangan di atas. Apabila hal ini dapat dilakukan, dan jawaban menyeluruh atas keempat dimensi kerentanan sosial-ekonomi di atas bisa diupayakan, maka di situlah dapat diperlihatkan dengan jelas bahwa "perjuangan atas identitas" dan "perjuangan atas tanah" merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam gerakan AMAN. Semoga!

Daftar Bacaan

Afiff, Suraya (2005) *"Tinjauan atas Konsep 'Tenure Security', dengan Beberapa Rujukan pada Kasus-Kasus di Indonesia."* Jurnal Wacana, Edisi 20, Tahun VI: 225-247.

Aliasi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) (2002) *Keharusan Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat*. Jakarta: Sekretariat AMAN.

AMAN (2003) *Satu yang Kami Tuntut: Pengakuan*. Jakarta: ICRAF, Sekretariat AMAN, Forest Peoples Programme.

Burkard, Günter (2008) *"'Stability' or 'Sustainability'? Changing Conditions of Socio-economic Security and Processes of Deforestation in a Rainforest Margin"* in Günter Burkard and Michael Fremerey (eds) *A Matter of Mutual Survival: Social Organization of Forest Management in Central Sulawesi*, Indonesia. Berlin: Lit Verlag.

De Angelis, Massimo (1999) *"Marx's Theory of Primitive Accumulation: A Suggested Reinterpretation."* Working Paper No. 29, Department of Economics, University of East Anglia London, http://homepages.uel.ac.uk/M.DeAngelis/PRIMACCA.htm, diakses pada tanggal 10 Oktober 2009.

De Angelis, Massimo (2004) *"Separating the Doing and the Deed: Capital and the Continuous Character of Enclosures."* Historical Materialism 12(2): 57–87.

Fauzi, Noer (2002), *"Konflik Tenurial: yang Diciptakan Tapi Tak Hendak Diselesaikan"* dalam Anu Lounela dan R. Yando Zakaria (eds), *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Berperspektif Kampus dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press.

Fauzi, Noer (in press) *"Desentralisasi dan Community Driven Development dalam Konteks Pembangunan Kapitalis: Suatu Kajian Teoritis."* Akan dimuat dalam Majalah Prisma.

Gunawan, Bondan (2008) *"Mengurai Benang Kusut Agraria: Menuju Kemakmuran dan Keadilan bagi Masyarakat Adat di Indonesia."* Makalah disampaikan dalam Muswil Aliansi Masyarakat Adat Babel, 11 April 2008.

Hefner, Robert W (1999) *Geger Tengger: Perubahan Sosial dan Perkelahian Politik*. Yogyakarta: LKiS.

Kartika, Sandra dan Candra Gautama (1999) *Menggugat Posisi Masyarakat Adat terhadap Negara*. Jakarta: AMAN.

Li, Tania M. (2001) *"Agrarian Differentiation and the Limits of Natural Resource Management in Upland Southeast Asia."* IDS Bulletin, 32(4): 88-94.

Li, Tania M. (2002) *"Local Histories, Global Markets: Cocoa and Class in Upland Sulawesi."* Development and Change 33(3): 415-437.

Mosse, Adam (2007) *"Power and the Durability of Poverty: a Critical Exploration of the Links between Culture, Marginality and Chronic Poverty."* Working Paper 107, Chronic Poverty Research Centre.

Norgaard, R. (1994) *Development Betrayed: The End of Progress and a Coevolutionary Revisioning of the Future*. London and New York: Routledge.

Shohibuddin, Moh. dan Endriatmo Soetarto (2009) *"Krisis Agraria Sebagai Akar Kemiskinan: Menuju Pandangan Relasional Mengenai Kemiskinan"*. Dimuat dalam Buku Peringatan 70 Tahun Prof. Djoko Suryo. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Shohibuddin, Moh. dan Soeryo Adiwibowo (2009) *"Sejauh Mana Upaya-upaya Kolaborasi Bisa Koadaptif? Kasus Kesepakatan Konservasi Berbasis Adat di Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah."* Paper disampaikan pada Lokakarya Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam, diselenggarakan atas kerjasama WWF Indonesia dengan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia IPB, 29-30 Oktober 2009.

White, Ben (1989) *"Problems in the Empirical Analysis of Agrarian Differentiation"* in G. Hart, A. Turton, B. White (eds) Agrarian Transformation: Local Processes and the State in Southeast Asia. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.

Wiradi, Gunawan (2009a) *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Edisi Baru. Penyunting: Noer Fauzi, penyelaras Edisi Baru: Moh. Shohibuddin. Jakarta, Bogor, Bandung: Konsorsium Pembaruan Agraria, Sajogyo Institute, AKATIGA.

Wiradi, Gunawan (2009b) *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Penyunting: Moh. Shohibuddin. Bogor: Sajogyo Institute, Pusat Kajian Agraria dan Departemen Sains KPM IPB.

1

AWALAN :

MASYARAKAT ADAT, KESEJAHTERAAN, DAN FAKTA-FAKTA KEMISKINAN

*Oleh: Restu Achmaliad*i

Masyarakat Adat dan Nasibnya yang Tak Kunjung Berubah

Istilah ”masyarakat adat” atau ”adat” mulai tidak asing lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Media massa, baik elektronik maupun surat kabar, sering memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat adat. Baduy, Samin, Asmat, Dayak adalah beberapa komunitas adat yang cukup sering menjadi pokok berita dalam media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Dalam perundang-undangan istilah ”masyarakat hukum adat” juga telah lama dikenal.

Akan tetapi, sayangnya, pengenalan kata ”masyarakat adat” ini tidak diimbangi dengan pemahaman yang sebenar-benarnya tentang kata ini. Masyarakat pada umumnya masih kurang tepat memahami apa makna kata “masyarakat adat” ini sesungguhnya. Ada dua pokok pemahaman yang keliru tentang masyarakat adat di kalangan publik.

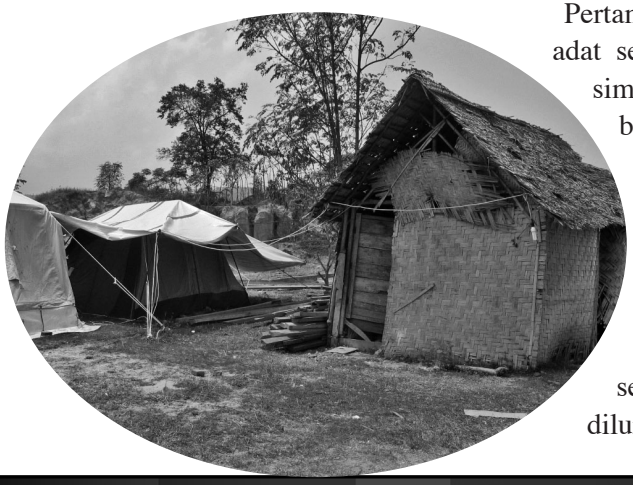

Pertama, biasanya kata masyarakat adat selalu dikaitkan dengan simbol-simbol kekuasaan kerajaan: baju-baju adat, aturan kebangsawanan yang feodal, dll. Atau kedua, kata masyarakat adat dikaitkan dengan suku terasing, primitif, kuno, terbelakang, nilai-nilai lama, dll. Pemahaman publik tentang masyarakat adat yang seperti ini sangat keliru dan perlu diluruskan.

Jauh sebelum konsep negara kerajaan atau kesultanan dikenal (bersamaan pengaruh masuknya berbagai agama besar di Nusantara), bahkan jauh sebelum berbagai pengaruh kolonial masuk ke Nusantara (Portugis, Belanda, Inggris), di seluruh pelosok Nusantara ini (sebagiannya kemudian menjadi wilayah Indonesia) telah hidup dan berkembang kesatuan-kesatuan sosial politik yang berdaulat. Mereka secara otonom mengatur dan mengurus dirinya serta mengelola sumberdaya alam di wilayah ekosistem masing-masing. Komunitas-komunitas ini telah mengembangkan aturan-aturan (hukum) dan juga sistem kelembagaan (sistem politik/pemerintahan) untuk menjaga keseimbangan antar warga di dalam komunitas tersebut dan juga antara komunitas tersebut dengan alam di sekitarnya. Sekelompok penduduk yang hidup berdasarkan asal usul yang diwariskan oleh leluhurnya ini secara mendunia dikenal sebagai indigenous peoples dan di Indonesia dikenal dengan masyarakat adat.

Masyarakat adat adalah satuan komunitas terkecil yang mampu mengurus dirinya sendiri, tidak ”menaklukkan-ditaklukkan” sebagaimana proses pembentukan kerajaan atau negara; dan biasanya memiliki ciri-ciri berikut (meskipun tidak mutlak:)

a. Memiliki wilayah hidup tertentu,
b. Memiliki struktur pengurusan yang khas,
c. Memiliki pranata adat tertentu, dan
d. Mempraktekkan berbagai pranata tradisional yang dimilikinya.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang terbentuk di Jakarta pada tahun 1999 mendefinisikan masyarakat adat sebagai berikut: “kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah sendiri”.

Selain definisi dari AMAN, cukup banyak definisi tentang masyarakat adat yang lain. Cukup banyak juga berbagai istilah resmi pemerintah yang dilekatkan pada masyarakat adat, antara lain: masyarakat terasing, suku terasing, masyarakat terpencil, dll. Dalam berbagai perundangan Indonesia juga dikenal istilah ”masyarakat hukum adat”. Berbagai istilah selain ”masyarakat adat” ini berkecenderungan mereduksi dan/atau memarjinalkan keberadaan masyarakat adat yang sebenarnya. Berbagai istilah yang salah ini menjadi salah satu sumber salah kaprah pemahaman tentang masyarakat adat.

Nusantara terdiri atas beragam ras, ratusan suku dan etnis, ratusan bahasa daerah, serta ribuan komunitas adat. Berbagai bentuk komunitas masyarakat adat telah teridentifikasi dan mulai dikenal publik: komunitas-komunitas adat di Jawa Barat (Baduy, berbagai *kasepuhan* di Halimun, Kampung Dukuh, Kampung Naga), marga di Sumatera bagian selatanUtara, *nagari* di Sumatera Barat, *mukim* di Aceh, *binua* di Kalimantan Barat, *kademangan* di Kalimantan Tengah, *ngata* di sekitar Palu, *petuanan* di Maluku, dll. Sebagian besar masyarakat adat, mungkin, belum teridentifikasi dengan baik, atau komunitas-komunitas ini – meskipun dalam kehidupan sehari-harinya telah menjalani kehidupan masyarakat adat yang sebenarnya – tidak merasakan perlunya menyatakan diri dan menyampaikannya ke pihak luar bahwa komunitasnya adalah masyarakat adat. Masih banyak lagi komunitas masyarakat adat tersebar di Nusantara, selain yang telah tergabung dan tercatat menjadi anggota Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Masyarakat adat adalah salah satu komponen pembentuk bangsa dan Negara Indonesia. Ribuan komunitas masyarakat adat tersebar luas di seluruh pelosok Indonesia, baik yang telah menyatakan diri maupun yang "belum" menyatakan dirinya sebagai masyarakat adat. Sayangnya, sejak masa penjajahan maupun setelah Indonesia berdiri nasibnya terus kurang beruntung. Berbagai komunitas masyarakat adat ini, yang kebanyakan hidup di wilayah perdesaan dan sekitar hutan, terus mengalami tekanan dan penyingkiran, baik oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain atau, bahkan, oleh negara.

Pada masa penjajahan, sumber ekonomi masyarakat adat (tanah, hasil bumi, tenaga) telah dirampas dan menjadi monopoli perdagangan oleh pemerintah jajahan. Monopoli dan peperangan dalam memperebutkan rempat-rempah antara Belanda dan masyarakat Maluku – pada masa penjajahan – adalah gambaran perampasan sumberdaya yang dimiliki masyarakat adat. Pemaksaan *culturestelsel* dan permberlakuan "perkebunan bebas" di Nusantara pada masa penjajahan Belanda adalah bentuk lain perampasan sumberdaya (tanah, hasil bumi, tenaga) oleh pemerintah kolonial yang menyebabkan kemerosotan kehidupan masyarakat Nusantara, tetapi memberikan surplus yang luar biasa kepada Negara Hindia Belanda maupun negara induknya di Belanda.

Tekanan-tekanan yang dialami oleh masyarakat adat tidak berhenti meskipun Indonesia telah merdeka. Salah satu tujuan pembentukan negara adalah agar keadilan dan kemakmuran bisa terwujud dalam kehidupan

warga negaranya. Akan tetapi, apa yang dialami oleh masyarakat adat setelah Indonesia merdeka berlawanan dengan apa yang menjadi salah satu tujuan pembentukan Negara Indonesia.

Pemerintah Indonesia, dalam praktik kenegaraannya, khususnya dalam membuat kebijakan perekonomian, cenderung berpihak kepada pihak-pihak yang memiliki kekuatan modal besar; yang seringkali tidak mempedulikan kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat adat.

Pada masa Orde Baru, sebagian besar wilayah Indonesia dikonsesikan menjadi areal pengusahaan hutan, areal perkebunan, dan areal pertambangan. Jutaan hektar hutan juga telah dijadikan kawasan konservasi yang "terlarang" untuk masyarakat adat. Sebagian besar areal yang dijadikan konsesi ini merupakan wilayah hidup berbagai komunitas adat.

Dalam bidang non fisik pun masyarakat adat mengalami tekanan dan penyingkiran yang luar biasa. Otonomi kepengurusan hidup masyarakat adat hampir punah dengan diberlakukannya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang "mewajibkan" struktur pemerintahan desa model Jawa kepada seluruh unit komunitas terbawah di Indonesia, termasuk komunitas masyarakat adat.. Sampai saat ini, pada komunitas masyarakat yang tetap memegang teguh model kelembagaan kampung yang diturunkan nenek moyang, model pemerintahan desa yang dipaksakan itu hanya menimbulkan kebingungan dan konflik antar anggota masyarakat saja.

Kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan tersurat jelas dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 29; kebebasan memeluk agama dan kepercayaan pun menjadi salah satu hak asasi manusia yang paling hakiki. Cukup banyak komunitas masyarakat adat yang memiliki agama dan kepercayaan sendiri. Agama atau kepercayaan ini tumbuh dan berkembang bersama dengan keberadaan komunitas adat itu. Pada praktik kenegaraan yang berjalan, Pemerintah Indonesia secara formal hanya mengakui lima buah agama besar/mainstream yang umum dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kebanyakan berbagai agama atau kepercayaan asli nusantara mengalami diskriminasi, baik secara sengaja maupun tidak. Dalam pencatatan administrasi kependudukan, baik untuk tanda pengenal maupun kebutuhan pencatatan administrasi yang lain, agama asli atau kepercayaan selain lima agama besar itu tidak bisa secara eksplisit dicantumkan. Pemerintah juga tidak melayani pencatatan administrasi sipil pernikahan antara dua orang, kecuali memeluk lima agama besar yang diakui pemerintah itu. Berbagai stigma negatif sering

diterima oleh para pemeluk agama atau kepercayaan asli ini; kaum animis, kaum kafir, penyembah berhala, kaum sinkretis, dan lain-lain.

Reformasi dan jatuhnya rejim Orde Baru terjadi pada tahun 1998. Jatuhnya rejim Orde Baru yang otoriter membawa harapan besar untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis. Daerah-daerah kemudian bisa mendapatkan otonomi yang lebih baik. Runtuhnya Orde Baru diharapkan juga akan menghilangkan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang telah menggurita selama masa Orde Baru; yang berujung pada kolapsnya perekonomian Indonesia pada tahun 1997-1998. Dengan tiadanya KKN, diharapkan perwujudan proses pembangunan menjadi lebih transparan, serta negeri yang adil dan makmur menjadi lebih mudah terwujud. Reformasi diharapkan akan membawa kebaikan bagi masyarakat adat; tidak akan ada lagi perampasan hak, penyingkiran, dan diskrimasi terhadap masyarakat adat di semua bidang kehidupan.

Akan tetapi, Reformasi tidak banyak membuat perubahan nasib masyarakat adat yang lebih baik. Perampasan dan penggunaan tanah adat secara sewenang-wenang masih terus berlangsung. Perkebunan kelapa sawit pada tahun 1978 hanya 250 ribu hektar; pada tahun 1998 mencapai 2,98 juta hektar. Saat ini total luas kebun kelapa sawit adalah 6.059.441 hektar (Cholchester dkk., 2006). Pemerintah daerah seluruh Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten, merencanakan perluasan perkebunan kelapa sawit yang nantinya akan mencapai luas 19.840.000 hektar (Sawit Watch, 2006). Hampir keseluruhan perkebunan kelapa sawit ini berada di wilayah hidup masyarakat adat. Konflik yang timbul antara masyarakat dengan pihak perkebunan di berbagai daerah tidak henti-hentinya berlangsung; tanpa ada penyelesaian yang memuaskan.

Setelah Reformasi, kerusakan sumberdaya hutan lebih parah dibandingkan masa sebelumnya. Pada tahun 1980-an laju kerusakan hutan sekitar 1 juta hektar per tahun; pada tahun 1990-an laju kerusakan meningkat menjadi 1,7 hektar per tahun; setelah tahun 1996 laju kerusakan menjadi lebih dari 2 juta hektar per tahun (FWI, 2001). Sebagian besar kawasan hutan itu merupakan wilayah hidup masyarakat adat, yang secara sepihak diklaim menjadi hutan negara yang kemudian dikonsesikan kepada berbagai badan usaha. Efek hancurnya sumberdaya hutan ini dirasakan langsung oleh masyarakat adat yang memang hidup di sekitar hutan. Perubahan musim dan iklim lokal yang drastis menyebabkan sulitnya menerapkan pola dan perhitungan bertani seperti biasa; banjir dan kekeringan semakin sering terjadi.

Reformasi dan otonomi daerah telah membawa perubahan drastis dalam kehidupan demokrasi masyarakat Indonesia. Pemilihan kepala daerah – dan pemilihan presiden – telah dilakukan dengan langsung; pemilihan umum (Pemilu) menjadi lebih akuntabel dan transparan. Akan tetapi, kehidupan yang lebih demokratis ternyata tidak membuat kehidupan masyarakat adat menjadi lebih baik. Banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, malahan merugikan masyarakat adat. Prosedur demokrasi telah berlangsung dengan baik, tetapi ternyata hanya menguntungkan kelompok-kelompok elit dan kelompok oligarki yang bertumbuhan di daerah. Sering nama "adat" dibawa-bawa dalam proses politik di daerah, tetapi itu bukan untuk kemashalatan masyarakat adat; hanya untuk kepentingan elit-elit daerah tertentu.

Kondisi yang kurang menguntungkan dari masyarakat adat, di mana sebagian besar mereka hidup di perdesaan dan di sekitar hutan, tercermin dalam berbagai data pembangunan. Pada tahun 2007, Papua dan Papua Barat memiliki persentase kemiskinan paling buruk di Indonesia; yakni 40,78% dan 39,31% (BPS, 2008). Jumlah penduduk miskin di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) pada tahun 2007 adalah 26,65%. Persentase kemiskinan di ketiga daerah tersebut jauh di atas rata-rata kemiskinan di tingkat nasional, yakni 16,58%. Sebagian besar penduduk di ketiga provinsi tersebut, khususnya penduduk di perdesaan dan sekitar hutan, adalah komunitas masyarakat adat. Ini belum termasuk berbagai macam keterbatasan yang termasuk ragam faktor dalam menilai kemiskinan: indeks GINI, tingkat melek huruf, kesempatan menyelesaikan pendidikan dasar, kondisi rumah dan sanitasi, indikator kesehatan, dan lain-lain. Yang ironis adalah bahwa NAD, Papua, dan Papua Barat termasuk 10 provinsi yang kaya dan memiliki product domestic bruto (PDB) besar di Indonesia.

Konsep-konsep Pembangunan dan Kemiskinan

Saat ini kita hidup dalam suatu abad yang dikenal sebagai zaman pembangunan. Konsep dan gagasan tentang pembangunan telah mendominasi dan mempengaruhi pemikiran bangsa-bangsa secara global, sehingga – seakan-akan – hanya pembangunanlah jalan untuk membebaskan dunia dari kemiskinan dan keterbelakangan bagi berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga. Istilah pembangunan (*development*) kini telah

menyebar dan dipergunakan sebagai visi, teori dan proses yang diyakini oleh rakyat di hampir semua negara, khususnya Dunia Ketiga. Dan selanjutnya pembangunan menjadi sinonim kata modernisasi.

Gagasan modern tentang pembangunan berkaitan dengan pandangan tentang kemajuan dan evolusi yang telah sangat mempengaruhi budaya Barat sejak jaman pencerahan (aufklarung). Dengan adanya pertumbuhan ilmu pengetahuan dan perkembangan kapitalisme serta industrialisasi, keyakinan pada kemajuan secara bertahap menggeser kepercayaan pada Tuhan. Anggapan bahwa masa depan dapat dikontrol oleh kemajuan pengetahuan manusia menjadi sesuatu yang tak terpisahkan dari budaya Barat.

Kendati gagasan pembangunan sangat berkait dengan berkembangnya kapitalisme dan modernisasi di Eropa abad XIX, namun pelembagaan pembangunan dimulai setelah Perang Dunia kedua. Periode ini menjadi saksi kelahiran organisasi pembangunan, ahli pembangunan, rencana pembangunan nasional, dan berbagai kuliah pembangunan di perguruan tinggi.

Akhir Perang Dunia kedua juga merupakan awal bermunculannnya negara-negara baru; yang memproklamirkan kemerdekaannya – termasuk Indonesia -- lepas dari penjajahan yang umumnya telah berlangsung ratusan tahun. Negara-negara baru ini, biasanya, menyatakan diri merdeka dalam kondisi yang memprihatinkan. Meskipun secara langsung tidak mengalami Perang Dunia kedua, penjajahan ratusan tahun mewariskan kemiskinan yang kronis kepada negara-negara baru ini. Negara-negara baru inilah yang kemudian disebut dengan berbagai istilah: “negara sedang berkembang”, “Dunia Ketiga”, dan lain-lain. Sebutan-sebutan ini, sebenarnya, merupakan bentuk superioritas cara pandang Dunia Barat kepada berbagai negara baru ini.

Pidato pengukuhan Presiden AS, Henry Truman, pada tahun 1949 memberi tekanan yang jelas tentang cara pandang negara-negara Barat terhadap persoalan-persoalan utama pembangunan dan alat pemecahannya. Meskipun sudah lebih dari 50 tahun yang lalu pidato itu diucapkan, tetapi sampai sekarang tetap relevan menjadi acuan bagaimana bangsa-bangsa Barat memandang persoalan kemiskinan, dan pembangunan di Dunia Ketiga. Berikut ini salah satu paragraf kutipan pidato itu:

> “Lebih dari setengah jumlah penduduk dunia hidup dalam kondisi yang menderita. Makanan mereka tidak mencukupi. Mereka menjadi korban penyakit. Kehidupan

> ekonomi mereka primitif dan stagnan. Kemiskinan mereka merupakan suatu noda dan ancaman bukan saja bagi mereka tetapi juga bagi wilayah yang lebih makmur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, umat manusia memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menghapus penderitaan orang-orang tersebut."

Jadi negara-negara Barat memandang negara-negara yang lepas dari kolonisasi sebagai "wilayah terbelakang", pasif, korban penyakit, miskin, dan stagnan. Kepasifan mereka sangat kontras bila dibandingkan dengan dinamisme dan vitalitas "wilayah maju" (Barat), dan khususnya AS. Hal ini membuat "wilayah maju" ini dapat menyelamatkan "wilayah terbelakang" dari "penderitaan" mereka, untuk mengantarkan mereka dari keterbelakangan menuju modernitas; menuju era "peningkatan ilmu pengetahuan", "produksi yang lebih banyak" dan "kebebasan individu dan kebahagiaan seluruh umat manusia".

Kemudian bermunculan dan berkembanglah berbagai teori pembangunan. Teori-teori pembangunan itu antara lain: teori evolusi, teori fungsionalisme struktural, teori modernisasi, teori sumber daya manusia, teori konflik, teori ketergantungan, teori pembebasan, teori kekuasaan-diskursus perubahan social. Berikut ini paragraf ringkas teori-teori yang sangat dipengaruhi cara pandang Barat (kapitalisme) terhadap pembangunan:

- Teori evolusi mempengaruhi hampir semua teori tentang perubahan sosial dan teori pembangunan setelahnya. Aplikasi teori ini berpengaruh kepada pemikiran modern tentang pembangunan, yaitu bahwa masyarakat bergerak dari masyarakat miskin non-industri, primitif; akan berevolusi menuju masyarakat industri yang lebih kompleks dan berbudaya. Menurut teori ini yang menjadi sumber persoalan adalah tradisi.
- Teori modernisasi muncul pada tahun 1950-an dan merupakan tanggapan kaum intelektual terhadap perang dunia. Modernisasi dianggap sebagai jalan optimis menuju perubahan. Teori ini digunakan oleh kalangan beragam disiplin: sosiologi, psikologi, ilmu politik, ekonomi, antropologi dan bahkan agama. McClelland (1961), berdasarkan tafsirannya atas Max Weber, memandang bahwa etika Protestan merupakan pendorong pertumbuhan di Barat. Komponen utama etika Protestan, yang

dinamis dan menumbuhkan perekonomian Barat dengan ajaib, adalah "kebutuhan untuk berprestasi" (*the need for achievement*). Maka tradisionalisme menjadi penghambat modernitas. Masing-masing individu harus diarahkan menjadi modern, karena peran individu lah yang akan membawa pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, gambaran masyarakat modern yang dicita-citakan adalah masyarakat kapitalisme Barat tahun 1950-an.

- Teori sumber daya manusia (*human capital theory*) dikembangkan oleh para ekonom. Para ekonom menekankan pentingnya kemampuan produktif sumber daya manusia (SDM) sebagai modal investasi bagi proses pembangunan. Bagi penganut teori ini, keterbelakangan masyarakat, dianggap bersumber pada faktor-faktor internal negara atau masyarakat itu sendiri.

Sebagai turunan dari berbagai teori pembangunan, maka bermunculan juga berbagai teori dan debat tentang kemiskinan. Kemiskinan menjadi debat yang tiada hentinya di berbagai perguruan tinggi di seluruh penjuru dunia. Berbagai definisi dan indikator kemiskinan dimunculkan; berbagai teknik deteksi kemiskinan diciptakan; berbagai program dan cara mengatasi kemiskinan dilontarkan; dan lain-lain. Berbagai "negara berkembang" – dengan jaminan penggelontoran pinjaman lembaga-lembaga keuangan pembangunan dunia -- diarahkan oleh negara-negara Barat mengenai bagaimana melaksanakan pembangunan di negaranya sehingga "kemiskinan" bisa dihilangkan, serta bisa tumbuh sejajar dengan negara-negara Barat.

Sejak pendapatan nasional (GNP) mulai dijadikan indikator pembangunan tahun 1950-an, para ahli ilmu sosial selalu merujuk pada pendekatan tersebut manakala berbicara masalah kemiskinan suatu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator 'garis kemiskinan'.

Pada 1990-an UNDP memperkenalkan pendekatan human development yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia[1] (*Human Development Index*) dan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*). Dibandingkan dengan pendekatan yang dipakai Bank Dunia, pendekatan UNDP relatif lebih komprehensif

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit dari gabungan empat indikator yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita.

karena mencakup bukan saja dimensi ekonomi, melainkan pula pendidikan (angka melek huruf), dan kesehatan (angka harapan hidup). Pendekatan kemiskinan versi UNDP berporos pada paradigma pembangunan populis (*popular development paradigm*) yang memadukan konsep pemenuhan kebutuhan dasar dari Paul Streeten dan teori kapabilitas yang dikembangkan peraih Nobel Ekonomi 1998, Amartya Sen.

Meskipun berbagai teori dan program pengentasan kemiskinan telah bermunculan, ternyata hampir-hampir mustahil menemukan teori dan teknik pengentasan kemiskinan yang universal. Kemiskinan adalah konstruksi sosial yang sangat rumit. Mendefinisikan konsep kemiskinan agar bisa dipergunakan secara luas – misalnya untuk keperluan membuat kebijakan – bukanlah hal yang mudah. Pada umumnya, dalam kenyataan di lapangan, sangatlah sulit menarik garis jelas yang memisahkan mereka yang miskin dan mereka yang tidak miskin.

Kemiskinan disebabkan dan sekaligus menyebabkan hal-hal yang multidimensi; dari hal-hal yang sifatnya ideologis sampai dengan hal-hal yang sifatnya sangat teknis spesifik. Karena itu, menilai dan memecahkan kompeksitas kemiskinan memerlukan pendekatan yang multidimensi. Berikut ini adalah beberapa fenomena kemiskinan dipandang dari berbagai sudut pendekatan, serta contoh-contoh indikator yang umum dipergunakan:

- **Pendekatan subyektif dan obyektif**

  Fenomena kemiskinan bisa dilihat dari sudut pandang obyektif dan sudut pandang subyektif. Pendekatan kemiskinan obyektif sangat umum dipergunakan oleh berbagai pihak, karena memiliki ukuran-ukuran yang jelas. Pendekatan obyektif merupakan pendekatan penilaian kemiskinan yang konvensional. Terlebih dahulu dihitung dan ditetapkan indikator-indikator kemiskinan; baru kemudian dilakukan survey untuk menentukan kondisi kemiskinan dalam masyarakat. Contoh indikator pendekatan obyektif ini adalah garis kemiskinan, kebutuhan dasar minimum, upah minimum, dan lain-lain. Pendekatan ini paling banyak digunakan, tetapi pendekatan ini mereduksi kenyataan-kenyataan kualitatif kemiskinan dalam masyarakat yang tidak bisa dengan mudah dihitung secara matematis.

  Sebaliknya, pendekatan kemiskinan subyektif adalah pendekatan penilaian kemiskinan di mana berbagai perumusan tentang nilai-nilai, indikator, dan teknik penilaian kemiskinan ditentukan oleh orang atau kelompok itu sendiri. Jadi kelompok itu sendiri yang menilai apa

yang dimaksud miskin, bagaimana menilainya, bagaimana prosesnya, dan lain-lain. Metode ini sangat partisipatif dan memiliki keragaman indikator yang besar. Tetapi kadang-kadang susah dimengerti; kelompok masyarakat yang tidak memiliki cukup kapasitas akan sulit diharapkan bisa menilai dirinya sendiri apakah kebutuhan dasarnya telah tercukupi atau belum.

- **Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif**

  Meskipun agak mirip dan satu sama lain saling melengkapi, pendekatan absolut-relatif sering juga dipergunakan dalam menilai kemiskinan. Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana suatu rumah tangga atau kelompok tidak mampu mencukupi kebutuhannya untuk bertahan hidup. Kemiskinan relatif adalah kondisi miskin yang, selain disebabkan kerentanan pencukupan kebutuhan dasar, juga ditambah dengan perubahan faktor-faktor nilai sosial dan kultural. Kemiskinan absolut-relatif memiliki pendekatan yang mirip – misalnya indikator pendapatan dan konsumsi -, tetapi standar perhitungan kedua pendekatan ini berbeda. Kemiskinan absolut memiliki ambang batas yang lebih rendah bila dibandingkan dengan kemiskinan relatif.

- **Kemiskinan temporal dan kemiskinan kronis**

  Kemiskinan kronis adalah keluarga atau suatu kelompok yang sulit "melepaskan diri" dari kondisi miskin, baik penghasilan rumahtangganya selalu di bawah garis kemiskinan maupun berbagai indikator lain; misalnya tidak bisa mmendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar. Sedangkan kemiskinan temporal adalah kondisi miskin yang penyebabnya adalah perubahan kondisi sosial-ekonomi yang biasanya sementara; misalnya perubahan kebijakan pemerintah yang untuk sementara merugikan suatu kelompok, atau contoh yang lain adalah kenaikan harga minyak tanah yang sangat tinggi sehingga kelompok tertentu kondisinya menjadi miskin. Catatan statistik suatu negara biasanya memiliki persentase tertentu yang tidak banyak berubah jumlah warga yang mengalami kemiskinan kronis.

- **Kemiskinan dan Pembangunan**

  Kemiskinan adalah bentuk ekstrim dari keterbelakangan pembangunan. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa berbagai indikator yang digunakan dalam menilai kemiskinan mirip dengan indikator-intikator pembangunan. Indikator sosial dalam penilaian pembangunan –

misalnya akses terhadap pelayanan sosial, tingkat kematian bayi-ibu melahirkan, status gizi balita, dll. – juga dipergunakan dalam menilai tingkat kemiskinan. Salah satu indikator penting dalam menilai pembangunan adalah *human development index* (HDI) atau indeks pembangunan manusia (IPM). IPM adalah kombinasi dari angka harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. IPM digunakan dalam menilai tingkat pembangunan juga dalam menilai tingkat kemiskinan. HDI diintroduksikan oleh UNDP pada tahun 1990-an.

- **Kemiskinan Struktural**

Akar kemiskinan struktural adalah hal-hal yang berhubungan dengan struktur masyarakat. Berikut ini adalah satu contoh kemiskinan struktural. Seorang anak yang lahir dari keluarga miskin yang menderita kekurangan gizi, akan tumbuh menjadi seorang dewasa yang juga miskin. Alasannya jelas: sangat tidak mungkin keluarga semacam itu untuk mampu memberikan gizi atau pendidikan yang memadai untuk menyelamatkan anak tersebut dari kemiskinan. Contoh yang lain adalah realitas sulitnya kelompok masyarakat yang berada di struktur bawah – pekerja pabrik, buruh kasar, petani, dll. – untuk lepas dari jurang kemiskinan. Karena dalam realitas kapitalisme modern akan selalu terjadi monopoli pasar, manipulasi oleh elit masyarakat, tekanan terhadap buruh, diskriminasi gender, dan manipulasi lingkungan politik; yang semuanya akan selalu merugikan kepentingan si miskin.

Sebagai bagian bangsa-bangsa di dunia yang mempercayai pembangunan sebagai jalan untuk menjadi negara-negara maju, maka Indonesia secara konsisten mengadopsi, mengembangkan dan menerapkan berbagai teori dan teknik pembangunan. Pemerintah Indonesia

telah puluhan tahun mengadopsi dan menyesuaikan berbagai indikator-indikator pembangunan dan monitoring kemiskinan.

Tidak ada departemen atau kementerian khusus di Indonesia yang memonitor perkembangan pembangunan dan kesejahteraan. Berbagai departemen dan kementerian, secara langsung maupun tidak langsung, memiliki bagian-bagian atau program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Biro Pusat Statistik (BPS) adalah lembaga negara yang memonitor perkembangan berbagai indikator perkembangan sosial-ekonomi di Indonesia; kemiskinan, kependudukan, kewilayahan, perkembangan sektor-sektor, dan lain-lain. Berikut ini adalah beberapa indikator kesejahteraan dan kemiskinan yang selalu dipantau oleh BPS:

1. Kemiskinan (jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks GINI[2]);
2. Kesehatan penduduk (penduduk dengan keluhan kesehatan selama bulan referensi, Penduduk yang berobat jalan, Balita yang persalinan terakhir oleh para medis, Balita yang bergizi buruk, angka kesakitan, rata-rata lama sakit, angka kematian bayi, angka harapan hidup);
3. Pendidikan (angka partisipasi sekolah, persentase buta huruf umur lebih dari 10 tahun, indeks pembangunan manusia, angka melek huruf)
4. Ketenagakerjaan (angka pengangguran terbuka, angka setengah menganggur, rata-rata pendapatan bersih pekerja, kebutuhan hidup minimum)
5. Konsumsi rumah tangga (pengeluaran makanan, pengeluaran bukan makanan, rata-rata asupan kalori, rata-rata asupan protein)
6. Produk domestik bruto (PDB): PDB harga berlaku, PDB harga konstan, Pertumbuhan setahun, PDB perkapita

Berbagai indikator pembangunan, kesejahteraan dan kemiskinan yang dipantau BPS tersebut di atas sangat kental dengan pendekatan obyektif. Pendekatan ini merupakan pendekatan konvensional. Pendekatan ini memiliki parameter yang jelas sehingga bisa dilakukan secara sistematis dan berkala. Akan tetapi cukup banyak yang mengkritik pendekatan konvensional ini. Pada umumnya pendekatan ini dianggap terlalu menggeneralisir dan sulit untuk mencerminkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Pendekatan ini dianggap terlalu positivistik dan terlalu condong pada mazhab modernisasi.

2 Angka Koefisien GINI (skala 0 sampai 1) adalah ukuran kemerataan pendapatan dihitung berdasarkan kelas pendapatan; "0" mencerminkan kemerataan sempurna dan "1" menggambarkan ketidakmerataan sempurna.

Sebagai contoh adalah penentuan garis kemiskinan berikut. Garis kemiskinan adalah besarnya nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan (2100 kalori) dan non makanan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk tetap berada pada kehidupan layak. Menurut perhitungan BPS, garis kemiskinan daerah perkotan/urban Provinsi NAD pada tahun 2007 adalah Rp 246,375.00 per kapita per bulan. Dengan demikian -- berdasarkan rataan hitungan bahwa satu keluarga masyarakat Indonesia berjumlah 3,9 orang – maka satu keluarga berpenghasilan sama atau lebih dari Rp 960,862.50 per bulan disebut keluarga tidak miskin. Tetapi satu keluarga berpenghasilan kurang dari Rp 960,862.50 per bulan, meskipun hanya kurang lima ribu rupiah saja, akan disebut sebagai keluarga miskin. Dalam kenyataannya di lapangan, penggolongan keluarga miskin dan bukan miskin dengan metode seperti ini akan sangat sulit. Angka-angka garis kemiskinan seperti ini hanya menggambarkan kondisi ekonomi secara makro di suatu wilayah, akan tetapi kurang tepat digunakan sebagai acuan program aplikatif di lapangan.

Mengingat sulitnya metode garis kemiskinan digunakan secara operasional di lapangan, maka Pemerintah RI harus menggunakan metode khusus ketika menyelenggarakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Rumah tangga penerima BLT bukan didasarkan garis kemiskinan, tetapi didasarkan karakteristik rumah tangga dengan 14 variabel kualitatif (luas lantai, jenis lantai, jenis dinding, fasilitas tempat buang air besar, sumber air minum, sumber penerangan, bahan bakar, membeli daging/ayam/susu, frekuensi makan, membeli pakaian baru, kemampuan berobat, lapangan usaha, pendidikan kepala keluarga, dan aset yang dimiliki). Telah kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan program BLT cukup besar carut marutnya di lapangan; menimbulkan pertengkaran antara masyarakat di berbagai tempat. Penentuan keluarga miskin sebagaimana dikembangkan pelaksana program BLT pun ternyata tidak mencerminkan keadaan masyarakat yang sebenarnya.

Contoh yang lain adalah dalam penentuan patokan standar berat badan penduduk. Untuk anak laki-laki Indonesia umur 10-12 tahun, standar patokan berat badan yang dianjurkan adalah 30 kg. Sedangkan standar berat badan WHO untuk anak golongan yang sama adalah 35 kg. AS memiliki standar yang lebih tinggi, yakni 45 kg. Dengan demikian, apakah standar WHO lebih menunjukkan kondisi yang lebih sejahtera? Apakah dengan demikian bisa disimpulkan bahwa standar berat badan penduduk

AS lebih baik bila dibandingkan dengan Indonesia? Tentu saja jawabannya tidak sederhana. Kebiasaan pola makan masing-masing bangsa yang telah berlangsung bergenerasi sangat mempengaruhi karakter dan postur suatu bangsa. Jadi tidak mudah menilai standar berat badan ini tentang mana yang lebih baik dan mana yang kurang baik.

Telah banyak kritikan terhadap kebiasaan pola makan bangsa "Barat" yang sangat besar kandungan protein hewaninya. Orang Eropa dan AS dianggap terlalu "rakus" protein hewani. Pada tahun 1972 saja konsumsi daging sapi per kapita per tahun penduduk AS adalah 116 pounce (setara 58 kg). Bandingkan dengan tingkat konsumsi per kapita per tahun daging sapi penduduk Indonesia tahun 2007 yang hanya 0.416 kg (BPS, 2008). Jadi satu keluarga orang AS (suami-istri dengan dua anak) mengkonsumsi 1 ekor sapi per tahun. Ini, jelas, kebiasaan konsumsi yang sangat rakus dan tidak perlu menjadi rujukan. Idiologi dan paradigma hidup yang dianut suatu bangsa sangat mempengaruhi pola konsumsinya.

Paham modernisasi dan pembangunan yang mendominasi praktik-praktik kehidupan dunia selama ini, baik langsung maupun tidak langsung, menempatkan pendapatan per kapita dan tingkat konsumsi sebagai indikator utama perkembangan suatu negara. Telah banyak ahli yang mengkritik kekeliruan menjadikan pendapatan per kapita dan tingkat konsumsi sebagai indikator utama perkembangan suatu negara atau suatu kelompok masyarakat. *Global warming* merupakan ancaman nyata yang harus dihadapi umat manusia saat ini. *Global warming* merupakan akibat kumulatif dari konsumsi manusia yang berlebihan terhadap sumberdaya yang ada di alam (energi, hutan, bahan tambang, tanah, *genetic resource*, makanan, limbah pencemaran, dll.). Kerakusan manusia telah terlalu banyak menimbulkan kerusakan di planet bumi. Karena itu menempatkan pendapatan per kapita dan tingkat konsumsi menjadi indikator utama untuk mengukur perkembangan masyarakat merupakan paham yang salah dan usang. Tingginya tingkat konsumsi bukan ukuran kemajuan suatu bangsa. Harus ada cara lain untuk mengukur tingkat perkembangan suatu bangsa atau suatu kelompok masyarakat.

Point yang paling penting dari berbagai laporan tentang kemiskinan dan penduduk miskin di Indonesia adalah bahwa laporan-laporan tentang kesejahteraan dan kemiskinan di Indonesia berbasis pada paradigma, standar-standar dan indikator-indikator yang tidak memasukkan aspek-aspek tertentu yang penting bagi masyarakat adat. Konsep *recovery* pasca tsunami di Aceh, sebagai contoh, bisa menimbulkan banyak situasi yang

mengancam jika tidak ada respon dari organisasi-organisasi masyarakat sipil. Ketentuan dalam program *recovery* itu yang tidak memperbolehkan penduduk untuk tinggal dalam radius dua kilometer dari pesisir pantai dinilai akan memperburuk kondisi penduduk miskin setelah tsunami. Point utama dalam mengkritisi rencana program recovery ini adalah bahwa pemerintah tidak meletakkan pentingnya hak-hak kultural dan akses masyarakat adat atas tanah ke dalam pertimbangannya. Berbagai paradigma pembangunan yang serba positivistik di atas cenderung sangat menggeneralisir kondisi yang sebenarnya dalam masyarakat; terlihat kurang memperhatikan keragaman paradigma tata cara hidup masyarakat Indonesia pada umumnya. Akan tetapi harus diakui, bahwa masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat adat yang telah sering dimarjinalkan – termasuk dalam mengambil keputusan soal nasibnya sendiri --, belum memiliki kriteria dan indikator-indikator tentang kemiskinan dan bagaimana mengatasinya. Sangatlah penting kelompok masyarakat marjinal, seperti masyarakat adat, memiliki kriteria dan indikator sendiri tentang kemiskinan dan bagaimana mengatasinya.

Angka dan Fakta-Fakta Kemiskinan

Ketika berbagai teori tentang pembangunan mulai diaplikasikan pada awal 1950-an maka satu-satunya indikator penting tingkat kesejahteraan suatu masyarakat dilihat dari pendapatan per kapita. Cara melihat tingkat kesejahteraan model ini terus berlangsung sampai tahun 1980-an. Sampai sekarang pun pemerintah kita – meskipun berbagai model dan indikator penilaian kesejahteraan telah digunakan – tetap menempatkan penghasilan per kapita ini sebagai salah satu indikator perkembangan kesejahteraan.

Tabel 1. Perbandingan Pendapatan Per Kapita Indonesia dan Beberapa Negara – 1957 - 2002

Negara	Pendapatan*) Perkapita 1957 (US$)	Pendapatan**) Perkapita 2002 (US$)	Peningkatan (%)	Peningkatan Per Tahun (%)
Indonesia	131	710	441,9	9,8
Korsel	144	9930	6.795,8	151,0
Malaysia	356	3540	894,4	19,8
Jepang	306	33550	10.864,1	241,4
Thailand	96	1980	1.962,5	43,6
India	73	480	557,5	12,4
Cina	73	940	1.187,6	26,4
Nepal	45	230	411,1	9,1
Kuwait	2.900	18.270	530,0	11,8

**) Sumber: Bruce M. Russet et. al. (1965)*
***) Sumber: World Development Indicators, World Bank, July 2003*

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada akhir 1950-an tingkat perekonomian Indonesia bila dibandingkan dengan beberapa negara Asia yang lain, termasuk Jepang dan Korea, adalah tidak jauh berbeda. Tetapi, pada tahun 2002, perkembangannya sungguh jauh berbeda. Pendapatan per kapita Jepang telah naik lebih dari 100 kali lipat; Korea hampir 68 kali lipat; Cina hampir 12 kali lipat. Sedangkan pendapatan per kapita Indonesia, meskipun program pembangunan telah gencar dilakukan, hanya naik 4 kali lipat; setara dengan kenaikan pendapatan Nepal.

Setelah digunakannya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1990-an maka penilaian tingkat kesejahteraan dan kemiskinan menjadi berkembang. Meskipun demikian, garis kemiskinan tetap menjadi faktor penting dalam menilai tingkat kemiskinan. Bahkan garis kemiskinan seringkali menjadi perdebatan yang bersifat politis.

Tabel di bawah ini menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia dalam beberapa tahun ini. Garis kemiskinan kita berubah dan terus naik. Garis kemiskinan desa pada tahun 1978 hanya Rp 2.981,00 per kapita per bulan yang meningkat berlipat-lipat menjadi Rp 161.831,00 per kapita per bulan (naik menjadi 50 kali lipat hanya dalam kurun waktu 30 tahun). Ini menunjukkan bahwa negara kita tidak pernah bisa mengatasi persoalan inflasi yang selalu tinggi. Modernisasi, paham yang dianut oleh penyelenggara negara, mensyaratkan perlunya modal besar untuk menjalankan berbagai program pembangunan (infrastruktur, industri strategis, fasilitas pendidikan, dll.). Modal itu didapatkan dari pemanfaatan

sumberdaya alam dan hutang luar negeri. Perputaran modal yang sangat besar inilah yang, mau tidak mau, menyebabkan terus berlangsungnya inflasi.

Tabel 2. Garis Kemiskinan Miskin, dan Jumlah Penduduk Miskin 1978 - 2008

Tahun	Batas Miskin (rupiah/ kapita/bulan)		Jumlah Penduduk Miskin (Juta)		Persentase Penduduk Miskin (Total)
	kota	desa	kota	desa	-
1978	4.969	2.981	8,3	38,9	-
1980	6.831	4.449	9,5	32,8	-
1981	9.777	5.8777	9,3	31,3	-
1984	13.731	7.746	9,3	25,7	-
1987	17.381	10.294	9,7	20,3	-
1990	20.614	13.295	9,4	17,8	-
1993	27.905	18.244	8,7	17,2	-
1996	42.032	31.366	9,4	24,6	17,47
1998	96.959	72.780	17,6	31,9	24,23
1999	89.845	74.272	15,7	32,7	23,43
2000	91.632	73.648	12,3	26,4	19,14
2001	100.011	80.382	8,6	29,3	18,41
2002	130.499	96.512	13,3	25.1	18,20
2003	138.803	105.888	12,2	25,1	17,42
2004	143.455	108.725	11,4	24,8	16,66
2005	150.799	117.259	12,4	22,7	15,97
2006	174.290	130.584	14,5	24,8	17,75
2007	187.942	146.837	13,6	23,6	16,58
2008	204.896	161.831	12,8	22,2	15,36

Sumber: Diolah dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan BPS 2008

Yang sangat menarik adalah mengamati perbandingan penduduk miskin antara desa dan kota. Terlihat jelas bahwa jumlah penduduk miskin di desa selalu lebih banyak bila dibandingkan dengan penduduk miskin di kota. Ini merupakan konsekuensi dari paradigma pembangunan yang menekankan modernisasi. Berbagai teori modernisasi selalu memproyeksikan suatu negara yang menganutnya akan menjadi negara industri di kemudian hari. Karena itu proyeksi pertumbuhan kota-kota industri selalu menjadi agenda utama, sedangkan sektor perdesaan hanya menjadi pelengkap proses industrialisasi; atau akan selalu dianaktirikan. Padahal, untuk kasus Indonesia, sebagian besar masyarakat adat hidup dan

tinggal di wilayah perdesaan. Sampai sekarang pun jumlah keluarga yang langsung maupun tidak langsung menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian (perdesaan) masih sekitar 50% dari jumlah penduduk. Apakah proses pembangunan di Indonesia harus menelantarkan wilayah perdesaan? Tidak adakah alternatif pembangunan yang lain?

Jumlah penduduk miskin berangsur-angsur menurun. Pada awal tahun 1970-an sepertiga lebih penduduk Indonesia digolongkan sebagai penduduk miskin. Pada tahun 1996 jumlah penduduk miskin telah berkurang menjadi 17,47%. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 yang kemudian diikuti oleh Reformasi 1998 ternyata berakibat cukup parah pada perekonomian nasional. Berdasarkan data di atas, pada tahun 1998 dan 1999 jumlah penduduk miskin meningkat tajam; berturut-turut 24,23% dan 23,43%[3]. Krisis ekonomi itu diawali oleh jatuhnya mata uang berbagai Negara Asia terhadap dolar AS. Krisis mata uang ini kemudian merambah berbagai sektor kehidupan masyarakat. Krisis ekonomi pada akhir 1990-an itu menunjukkan rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia. Larutnya Indonesia dalam globalisasi menyebabkan sulitnya Indonesia mandiri. Sepuluh tahun setelah krisis itu jumlah penduduk miskin masih hampir sama dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 1996. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa kondisi saat ini masih belum lepas dari krisis; kondisi ekonomi sebelum 1998 masih jauh lebih baik. Naik turunnya harga bahan bakar minyak (BBM) memberikan pengaruh cukup besar pada kondisi kesejahteraan masyarakat dan turut memperparah krisis. Antara tahun tahun 2005 – 2007 terjadi beberapa kali kenaikan harga BBM, sehingga pada tahun-tahun ini jumlah penduduk miskin meningkat.

Tingkat kemerataan pendapatan masyarakat, sebagai hasil proses pembangunan, berfluktuasi seperti ditunjukkan oleh tingkat indeks GINI (BPS, 2006 dan 2008) berikut ini: 0.355 (1996); 0.308 (1999); 0.329 (2002); 0.33 (2005); 0.36 (2006); 0.36 (2006). Rangkaian indeks GINI dalam beberapa tahun itu berkecenderungan meningkat, artinya tingkat kesenjangan pendapatan semakin tinggi. Ini tentunya merupakan efek samping memanasnya perekonomian dalam proses pembangunan yang tidak kita inginkan.

---

3 Tetapi menurut International Labour Organization (ILO), pada akhir 1999, jumlah orang miskin mencapai 129,6 juta jiwa atau sekitar 66,3% dari keseluruhan penduduk Indonesia. ILO tidak menggunakan garis kemiskinan sebagaimana yang dipergunakan oleh Pemerintah Indonesia, tetapi menggunakan ukuran internasional yang secara sederhana dikatakan bahwa orang disebut miskin jika pendapatannya di bawah dua dolar per hari.

Di bawah ini adalah tabel sebaran kemiskinan di Indonesia berdasarkan provinsi. Ada dua hal yang cukup menarik melihat tabel di bawah ini. Pertama, provinsi berbasiskan kepulauan (Maluku, NTT, NTB, Sultra) adalah kantong-kantong kemiskinan[4]. Kemiskinan yang dialami oleh provinsi kepulauan tersebut menunjukkan kesenjangan dan buruknya infrastruktur yang pada umumnya dialami oleh daerah kepulauan sehingga menghambat aksesibilitas penduduknya dalam lapangan ekonomi.

Kedua, tiga provinsi yang kaya sumberdaya alam, yakni: NAD, Papua Barat, dan Papua, ternyata termasuk provinsi dengan tingkat kemiskinan paling buruk. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ketiga provinsi ini pada tahun 2006 berturut-turut: NAD 69,4; Papua Barat 66,1; dan Papua 62,8. IPM ketiga provinsi ini di bawah rataan IPM nasional yakni 70,1. Ini berarti bahwa kapasitas penduduk ketiga provinsi ini di bawah rata-rata kapasitas masyarakat Indonesia. Fakta-fakta ini sebenarnya mengherankan, mengingat kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki oleh ketiga provinsi ini. Untuk meningkatkan kemampuan dan menghilangkan kemiskinan di ketiga provinsi ini jelas memerlukan penelusuran penyebabnya dengan lebih teliti yang, kelihatannya, tidak bisa hanya mengandalkan metode-metode pembangunan konvensional. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa ketiga provinsi ini memiliki jumlah komunitas masyarakat adat yang sangat besar.

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi

Provinsi	2005	2006	2007
Nangroe Aceh Darussalam	28.69	28.28	26.65
Sumatera Utara	14.68	15.01	13.90
Sumatera Barat	10.89	12.51	11.90
Riau	12.51	11.85	11.20
Jambi	11.88	11.37	10.27
Sumatera Selatan	21.01	20.99	19.15
Bengkulu	22.18	23.00	22.13
Lampung	21.42	22.77	22.19
Kepulauan Bangka Belitung	9.74	10.91	9.54
Kepulauan Riau	10.97	12.16	10.30
DKI Jakarta	3.61	4.57	4.61
Jawa Barat	13.06	14.49	13.55
Jawa Tengah	20.49	22.19	20.43
DI Yogyakarta	18.95	19.15	18.99

4 Maluku Utara dan Kepulauan Riau merupakan perkecualian karena memiliki tingkat kemiskinan di bawah rataan nasional; penyebabnya adalah kedua provinsi ini kaya hasil tambang. Catatan: argumen ini tidak sejalan dengan kondisi NAD, Papua dan Papua Barat yang [illegible] di paragraf berikutnya.

Jawa Timur	19.95	21.09	19.98
Banten	8.86	9.79	9.07
Bali	6.72	7.08	6.63
Nusa Tenggara Barat	25.92	27.17	24.99
Nusa Tenggara Timur	28.19	29.34	27.51
Kalimantan Barat	14.24	15.24	12.91
Kalimantan Tengah	10.73	11.00	9.38
Kalimantan Selatan	7.23	8.32	7.01
Kalimantan Timur	10.57	11.41	11.04
Sulawesi Utara	9.34	11.54	11.42
Sulawesi Tengah	21.80	23.63	22.42
Sulawesi Selatan	14.98	14.57	14.11
Sulawesi Tenggara	21.45	23.37	21.33
Gorontalo	29.05	29.13	27.35
Sulawesi Barat	-	20.74	19.03
Maluku	32.28	33.03	31.14
Maluku Utara	13.23	12.73	11.97
Papua Barat	-	41.34	39.31
Papua	40.83	41.52	40.78
Indonesia	16.69	17.75	16.58

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan 2006, Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2007, BPS.

Selain berbagai hal yang bersifat ekonomi, pemerintah mengamati berbagai variabel yang menjadi penunjang gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat kita. Berikut ini adalah beberapa fakta-fakta non ekonomi masyarakat kita pada tahun 2006 (BPS, 2008) yang menjadi pendukung gambaran rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia:

- Angka kematian ibu melahirkan mencapai 307 untuk 100.000 kelahiran hidup; tiga kali lebih besar dari Vietnam dan enam kali lebih besar dari Cina dan Malaysia.
- Angka melanjutkan dari sekolah dasar ke sekolah menengah masih rendah, khususnya di antara penduduk miskin; kelompok umur 16-18 tahun pada kelompok 20 persen penduduk termiskin, hanya 55 persen yang lulus SMP, sedangkan angka untuk kelompok 20 persen penduduk terkaya adalah 89.
- Rendahnya akses terhadap air bersih, khususnya di antara penduduk miskin, menyebabkan penduduk miskin tidak mampu mencapai kualitas hidup yang layak; kelompok 20 persen penduduk termiskin, hanya 48 persen yang memiliki akses air bersih di daerah perdesaan, sedangkan untuk perkotaan, 78 persen.

- Terdapat 80 persen penduduk miskin di perdesaan dan 59 persen penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap tangki septik; sementara itu hanya kurang dari 1 persen dari seluruh penduduk Indonesia yang terlayani oleh saluran pembuangan air kotor berpipa.
- Pada tahun 2004 terdapat sekitar 24,8 persen anak di bawah usia lima tahun menderita gizi buruk; pada tahun 2005 diperkirakan masih terdapat 25 persen penderita gizi buruk, meskipun antara tahun 2004 dan 2005 telah terjadi penurunan angka kemiskinan.

Fakta-fakta kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat Indonesia di atas sangatlah memprihatinkan. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan telah dilakukan puluhan tahun. Telah sangat besar uang negara – dan berbagai pinjaman luar negeri --, atas nama pembangunan dan penanggulangan kemiskinan, digelontorkan melalui berbagai program pemerintah. Tetapi sejak Orde Baru memulai berbagai program pembangunan hingga pemerintah sekarang jumlah orang miskin belum berkurang separohnya bila dibandingkan akhir tahun 1960-an. Adakah yang salah dengan metode "pembangunan" kita ?

Mencari Kriteria dan Indikator Kemiskinan Ala Masyarakat Adat

Menyimak uraian-uraian sebelumnya pada bab ini maka haruslah diakui bahwa paradigma modernisme dalam konsep pembangunan sangat mempengaruhi para penyelenggara negara kita. Konsekuensi dari paradigma ini adalah pengutamaan pertumbuhan sektor ekonomi sebagai panglima tujuan pembangunan. Meskipun berbagai faktor sosial kesejahteraan manusia telah dijadikan indikator pembangunan, tetapi sektor ekonomi tetap merupakan indikator utama dalam pembangunan.

Pemerintah Orde Baru telah memulai melaksanakan pembangunan dengan paradigma modernisme sejak akhir tahun 1970-an. Meskipun telah ada perubahan mendasar pada mekanisme demokrasi, tetapi pemerintahan sekarang pun sebenarnya masih tetap mengedepankan paradigma modernisme dalam melaksanakan pembangunan. Meskipun telah berlangsung sekitar 40 tahun, tetapi proses pembangunan ternyata masih menyisakan jumlah penduduk miskin yang cukup besar. Tingkat kemerataan pendapatan juga makin memprihatinkan.

Masyarakat adat adalah bagian yang cukup besar dari bangsa

Indonesia. Sebagian besar masyarakat adat ini berada di perdesaan dan sekitar hutan luar Jawa. Jumlah orang miskin di perdesaan selalu lebih tinggi bila dibandingkan dengan jumlah orang miskin di perkotaan. Berbagai program pembangunan selalu mengesampingkan isu-isu perdesaan. Belum lagi marginalisasi proses pembangunan yang sering merugikan hak-hak masyarakat adat. Jadi sangatlah logis apabila berbagai wilayah hidup komunitas adat di nusantara merupakan kantong-kantong kemiskinan. Harus ada upaya khusus untuk mengurus isu kemiskinan yang dialami oleh masyarakat adat.

Dengan kondisi tersebut dan fakta-fakta memprihatinkan di atas, khususnya yang dialami oleh masyarakat adat, maka organisasi masyarakat adat di Indonesia sudah saatnya mengembangkan kriteria dan indikator-indikator tentang kemiskinan yang dapat digunakan untuk melaksanakan program-program pemberantasan kemiskinan dalam kerjasama dengan organisasi/institusi yang lain. AMAN, sesuai dengan mandat Kongres Kedua Masyarakat Adat Nusantara (KMAN II) yang telah diselenggarakan di Lombok, September 2003, telah melakukan penelitian singkat dalam rangka mencari konsep tentang kesejahteraan dan kemiskinan dengan perspektif masyarakat adat.

Tujuan utama penelitian singkat ini adalah mengembangkan dan memajukan kriteria dan indikator-indikator tentang kesejahteraan dan kemiskinan dari perspektif masyarakat adat sebagai satu bagian dari upaya untuk memajukan pendangan-pandangan mereka tentang pembangunan berkelanjutan kepada berbagai pengambil kebijakan, khususnya kepada pemerintah dan lembaga-lembaga pembangunan pada level nasional dan internasional. Selain itu penelitian ini diharapkan akan mengembangkan kapasitas masyarakat adat untuk memeriksa kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan-tuntutan mereka dalam kriteria dan indikator-indikator yang komunikatif dan dapat dimengerti. Penelitian ini juga diharapkan akan memperkuat jaringan organisasi masyarakat adat nasional dan internasional dalam isu-isu mengenai hak-hak dasar masyarakat adat dan kemiskinan.

Penelitian singkat ini dilakukan antara bulan Agustus dan Oktober 2007 di empat komunitas adat anggota AMAN:

1. Gampong Alue Capli, Mukim Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, Nangroe Aceh Darussalam (NAD);
2. Persekutuan adat Tana Ai di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka-Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT);
3. Komunitas Sedulur Sikep di bagian timur Provinsi Jawa Tengah;

4. Masyarakat Adat di Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Bara (NTB)

Bagian berikutnya buku ini berturut-turut menguraikan hasil penelitian singkat di empat komunitas adat tersebut: Gampong Alue Capli (Aceh); Sedulur Sikep (Jateng); Komunitas Desa Bentek; dan Persekutuan Adat Tanah Ai (Flores-NTT).

Pada bagian akhir buku ini akan diuraikan ringkasan hasil keempat penelitian singkat itu, serta berbagai kriteria/indikator kesejahteraan dan kemiskinan yang ditemukan di empat komunitas adat tersebut.

Rujukan

Abrahamsen, Rita. 2004. *Sudut Gelap Kemajuan: Relasi Kuasa dalam Wacana Pembangunan.* Lafadl Pustaka. Yogyakarta

Achmaliadi, Restu. 2006. *Masih Adakah Masyarakat Adat di Jawa. Semiloka "Sejarah Tanah Simpen* (13 September 2006). YBL Masta dan SGP PTF. Purworejo

Anonymus. 2003. *Satu yang Kami Tuntut: Pengakuan.* AMAN, WAC (ICRAF), FPP. Jakarta

Anonymus. 2006. *Beberapa Indikator Penting Sosial-Ekonomi Indonesia*. Badan Pusat Statistik. Jakarta

Anonymus. 2006. *Berita Resmi Statistik No. 47/IX/1 September 2006: Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2005-2006.* Badan Pusat Statistik. Jakarta

Anonymus. 2006. *The Millenium Development Goals Report.* United Nations. New York

Anonymus. 2008. *Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia.* Badan Pusat Statistik. Jakarta

Brown, Lester R. 1986. *Kembali di Simpang Jalan : Masalah Kependudukan.* Yayasan Obor. Jakarta.

FWI/GFW. 2001. *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C.: Global Forest Watch

Kartodirdjo, Sartono dan Djoko Suryo. 1991. *Sejarah Perkebunan di Indonesia.* Aditya Media. Yogyakarta

Fakih, Mansour. 2001. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial.* Pustaka Pelajar. Yogyakarta

Colchester, Marcus, Norman Jiwan, Andiko, Martua Sirait, Asep Yunan Firdaus, A. Surambo, Herbert Pane. 2006. *Tanah yang Dijanjikan*. FPP, Sawit Watch, HUMA, WAC. Bogor

Pakpahan, Agus, Hariadi Kartodihardjo, Rudi Wibowo, Hidajat Nataatmadja, Sjamso'oed Sadjad, Enang Haris, Hanny Wijaya. 2005. *Membangun Pertanian Indonesia: Bekerja Bermartabat dan Sejahtera*. Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor. Bogor

Streeten, Paul. 1994. *"Poverty Concepts and Measurement" dalam Poverty Monitoring: An International Concern*. UNICEF. New York

Almatsier, Sunita. 2001. *Prinsip Dasar Ilmu Gizi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

2

KONFLIK DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT:

Studi Lapangan Gampong Alue Capli, Mukim Seunuddon, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara

Oleh: Angky Samperante

Latar Belakang

Alue Capli, secara sederhana, dalam bahasa Aceh bermakna "sungai cabe"; cabe yang dimaksud adalah jenis cabe rawit yang pedas. Menurut cerita setempat, pemberian nama *Gampong* Alue Capli adalah karena sewaktu masyarakat mendatangi daerah ini pertama kali dan membuka hutan untuk perkampungan, ditemukan pohon cabe rawit yang batangnya sebesar pohon pinang di pinggiran sungai setempat. Nama tempat itulah yang kemudian menjadi nama *Gampong*.

Alue Capli mempunyai status administratif sebagai desa atau *Gampong* relatif masih baru. Sebelumnya, *Gampong* tersebut masih menjadi bagian kedusunan dari *Gampong* Matang Jeulikat, wilayah administrasi Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara. Wilayah pemerintahan *Gampong* Alue Capli berbatasan dengan *Gampong* sekitarnya, yakni: *Gampong* Ulee Reubek Barat; sebelah selatan dengan Gampong Matang Jeulikat; sebelah timur dengan *Gampong* Simpang Peut; sebelah barat dengan *Gampong* Cot Patisah.

Letak gampong ini tidak begitu jauh dari pesisir pantai timur Provinsi NAD; jarak dari bibir pantai hingga ke pusat perkampungan penduduk sekitar tiga kilometer. Jarak Alue Capli dari ibukota Kabupaten Aceh Utara, yakni Kota Lhoksukon, sekitar 36 km, dan dari ibukota kecamatan yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi sekitar 7 km. Alue Capli mudah

dicapai dengan kendaraan motor dan mobil, meskipun sebagian besar jalan desa masih berupa jalan tanah. Setiap hari ada mobil angkutan umum dan motor ojek yang mengangkut penumpang dan barang-barang dagangan ataupun hasil bumi petani.

Wilayah Gampong Alue Capli tidak luas, yakni: sekitar 383 hektar; jumlah penduduknya 606 jiwa atau 125 kepala keluarga (KK). Tingkat kepadatan penduduk di Alue Capli mirip dengan kepadatan penduduk di 74 gampong yang berada di Kecamatan Seunuddon, yaitu …..

Kondisi topografi Alue Capli umumnya berupa tanah dataran, yang merupakan areal pertanian padi sawah, kebun dan tambak; dengan luas masing-masing: persawahan padi seluas 140 ha, tambak udang dan ikan bandeng seluas 140 ha, areal perkebunan seluas 60 ha dan sisanya lebih dari 20 ha merupakan areal perumahan dan pekarangan, kandang dan penggembalaan ternak, fasilitas umum dan sosial ekonomi. Semua lahan di Alue Capli telah diusahakan secara produktif. Kondisi iklim umumnya adalah daerah dengan iklim tropis dengan musim kemarau yang panjang mulai dari bulan Februari sampai Agustus dan musim penghujan di bulan September sampai Januari. Suhu udara pada musim hujan dan di malam hari sekitar 28ºC dan suhu pada musim panas berkisar 32ºC. Terdapat beberapa sungai kecil yang hulunya dari daerah pegunungan. Airnya digunakan untuk mengairi persawahan dan areal tambak masyarakat setempat dan sekitarnya.

Sarana dan prasarana di Alue Capli, antara lain: meunasah sebanyak 1 unit, balai pengajian sebanyak 2 unit, lapangan olah raga sebanyak 1 unit, terdapat pula kedai-kedai yang menjual barang campuran sebanyak 6 unit, kedai kopi dan makanan sebanyak 2 unit, kedai ponsel sebanyak 1 unit, 2 kilang penggilingan padi, Madrasah Ibtidaiyah (setingkat sekolah dasar) sebanyak 1 unit, rumah sekolah untuk pengajar sebanyak 1 unit (akan tetapi belum ada guru yang menetap). Meskipun hanya terdapat satu unit Madrasah Ibtidaiyah, tetapi rata-rata sekitar 70% dari penduduk Alue Capli pernah sekolah hingga pendidikan dasar, sebanyak 20% pendidikan SMP dan SMU, sisanya 5% pendidikan perguruan tinggi, dan 5% non pendidikan.

Kondisi bangunan rumah bervariasi; mulai dari konstruksi rumah panggung yang berdinding kayu dengan arsitektur tradisional, semi permanen dan rumah dinding tembok berlantai keramik, serta sudah memiliki listrik dari PLN. Kebanyakan keluarga mampu mempunyai alat-alat elektronik, seperti: televisi, radio, tape, VCD, kipas angin, dan

sebagainya, serta kendaraan sepeda, motor dan mobil. Pemilikan harta benda ini berhubungan erat dengan meningkatnya pendapatan penduduk dari hasil tambak udang dan hasil bumi lainnya.

Penduduk dan Sejarah Singkat Alue Capli

Berdasarkan cerita turun temurun di Alue Capli, asal usul penduduk yang menjadi pembuka pertama di kawasan ini adalah kelompok masyarakat yang dipimpin Petua Raban. Mereka berasal dari daerah Mulieng di sebelah utara *Gampong* Alue Capli, yang bermigrasi ke daerah ini pada era pemerintahan kolonial Belanda, yang secara de facto menguasai daerah Aceh pada awal abad XX. Diperkirakan situasi ketidaktenteraman hidup di bawah tekanan pemerintah kolonial Belanda menyebabkan penduduk pergi ke tempat yang sulit dijangkau dan lebih aman dari penjajahan Belanda.

Ketika itu, daerah ini masih berupa kawasan hutan yang kemudian dibuka untuk kegiatan pertanian. Masyarakat dan pemerintahannya masih berada dalam pengaruh dan otoritas pemerintahan *Gampong* Matang Jeulikat dan penguasaan **Ulee Balang** bernama Hasan Ibrahim. Dalam perkembangannya terjadi pemekaran gampong dari desa asal *Gampong* Matang Jeulikat menjadi *Gampong* Alue Capli.

Saat sekarang, terdapat pula penduduk yang baru dan dengan asal usul daerah yang lebih beragam. Sekitar tahun 1970 an, daerah Alue Capli semakin terbuka dan mudah diakses sehingga banyak penduduk sekitar yang datang ke daerah ini untuk pengembangan usaha dan sebagainya. Jumlah penduduk Alue Capli hingga tahun 2007 sebanyak 608 jiwa atau 125 Kepala Keluarga, yang berdasarkan jenis kelamin, diketahui masing-masing jumlah laki-laki 296 jiwa dan perempuan 312 jiwa.

Masyarakat di Alue Capli mengidentifikasi diri sebagai komunitas etnik Aceh, didasarkan oleh kesamaan bahasa Aceh dengan dialek setempat dalam berkomunikasi sehari-hari dan menggunakan budaya hukum Islam, utamanya dalam mengatur hubungan-hubungan di masyarakat dan sebagai agama kepercayaan setempat. Mereka memiliki pula kekhasan adat istiadat, seni tradisi, kekhasan makanan, dan sebagainya. Hal-hal inilah yang membuat mereka merasa secara kolektif sebagai Orang Aceh.

Setelah adanya Undang Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, keberadaan pemerintahan *gampong* dan kelembagaan sosial setempat terapresiasi

dan tumbuh kembali dengan menggunakan nama-nama lokal, hukum Islam, adat dan budaya Aceh. Umumnya kelembagaan sosial di Aceh merupakan lembaga yang sudah lama ada, beragam dan memiliki nama lokal. Untuk itu, pelaksanaannya telah diatur dengan *Qanun* (Peraturan Daerah) Provinsi No. 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan kehidupan adat. Qanun mengakomodir adanya 10 lembaga adat masyarakat Aceh, antaranya: *Imuem Mukim, Geuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan, Imuem Meunasah, Kejruen Blang, Panglima Laot, Peutua Seuneubok, Haria Peukan* dan *Syahbanda*.

Di *Gampong* Alue Capli lembaga adat masyarakat Aceh yang ada adalah *Keuchik Gampong, Tuha Peut, Imuem Meunasah* dan *Kejruen Blang*, serta berada dalam Kemukiman Seunuddon. ***Keuchik*** adalah pemimpin gampong yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa atau gampong dan pembangunan di wilayah desa. Sedangkan ***Imeum Mukim*** adalah pemimpin mukim, yang merupakan unit pemerintahan yang membawahi beberapa gampong dan wilayah sosial tertentu. *Imeum mukim* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan dan penyelesaian konflik, serta dalam urusan pembangunan di wilayah Kemukiman. ***Tuha Peut*** terdiri atas tokoh masyarakat yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam urusan sosial dan penyelesaian konflik yang berfungsi membantu *keuchik*. ***Imeum Meunasah*** merupakan tokoh agama yang bertanggung jawab untuk pengembangan dan pembinaan ajaran dan hukum Islam di komunitas, sedangkan ***Kejruen Blang*** berfungsi untuk urusan pertanian, menggerakkan tali air (*lueng*) di persawahan, mengatur pembagian air, memilih bibit yang baik, menentukan waktu turun ke sawah, dan memimpin *kenduri blang*. Di samping itu, *kejruen blang* bersama pemangku adat lainnya berwenang mengadili dan memberi sanksi pada pelanggar hukum adat bidang pertanian, baik pada prosesi pelaksanaan, maupun yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan adat pertanian.

Keuchik mempunyai otoritas yang besar di gampong dan dalam penyelenggaraan pemerintahannya dibantu oleh lembaga-lembaga yang sudah disebutkan di atas; misalnya dalam penyusunan rancangan pembangunan dan anggaran belanja ataupun dalam urusan perkara dan pengambilan keputusan. *Tuha peut* merupakan lembaga yang berpengaruh selain *keuchik*. Perkara-perkara di masyarakat, musyawarah dan pengambilan keputusan terkait dengan anggota masyarakat selalu melibatkan *tuha peut*. Mekanisme musyawarah masih efektif dilakukan

dalam mengambil keputusan; musyawarah dilakukan di meunasah. Keputusan-keputusan dan kebiasaan sehari-hari didasarkan atas hukum Islam, norma-norma kebiasaan adat dan hukum negara, yang menjadi pedoman, norma dan etika, aturan dan alat kontrol dalam hubungan-hubungan sosial.

Selain itu, terdapat kelembagaan sosial lainnya yang masih baru, seperti: para pedagang pemilik kedai, para toke pemilik kilang gilingan padi, pedagang perantara, Koperasi Baruna Jaya, lembaga pemerintah dan non pemerintah yang mengadakan program pemberdayaan masyarakat. Keberadaan organisasi ini sangat berpengaruh dalam perkembangan sistem sosial di masyarakat baik secara langsung karena pengaruh program pembangunan pemerintah dan sistem sosial dan budaya dominan yang berasal dari luar komunitas. Misalnya budaya gotong royong pergiliran mengerjakan sawah, sekarang bergeser menjadi penggunaan buruh upahan dan tenaga mesin untuk menggarap sawah, yang dianggap lebih efisien dan efektif.

Kehidupan Sosial Ekonomi dan Permasalahannya

Bertani sawah padi dengan irigasi sederhana merupakan mata pencaharian utama dan sudah lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Alue Capli oleh masyarakat sekitar dikenal sebagai salah satu desa penghasil padi di wilayah Kecamatan Seunuddon. Penduduk yang sudah lama berdiam di Alue Capli bersaksi bahwa dahulu sebagian besar wilayah gampong merupakan areal persawahan yang dikelola oleh penduduk setempat.

Masyarakat menanam padi jenis bibit unggul yang dikembangkan oleh dinas pertanian setempat, seperti: SP, Cibanten, dan lain-lain, yang pengolahannya menggunakan mesin *hand tractor* untuk membajak sawah, menggunakan pupuk dan obat-obatan pencegah hama, serta mempekerjakan buruh tani yang disebut pula 'orang kerja'. Lahan sawah dapat berproduksi 2 sampai 3 kali dalam setahun, tergantung dari ketersediaan air, yang kini sudah semakin merosot kualitas dan jumlahnya, apalagi pada musim panas.

Menurut *kejruen blang* setempat, hasil usaha sawah sudah semakin merosot baik karena menurunnya waktu panen menjadi 2 kali dalam setahun dan berkurangnya produksi padi karena merosotnya persediaan air

dan kekeringan. Belum ada data tentang hasil panen padi di Alue Capli. Hasil padi yang sudah digiling menjadi beras dijual ke pengumpul dan pasar lokal di kecamatan.

Mata pencaharian yang juga pernah menjadi primadona lokal adalah usaha tambak udang. Awalnya, usaha tambak masih sederhana dan skala kecil. Penduduk memanfaatkan pinggiran sungai untuk membuat tambak ikan dan udang jenis lokal dengan bertumpu pada pasang surut air laut dan darat; hasil ikan dan udang dijual ke pasar lokal. Pada perkembangannya di tahun 1980 an, lahan-lahan tambak sederhana diperluas dengan memanfaatkan dan mengkonversi sebagian besar lahan sawah dan kebun menjadi lahan tambak dan membuat kanal tempat aliran air, yang bersumber dari air sungai dan air laut pasang, jenis udang yang dikelola jenis udang windu dan dengan menggunakan pakan buatan dan obat-obatan dari bahan kimia.

Sekitar tahun 1985, aktivitas konversi lahan untuk menjadi lahan tambak udang semakin meningkat. Hal ini dipicu oleh meningkatnya harga udang jenis windu yang harganya pada tahun 1998 mencapai Rp. 125.000 per kilogram. Namun sejak tahun 2001 hingga sekarang, usaha tambak udang ini relatif semakin menurun baik dalam usaha penggarapan tambak dan jumlah produksi udang, serta harga jual jenis udang windu di pasar lokal merosot dan hingga sekarang sebesar Rp. 30.000 perkilogram.

Penurunan ini adalah karena adanya fluktuasi harga yang cenderung menurun sehingga pendapatan tidak sebanding dengan biaya produksi yang besar. Selain itu, serangan virus, udang stress, nafsu makan udang berkurang telah menyebabkan kematian udang begitu cepat dan dalam jumlah yang besar. Eskalasi konflik bersenjata dan kekerasan memperkeruh kehidupan sosial ekonomi dan ketidak pastian dalam berusaha. Terakhir, peristiwa tsunami telah menghancurkan tambak dan isinya.

Mata pencaharian masyarakat yang juga menonjol adalah perkebunan rakyat di tanah pekarangan dan lahan kering. Berbagai tanaman di kebun rakyat adalah sebagai berikut: kelapa, pinang, coklat, sawo, nangka, sukun, rumbia, pisang, jambu, durian, sirsak, daun pandan, jeruk, labu, belimbing, kapuk, sirih, serai, kedondong, tebu, cabe, semangka, kacang panjang, timun, ubi rambat dan ubi kayu, dan sebagainya. Hasil tanaman ini diperdagangkan ke pasar lokal. Pinang dan kelapa termasuk jenis tanaman yang paling banyak ditanami masyarakat dan hasilnya dijual hingga ke kabupaten. Selain itu, terdapat pula petani peternak hewan sapi, kambing, domba, ayam dan jenis unggas lainnya.

Berikut ini adalah masalah-masalah produksi ekonomi di Alue Capli, yakni: (a) ketimpangan dalam pemilikan tanah, buruknya sistem sewa dan sistem gadai; (b) harga hasil tani yang rendah dan nilai tukar hasil tani yang rendah dibanding dengan harga produksi kebutuhan pokok lainnya; (c) harga kebutuhan pokok dan penunjang kehidupan dan ekonomi masyarakat sangat tinggi; (d) sistem sosial ekonomi yang tidak adil dan tidak seimbang, yang menciptakan sistem ketergantungan masyarakat pada pemilik modal dan lembaga-lembaga produksi lainnya, yang membuat produktivitas dan kemandirian masyarakat relatif menurun; (e) tidak adanya perhatian dan realisasi usaha pemerintah untuk melakukan rehabilitasi infrastruktur ekonomi masyarakat dan pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat, menyusul bencana gempa dan tsunami yang menghancurkan dan merusak areal tambak dan pertanian rakyat.

Belum ada data yang akurat tentang pemilikan tanah di *Gampong* Alue Capli. Sistem pemilikan tanah kebanyakan diperoleh dari hak waris dari leluhur terdahulu dan hak milik berdasarkan jual beli serta sistem sewa. Berdasarkan wawancara dengan beberapa penduduk setempat diketahui bahwa tidak ada lagi tanah kolektif. Keseluruhan bagian tanah-tanah di Alue Capli sudah dimiliki secara perorangan dan terdapat banyak warga yang tidak memiliki lahan usaha pertanian dan menjadi buruh tani dan buruh penggarap lahan. Diketahui pula, terdapat beberapa warga yang diidentifikasi sebagai orang kaya dan bermodal yang memiliki tanah luas hingga mencapai 50 hektar yang diolah untuk sawah dan lahan tambak. Selain pemilik modal, mereka merupakan tokoh masyarakat setempat yang mempunyai jabatan di kelembagaan sosial setempat.

Menurut warga setempat, tidak adanya alat produksi tanah dan modal menyebabkan mereka hidup miskin. Harga tanah jika dibeli dalam jumlah yang luas sekitar Rp. 3.000 per meter sedangkan lahan tambak Rp. 2.000 per meter, memang tidak begitu mahal dalam ukuran setempat akan tetapi masyarakat tidak mempunyai pendapatan dan simpanan untuk membeli dan tidak memiliki modal untuk mengolah usaha tersebut. Upah kerja harian sangat rendah berkisar sebesar Rp. 15.000 sampai Rp. 20.000 per hari, nilainya tidak mencukupi keperluan masyarakat dalam sebulan. Sedangkan pemilik lahan sawah dan tambak yang luas, selain menerima hasil dari produksi sawah dan tambak, memiliki pula beragam jenis usaha, seperti: pengusaha kedai barang campuran, pemilik kilang gilingan padi dan usaha lainnya.

Keluarga yang hanya memiliki lahan usaha sawah dan tambak yang luasnya terbatas dan sudah tidak memiliki tabungan dan modal, secara terpaksa menyewakan lahannya kepada pengusaha tambak dan pemilik modal. Namun posisi tawar si penjual keluarga miskin sangat lemah di bawah kendali si pemodal yang mengatursistem sewa dan gadai. Nilai sewa dan sistem gadai tidak sebanding jika petani mengusahakan sendiri. Dengan demikian, produktivitas petani semakin menurun.

Konflik Bersenjata dan Pengorbanan Masyarakat

Pada masa Kerajaan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda, Negeri Aceh sangat tersohor dan mempunyai hubungan bisnis dan persahabatan yang rukun dengan pemerintahan sekitar bahkan hingga negeri-negeri jauh. Terbilang Kerajaan Aceh pernah mejalin kerjasama bisnis dan persahabatan dengan Inggris, Perancis, Amerika, Belanda dan Sultan Kekaisaran Ottoman di Konstantinopel.

Sekitar abad ke 16 hingga awal abad ke 20, Aceh mulai terlibat dalam peperangan dan pertentangan untuk mempertahankan kekuasaan dan kekayaan alam dari gangguan pihak luar yang ingin menguasai wilayah Kerajaan Aceh dan kekayaan alam di sana. Portugal, Inggris dan Belanda adalah negara-negara yang secara terbuka melakukan tekanan dan agresi militer untuk menaklukkan Aceh. Hingga awal abad ke 20, perlawanan masyarakat tidak surut dan meluas di seluruh wilayah Aceh, secara sporadis terjadi peperangan di daerah-daerah, utamanya berhadapan dengan pemerintah kolonialis Belanda dan melawan Jepang pada tahun 1942.

Pemerintah kolonial Belanda sempat menaklukkan beberapa daerah di Aceh dan beberapa pemimpin aristokrat setempat (para *Ulee Balang*) berada dalam pengaruh kekuasaan kolonial Belanda. Tetapi perlawanan rakyat Aceh lainnya tidak surut dan bahkan mengadakan kerjasama dengan

wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis Indonesia dan gerakan politik, seperti: Sarekat Islam, organisasi sosial Muhammadiyah, Partai Indonesia Raya (Parindra) dan bahkan mendirikan PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), sebuah organisasi berbasis di Aceh yang anti-Belanda.

Setelah kemerdekaan, terjadi pergolakan dan pertentangan kepentingan di antara para pemimpin Aceh, yakni: antara para *Ulee Balang* yang bekerja sama dengan kolonialisme Belanda dengan para ulama Aceh; momentum ini dikenal dengan Perang Cumbok (1946). Semenjak tahun 1950, Aceh efektif bergabung dengan Republik Indonesia (RI) dan hal ini tidak berlangsung lama.

Pada 21 September 1953, Kongres Ulama di Titeue memutuskan Aceh menjadi bagian dari Negara Islam Indonesia (NII), menyusul kritik para pemimpin Aceh terhadap kebijakan pemerintah pusat RI yang tidak memperhatikan kehidupan ekonomi rakyat di daerah dan mengabaikan aspirasi rakyat Aceh untuk menjadi provinsi yang otonom. Pemerintah Jakarta justru melebur Aceh menjadi satu ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Tengku Muhammad Daud Beureueh, yang menjadi Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah Karo, kemudian menjadi pemimpin NII dan menyatakan perang terhadap RI sehingga terjadi konflik bersenjata yang melibatkan NII dan tentara RI. Pada September 1955, Aceh dideklarasikan sebagai wilayah yang terpisah dari RI dengan nama Negara Bahagian Aceh di bawah NII. Setelah gencatan senjata, tahun 1961 nama NII diubah menjadi Republik Islam Aceh (RIA).

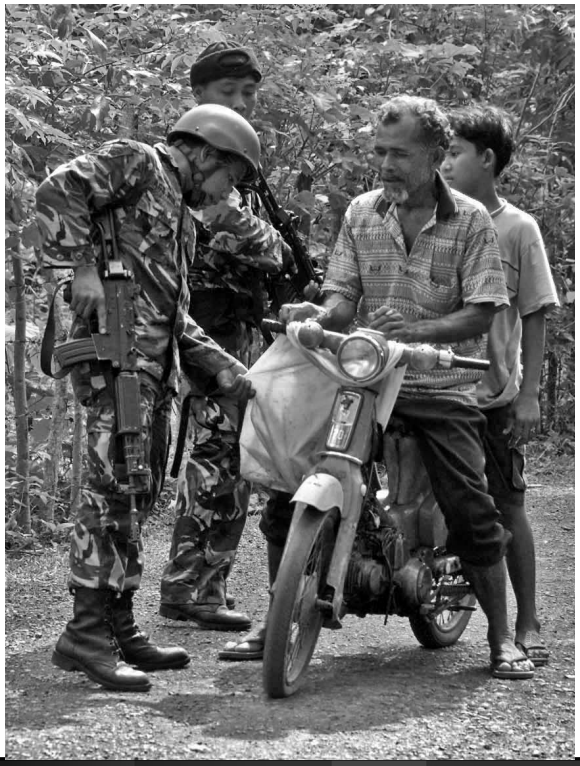

Akhirnya pada 9 Mei 1962, Kolonel M. Jasin yang selalu terlibat bernegosiasi dengan Tengku Daud Beureueh berhasil mengajak pemimpin perlawanan dan ribuan pasukan pengikutnya mau turun gunung menjadi warga

republik biasa. Pertentangan yang telah merenggut ribuan nyawa tersebut berakhir tanpa kekerasan.

Perlawanan rakyat Aceh dengan mengatasnamakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) kembali terjadi pada 4 Desember 1976, di bawah pimpinan Muhammad Hasan Di Tiro yang mendeklarasikan kemerdekaan Aceh. Sebelumnya, Di Tiro dan para pengikutnya telah terlibat adalam pemberontakan Darul Islam, GAM menuntut kemerdekaan dan memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentara GAM sering terlibat dalam peperangan bersenjata dengan tentara RI yang melakukan operasi-operasi keamanan. Kawasan ekonomi dan industri yang sedang berkembang, seperti: tambang Exxon Mobil Indonesia di Lhoksukon dan industri pengolahan gas PT. Arun NGL Co. di Lhokseumawe sering mendapatkan serangan dari pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata.

Eskalasi konflik bersenjata dan kekerasan semakin meningkat. Pada 1990, Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Terjadi aksi kekerasan dan pembantaian yang mengorbankan rakyat sipil biasa. Tahun 1998, status DOM dicabut dan dilakukan perundingan negosiasi untuk mengakhiri konflik. Tahun 2001, pemerintah memberikan status otonomi khusus untuk provinsi NAD melalui UU Otsus No. 18 tahun 2001. Konflik bersenjata secara terbuka dan kekerasan masih berlangsung dan semakin meningkat terjadi di pusat-pusat kota hingga ke kampung. Dalam waktu singkat ratusan korban dari rakyat sipil meninggal dan terjadi ketegangan dan tindakan kekerasan di mana-mana. Konflik relatif mereda setelah peristiwa tsunami dan ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan pihak GAM di Helsinki, 15 Agustus 2005.

Dinamika politik dan kekerasan bersenjata turut dirasakan langsung dan tidak langsung oleh komunitas di *Gampong* Alue Capli. Pada masa pergolakan pertentangan Darul Islam dan RI, para pemimpin lokal *keuchik* terbagi dua, yakni: terdapat Keuchik Ben yang menjadi *Keuchik* pemerintah RI dan *Keuchik* Keumangan menjadi *Keuchik* NII. Dualisme kepemimpinan membuat kehidupan warga tidak terpimpin, perang dingin terjadi di antara dua pemimpin dan pengikutnya. Hal ini terus berlanjut hingga tahun 1965, pada masa kepemimpinan *Geuchik* Nago dan *Geuchik* M. Hasan yang saat itu sebagai Ulama (Tgk.Imum), terjadi perpecahan di masyarakat dan menghendaki adanya pemisahan *Gampong* Alue Capli; namun tidak terealisasikan.

Situasi demikian membuat kehidupan sosial ekonomi masyarakat carut marut dan tidak menentu. Kebanyakan warga hidup sulit, tidak aman

dan miskin. Kemandegan ekonomi ini terjadi hingga masa kepemimpinan *Keuchik* Amat (1973-1980) dan *Keuchik* Mahmud (1980-1985). Saat itu merupakan masa konflik bersenjata yang melibatkan GAM dan tentara RI. Para tokoh penting GAM di Aceh Utara kebanyakan berasal dari desa-desa sekitar. Hal ini menyebabkan *Alue Capli* merupakan salah satu daerah yang seringkali mendapat tekanan tentara RI dan menjadi arena peperangan kedua kelompok. Warga yang tidak betah dengan suasana konflik pergi merantau ke luar daerah.

Perkembangan penduduk dan perekonomian di desa Alue Capli mulai berubah lebih maju pada masa *Keuchik* Abdullah Puteh (1986-1998). Pendapatan penduduk meningkat oleh karena peningkatan harga pertanian dan utamanya dari hasil tambak udang windu. Meskipun demikian, kehidupan sehari-hari masyarakat masih tidak aman, apalagi saat itu Aceh ditetapkan menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) dan tekanan terus meningkat hingga tahun 2001. Masyarakat mengenal jam malam di mana setalah jam 6 sore, warga tidak lagi bisa hilir mudik dan berada di areal usaha tani.

Beberapa warga lokal yang ketahuan dan mengabaikan ketentuan ini akan beresiko kehilangan nyawa, kena hukuman kekerasan fisik tertentu, ditangkap dan mendapatkan perlakukan khusus yang membuat pribadi tidak aman dan direndahkan martabatnya dengan tudingan negatif. Hal ini dilakukan oleh kedua pihak yang saling melakukan tekanan terhadap masyarakat. Seringkali masyarakat dituding sebagai pendukung GAM atau sebaliknya pendukung TNI dengan dalih yang dicari-cari. Masyarakat dipaksa menyerahkan dana perjuangan dan logistik, tanpa peduli dari mana sumbernya, oleh kedua pihak yang bertikai.

Salah seorang warga setempat bernama Ismail, menceritakan pengalaman hidupnya. Tahun 2001, kehidupan ekonomi keluarga Ismail relatif lebih baik setelah usaha udang yang baru dilakukannya dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Beliau membeli motor jenis Yamaha RX King untuk penunjang usahanya. Akan tetapi, tahun 2001 konflik semakin meningkat di Alue Capli, membuat lahan tambak yang bisa digarap terbatas dan warga lebih sering di rumah berdiam diri, menganggur dan tidak bekerja. Untuk bertahan hidup dan membiayai hidupnya maka harta benda yang ada dan termasuk motor baru dijual kembali. Harta sudah terkuras tetapi konflik belum juga reda.

Bukan hanya keterbatasan dan kerugian ekonomi, kehilangan kesempatan berusaha maupun siksaan fisik, tetapi konflik juga telah

mengakibatkan masyarakat kehilangan kesempatan mengembangkan diri, hidup dalam ketakutan, merasa tidak aman dan tidak bebas bergerak. Beberapa warga terpaksa pergi mengungsi.

Situasi ini relatif perlahan-lahan dapat berubah secara signifikan setelah pasca penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan pihak GAM di Helsinki, 15 Agustus 2005.

Kesejahteraan Masyarakat Adat

Berdasarkan penghitungan penduduk miskin oleh BPS (2004) dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs), tingkat kemiskinan di Provinsi NAD berada di urutan ke-4 provinsi termiskin di Indonesia. Pada tahun 2004, diperkirakan sebanyak 1,2 juta orang Aceh hidup di bawah garis kemiskinan, yakni di bawah Rp. 130.000 (sekitar US$ 14) per kapita per bulan. Kemiskinan semakin meningkat menyusul bencana gempa tsunami pada akhir Desember 2004. Menurut data Bappeda NAD 2006, jumlah penduduk miskin di Provinsi NAD setelah tsunami sebanyak 47,8 persen. Angkanya dua kali lebih besar rata-rata angka kemiskinan nasional yang sebesar 16,7 persen.

Menurut data BKKBN, pada tahun 2005 di Provinsi NAD terdapat 235.465 keluarga pra-sejahtera dari sekitar 908.455 keluarga di Provinsi NAD yang belum berhasil melepaskan diri dari lilitan kemiskinan. Kabupaten/kota di NAD yang memiliki jumlah keluarga pra-sejahtera terbanyak saat ini berada di Kabupaten Pidie, yaitu 39.877 keluarga; menyusul Aceh Utara 37.357; dan kemudian Aceh Timur 23.178 keluarga. Hal-hal yang menjadi ukuran pendekatan BKKBN ini antara lain: rumah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan rata-rata, dan makan nasi kurang dari dua kali sehari.

Ada banyak lembaga resmi pemerintah dan non pemerintah yang mempunyai pandangan dan konsep tentang tingkat kemiskinan dan kesejahteraan penduduk dengan menggunakan metode dan pendekatan yang berbeda-beda. **Bank Dunia** menggunakan ukuran pendapatan per orang per hari sebanyak 2 US$; pendapatan di bawah ini berarti di bawah garis kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia, yang merupakan penilaian standar kebutuhan dasar tertentu, digunakan oleh UNDP untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Warga Alue Capli menganggap bahwa konsep pengukuran tingkat kesejahteraan dan program pengentasan kemiskinan sering terjadi penyimpangan dan berdasarkan data / informasi yang tidak akurat. Konsep kemiskinan dan kesejahteraan penduduk pada umumnya hanya terbatas mengukur tingkat kemampuan konsumsi makanan dan non makanan seseorang, serta gambaran pemilikan harta benda. Konsep-konsep tersebut kurang signifikan. Penilaian tingkat kesejahteraan di lapangan sebenarnya lebih rumit. Problem struktural merupakan masalah dominan penyebab kemiskinan dan menurunnya tingkat kesejateraan penduduk di Aceh. Karena program-program pengentasan kemiskinan sama sekali tidak menekankan pada pengatasan masalah struktural, maka berbagai program pengentasan kemiskinan ternyata tidak dapat menyelesaikan secara mendalam problem kesejahteraan di masyarakat adat.

Proses yang ideal adalah dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan dan penentuan konsep kesejahteraan dan kemiskinan yang tentunya berdasarkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat tentang kondisi setempat. Dengan pelibatan masyarakat maka data, informasi dan hasil analisis tingkat kesejahteraan dapat signifikan dan mendekati kebenaran.

Masyarakat adat Alue Capli merumuskan prinsip-prinsip dan indikator kesejahteraan dan kemiskinan, sebagai berikut:

1. **Terpenuhinya kebutuhan sosial ekonomi;** segala kebutuhan yang dibutuhkan selalu ada dan berkecukupan. Indikatornya adalah adanya pekerjaan yang memadai dan pendapatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup keluarga; atau menjadi pegawai negeri dan pekerja tetap yang merupakan pilihan kerja yang paling aman; memiliki simpanan uang dan modal usaha; terselenggaranya usaha ekonomi dengan aman; memiliki harta benda, seperti: rumah yang sehat dan nyaman, tanah pertanian, alat-alat produksi usaha tani, kendaraan bermotor, alat elektronik, dan sebagainya. Jika berbagai kebutuhan di atas tidak ada atau sulit untuk dipenuhi, artinya terjadi kemiskinan di masyarakat.
2. **Berakhlak dan berpendidikan;** prinsipnya kesejahteraan dan kemiskinan berhubungan dengan perilaku yang baik, akal budi dan pendidikan seseorang atau rumah tangga. Indikatornya adalah meningkatnya dedikasi dan bakti masyarakat terhadap kehidupan sosial, sikap dan tutur kata yang Islami, meningkatnya kreativitas dan mempunyai kemampuan menciptakan maupun mengembangkan usaha-usaha, berpendidikan tinggi sehingga dapat mempunyai akses

dan relasi dengan berbagai stakeholder dan lembaga-lembaga di luar desa, serta kemudahan untuk mendapatkan lapangan kerja.

3. **Terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan;** prinsipnya kebutuhan dasar, khususnya kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi. Indikatornya adalah tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang mudah diakses dan murah, lingkungan bersih dan sehat, adanya sarana air bersih yang memadai, kondisi fisik yang sehat, adanya sarana dan prasarana pendidikan yang relatif mudah diakses dan murah, meningkatnya jumlah penduduk usia sekolah yang bisa bersekolah dan diharapkan hingga perguruan tinggi, termasuk peningkatan pengetahuan non formal dalam berbagai usaha sosial ekonomi, tersedianya kebutuhan pangan yang murah dan sehat.
4. **Aman dan tenteram**; prinsipnya hidup aman, bebas, tidak adanya diskriminasi, tidak ada kekerasan dan konflik bersenjata. Indikatornya adalah masyarakat bebas melakukan aktivitas tanpa ada tekanan, bebas dari intimidasi, diskriminasi dan kekerasan. Masyarakat bebas berkumpul dan berpendapat, adanya hukum yang adil dan tidak melakukan penangkapan ataupun penyiksaan sewenang-wenang, kehidupan sosial ekonomi masyarakat dapat dilindungi.

Topik kesejahteraan ekonomi dan perlunya rasa aman merupakan dua tema yang paling menonjol dalam menentukan indikator kesejahteraan menurut masyarakat adat Alue Capli. Pemenuhan kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan dapat lebih mudah mereka akses dan penuhi apabila pendapatan ekonomi masyarakat dapat terpenuhi. Keamanan dan perlindungan hukum merupakan hal penting untuk memastikan bahwa usaha dan pribadi mereka dapat aman dan dilindungi.

Pemenuhan prinsip dan indikator kesejahteraan masyarakat di atas maupun kesejahteraan sosial masyarakat yang lebih luas sangat ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. **Adanya kebijakan politik dan hukum yang berpihak pada masyarakat.** Implementasi program pembangunan dan pengentasan kemiskinan harus terencana, melibatkan masyarakat dan termasuk dalam menentukan dasar dan tingkat kesejahteraan dan kemiskinan. Program-program pengentasan kemiskinan diutamakan pelayanannya bagi mereka yang kurang beruntung (disadvantaged peoples), masyarakat korban dan mereka yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar. Kebijakan dan program diarahkan pula untuk

melakukan perbaikan sistem produksi dan peningkatan harga usaha tani dan tambak secara adil.

2. **Adanya dukungan program pembangunan kesejahteraan**; diharapkan negara dapat memberikan dukungan modal, kelembagaan dan mekanisme yang mudah bagi masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan dana bagi pengembangan usaha produktif. Diperlukan pula adanya lapangan kerja yang terbuka dan tidak diskriminatif, rehabilitasi dan pemulihan lahan tambak dan areal sawah, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan terapan, pengadaan alat produksi dan teknologi pertanian yang murah, pengadaan infrastruktur untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sebaik mungkin.
3. **Adanya pendidikan dan pembinaan hukum Islam**; diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan mengarahkan kehidupan masyarakat serta mempengaruhi sistem sosial yang pelaksanaannya berdasarkan syariat Islam dan berkeadilan.
4. **Adanya dukungan dan pengertian para pihak;** selain pemerintah, lembaga legislatif, aparat keamanan negara, maka pihak akademisi, kaum ulama, perusahaan, aktivis organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya, sangat menentukan perkembangan kesejahteraan. Diperlukan dukungan positif dan kontribusi mereka dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.

Kesimpulan

1. Masyarakat *Gampong* Alue Capli, Kecamatan Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara, menggambarkan komunitas masyarakat Aceh pada umumnya, yang tetap menggunakan bahasa Aceh, adat istiadat, hukum dan simbol-simbol budaya Islam, kelembagaan tua, seperti: *Imuem Mukim, Keuchik, Kejruen Blang*, dan lain-lain yang mengikat tali persaudaraan mereka sebagai etnik Aceh. Secara umum situasi sosial ekonomi di Alue Capli mengalami perkembangan dan perubahan berdasarkan sistem sosial yang ditentukan oleh mekanisme pasar, pemilikan alat produksi secara individu dan menggunakan tenaga kerja sewaan. Dalam relasi produksi terjadi permasalahan ketimpangan penguasaan lahan, sistem sewa dan gadai yang tidak adil, rendahnya upah buruh dan pemerintah mengabaikan tanggung jawabnya dalam perlindungan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dipersulit lagi setelah terjadinya peristiwa gempa dan tsunami yang merusak areal usaha tambak dan pertanian masyarakat.

2. Konflik bersenjata dan kekerasan mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung bagi kehidupan masyarakat. Mereka menjadi korban kekerasan dan beberapa di antaranya pergi mengungsi ke luar daerah. Situasi ini relatif lebih damai setelah adanya penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dengan GAM di Helsinki, 15 Agustus 2005.

3. Keadaan rumitnya kehidupan ekonomi dan konflik bersenjata, membuat masyarakat Alue Capli terjerumus dalam kemiskinan dan keterbelakangan kesejahteraan hidupnya. Secara umum, BPS dan BKKBN menetapkan Kabupaten Aceh Utara menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi dan memiliki banyak keluarga pra sejahtera di Provinsi NAD.

4. Masyarakat Adat Alue Capli merumuskan konsep, prinsip dan indikator kesejahteraan dan kemiskinan sebagai berikut: (a) terpenuhinya kebutuhan sosial ekonomi, yang mana segala kebutuhan yang dibutuhkan selalu ada dan berkecukupan; (b) berakhlak dan berpendidikan, prinsipnya kesejahteraan dan kemiskinan berhubungan dengan perilaku yang baik, akal budi dan pendidikan seseorang atau rumah tangga; (c) terpenuhinya kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan, prinsipnya kebutuhan dasar utamanya kebutuhan pangan, pendidikan dan kesehatan dapat terpenuhi; dan (d) aman dan tenteram, prinsipnya hidup aman, bebas, tidak ada diskriminasi, tidak ada kekerasan dan konflik bersenjata.

5. Faktor-faktor dan kondisi yang menentukan masyarakat dapat sejahtera dan bebas dari kemiskinan, yakni: (1) adanya dukungan kebijakan politik dan hukum yang berpihak pada masyarakat; (2) adanya dukungan program pembangunan kesejahteraan; (3) adanya pendidikan dan pembinaan hukum Islam; dan (4) adanya dukungan dan pengertian para pihak.

Daftar Bahan Bacaan

BPS Aceh Utara dan BAPPEDA Aceh Utara, (2004), Kabupaten Aceh Utara dalam Angka Tahun 2004.

Umar, Muhammad (2006), Peradaban Aceh (Tamaddun), Mengungkap Kilasan Sejarah Aceh dan Adat, Banda Aceh, Yayasan Busafat dan JKMA Aceh.

Suharto, Edi, PhD (2006) Negara Kesejahteraan dan *Reinventing* Depsos, Makalah.

Majalah TEMPO, Edisi Khusus 18 – 24 Agustus 2003.

3

SEDULUR SIKEP BERHAK MENENTUKAN JALAN HIDUPNYA SENDIRI[1]

Oleh: Restu Achmaliadi dan George Sitania

Sejarah dan Sebaran

Keberadaan Sedulur Sikep saat ini tidak bisa dipisahkan dari gerakan yang dipelopori oleh Samin Surontiko pada awal 1890-an yang dimulai di bagian Selatan Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Samin Surontiko lahir pada tahun 1959 di Ploso Diren, Randublatung (Blora). Gerakan Sedulur Sikep yang dipelopori oleh Samin Surontiko ini pada awalnya tidak dipedulikan Belanda. Belanda baru mulai mewaspadai gerakan Sedulur Sikep ini setelah pada sekitar tahun 1904 gerakan ini bisa menghimpun pengikut sekitar 3000 orang. Samin Surontiko akhirnya dibuang ke Sawah Lunto (Sumatera Barat) pada tahun 1907.

Gerakan Sedulur Sikep pada waktu itu bukanlah gerakan kekerasan, tetapi merupakan gerakan "pembangkangan pasif" terhadap kebijakan Pemerintah Belanda (negara); misalnya menolak membayar pajak dan kerja rodi. Gerakan ini mengajak pengikutnya untuk menarik diri dari kontrol Pemerintahan Kolonial Belanda dan melakukan pemurnian perilaku hidup. Gerakan Sedulur Sikep pada jaman Belanda merupakan salah satu bentuk resistensi petani.

Jadi asal muasal Sedulur Sikep bukanlah dari suatu keluarga tertentu yang memiliki hubungan kekerabatan, tetapi merupakan kumpulan petani yang berasal dari berbagai daerah di bagian timur Jawa Tengah yang menyatakan diri sebagai Wong Sikep dan mengikuri ajaran Ki Samin Surontiko.

Sedulur Sikep pada mulanya tersebar luas di Rembang, Pati, Kudus, Blora, Bojonegoro, Ngawi, Madiun, dengan konsentrasi terbesar di Kec.

1 Tulisan ini dibuat berdasarkan hasil kunjungan lapangan ke komunitas Sedulur Sikep di Ngawen, Bombong Bacem, Nggaliran (Sukolilo-Pati), Kalioso (Kudus), Kemantren dan Balong (Kedungtuban-Blora) pada tanggal 13 – 20 September 2007

Kedungtuban dan Kec. Bapangan Kabupaten Blora. Sedulur Sikep, saat ini, diperkirakan hanya tersebar di Kudus, Pati, Bojonegoro, dan Blora. Permukiman Sedulur Sikep membaur dengan penduduk perdesaan di sekitarnya. Hanya di tempat-tempat tertentu permukiman Sedulur Sikep terpisah dari komunitas di sekitarnya; misalnya di Dusun Bombong Bacem, Desa Baturejo, Kec. Sukolilo. Rumah Sedulur Sikep pada umumnya masih mempertahankan model Jawa (sinom, joglo) dan berlantai tanah atau diplester semen biasa. Ruangan depan, selain ada ruang untuk tamu, biasanya dipergunakan untuk menyimpan hasil panen; padi atau palawija. Sebagian Sedulur Sikep telah mengubah rumahnya menjadi rumah modern.

Jumlah keseluruhan Sedulur Sikep tidaklah jelas, karena sistem pencacahan yang berlaku tidak memungkinkan pengidentifikasian Sedulur Sikep secara jelas. Agama Adam yang dianut Sedulur Sikep, sebagai peninggalan ajaran Samin Surostiko, bahkan tidak diakui sebagai salah satu agama atau kepercayaan dalam pencatatan administrasi negara atau proses sensus oleh aparat pemerintahan pada umumnya; sehingga semakin sulit menentukan jumlah Sedulur Sikep yang sebenarnya. Sebagai bagian dari strategi resistensi "warisan" pada jaman pemerintahan kolonial, Sedulur Sikep sangat peka terhadap upaya-upaya cacah jiwa. Seorang Sedulur Sikep akan menjawab "*akeh*" (banyak) bila ditanya tentang jumlah warga Sedulur Sikep di komunitasnya; karena pengalaman buruk akibat cacah jiwa pada masa kolonial dulu. Jumlah Sedulur Sikep di suatu tempat bisa terdiri dari beberapa keluarga saja, atau bisa sampai ratusan keluarga. Satu-satunya jumlah Sedulur Sikep yang tercatat adalah di Bombong-Bacem Desa Baturejo Kec. Sukolilo Kab. Pati. Pada Desember 2004, Sedulur Sikep di Bombong-Bacem memeriksa dan mencatat jumlah warganya sendiri; yakni 148 keluarga atau 706 jiwa[2].

Apa itu Sedulur Sikep?

Banyak masyarakat yang salah dengan menyebut "orang Samin" – dari nama Samin Surondiko -- untuk sebutan Sedulur Sikep. Sebutan yang tepat untuk paham yang mereka anut adalah "*sikep*". Sikep adalah

2 M. Uzair Fauzan. 2007. "Politik Representasi dan Wacana Multikulturalisme dalam Praktek Program Komunitas Adat Terpencil Kasus Komunitas Sedulur Sikep Bombong-Bacem" dalam Hikmat Budiman et. al. Hak Minoritas Dilema Multikulturalisme di Indonesia. The Interseksi Foundation. Jakarta

sikep laki-rabi atau perkawinan (bercinta). Jadi menurut Sedulur Sikep, inti kehidupan adalah perkawinan; yakni bertemunya antara vagina dan penis. Kesempurnaan hidup di dunia adalah kalau manusia sudah ketemu jodohnya, karena segala sesuatunya diciptakan sudah berpasang-pasangan. Ada siang ada malam, ada terang ada gelap, ada laki-laki ada perempuan, dst. Kesempurnaan adalah bila keduanya sudah menjadi satu. Sedangkan pengertian "samin" adalah *sami amin* (sama). Semua manusia adalah sama baik, derajat dan kehidupannya.

Menurut pandangan Sedulur Sikep, tugas dan tujuan utama manusia adalah *sikep rabi* (bercinta), dan menjalankan *tatane wong* (menciptakan keturunan), secara *mligi* (lugu, terus terang, jujur, apa adanya). Pada jaman kolonial, tuntutan agar bisa menjadi *lugu* dan murni inilah yang menyebabkan Sedulur Sikep menarik diri dari kontrol pemerintahan kolonial, menjauhi campur tangan dari pihak lain, serta *mligi* bertani. Selalu waspada terhadap campur tangan negara (kolonial) ini berlangsung sampai sekarang dalam bentuk ketidakpedulian dan kehati-hatian Sedulur Sikep dalam menerima berbagai program pemerintah.

Menurut ajaran sikep, menjadi lugu dan murni itu juga dipraktekkan dalam memenuhi kebutuhan sandang pangan. Mereka meyakini bahwa hasil kerja pemenuhan sandang pangan harus bisa dijelaskan secara terbuka dan "*didunungke"* (dijelaskan asal usulnya sampai pada wujudnya). Sikap terbuka dan *didunungke* ini menyebabkan semua hal harus dijelaskan dengan rinci dan logis. Apabila semua pekerjaan *didunungke*, maka hanya pekerjaan bertanilah yang tetap *mligi* (lugu) dan tidak menipu.

Tata cara *ndunungake* ini menyebabkan Sedulur Sikep, meskipun hampir semuanya buta huruf, memiliki analisis bahasa yang tajam terhadap semua hal. Kebiasaan *ndunungake* (membuktikan dan merinci semua hal sampai pada wujudnya) menyebabkan sebagian besar Sedulur Sikep sangat cakap menganalisis dan berbahasa Jawa, sehingga rasa percaya diri Sedulur Sikep kebanyakan sangat besar; tidak sebagaimana orang-orang buta huruf dan tidak terpelajar di komunitas lain yang cenderung rendah diri dan tidak dihargai martabatnya.

Sebagai upaya untuk tetap murni dan *mligi*, terdapat berbagai ajaran moral yang selalu dituturkan oleh orang tua kepada anak Sedulur Sikep. Ajaran-ajaran itu antara lain larangan (*adeg-adeg*) para warganya agar menjauhi: *drengki, srei, panasten, dahwen,* dan *kemeren*. *Bedok, colong, pethil, jumput, nemu* juga merupakan larangan. Seorang *wong* (manusia) sebaiknya tidak mengumbar: ucapan, tindakan, dan *tatanan*. Setiap *wong* (manusia) juga harus: rukun kepada suami, rukun kepada anak, rukun kepada orang tua, rukun kepada sesama manusia di mana saja. Sedulur Sikep dilarang keras bersuami dua dan berdagang[3].

Struktur Sedulur Sikep

"*Wong iku duwe negarane dhewe-dhewe*" (setiap orang punya negaranya/keluarganya sendiri-sendiri); demikian kata salah seorang narasumber di Ngawen-Sukolilo. Jadi, menurut ajaran sikep, manusia telah menjadi *wong* sepenuhnya jika telah *sikep laki rabi* (bercinta); artinya telah memiliki keluarga. Jadi kuasa atau orientasi tertinggi *wong sikep* adalah "negaranya sendiri" (keluarganya sendiri) dan tidak tertarik (*kemeren*) kepada kepunyaan orang lain.

Ajaran di atas merupakan dasar penghargaan atas individu yang luar biasa. Karena itu Sedulur Sikep memiliki semangat *egalitarian* yang sangat tinggi. Sedulur Sikep tidak mengenal struktur tertentu atau model keterwakilan tertentu. Setiap orang mewakili dirinya sendiri. Semua hal harus dibicarakan secara bersama-sama. Tidak ada ketua adat, pemimpin adat, atau tetua adat. "*Tuwa ki tuwa tuwane wicara*" (tua itu tua isi pembicaraannya); jadi yang muda pun akan menjadi tua bila isi pembicaraannya "tua" dan bisa menjadi panutan. Karena itu, seringkali Sedulur Sikep akan menjawab "*siji*" (satu) bila ditanya umurnya; sebagai

3 Gunritno. 2005. Sejarah Perjuangan Gerakan Samin Surontiko. Tidak diterbitkan. Baturejo-Pati.

strategi untuk menghindari dominasi senioritas yang anti egalitarian.

Pada awal atau akhir pembicaraan, seringkali kalimat berikut ini digunakan: "*iku nek aku, ya embuh nek wong liyo*" (itu kalau menurut saya, ya tidak tahu kalau menurut orang lain). Ini merupakan penghargaan yang tinggi terhadap "kebenaran" pendapat orang lain dan menyadari akan hak-hak orang lain.

Menurut Sedulur Sikep, sebutan "komunitas" tidak tepat kalau ditujukan kepada Sedulur Sikep. Karena pengertian "komunitas" adalah suatu kumpulan orang yang memiliki sistem dan struktur tertentu; memiliki ketua dan berbagai perangkat lainnya. Sedulur Sikep adalah kumpulan orang-orang yang masing-masing berdiri sendiri, mempunyai miliknya sendiri-sendiri, dan bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Struktur yang dimilikinya adalah keluarganya sendiri.

Realitas-realitas

Perubahan jaman, tekanan kelembagaan negara yang terus menerus, tekanan/dominasi masyarakat sekitarnya, menyebabkan timbulnya berbagai keseimbangan baru dalam kehidupan Sedulur Sikep di berbagai tempat. Meskipun berbagai ajaran (moral) Sedulur Sikep selalu diikhtiarkan untuk dikukuhi, tetapi interpretasi yang berbeda-beda – sebagai akibat "pengaruh luar" ini – terhadap ajaran sikep sering terjadi di antara Sedulur Sikep sendiri.

Meskipun bertani tetap dianggap pekerjaan yang paling *mligi*, tetapi variasi pekerjaan telah banyak dijalani oleh Sedulur Sikep. Tukang bangunan, sopir dan kerja upahan membantu pekerjaan sawah orang lain menjadi pekerjaan tambahan sebagai upaya menambah sandang pangan. Orang-orang Nggaliran (Sukolilo-Pati) banyak yang telah merasakan bekerja sebagai TKI di Malaysia. Profesi pedagang tetap menjadi pantangan bagi Sedulur Sikep. Televisi, radio, kulkas, *magic jare* adalah berbagai peralatan elektronik yang umum dijumpai di rumah-rumah Sedulur Sikep. Banyak keluarga Sedulur Sikep yang telah memiliki sepeda motor dan pompa air (sanyo); bahkan memiliki mobil.

Banyak keluarga Sedulur Sikep yang telah "kalah"; akibat-akibat tekanan yang terus-menerus ini. Banyak Sedulur Sikep yang telah meninggalkan cara berpakaiannya; tidak lagi mengenakan celana potong dan ikat kepala. Banyak Sedulur Sikep yang telah tidak menjalankan

ajaran sikep lagi, dan telah memeluk agama resmi tertentu yang direstui pemerintah. Ada Sedulur Sikep yang telah pindah agama Islam dan naik haji. Beberapa keluarga Sedulur Sikep, selain menggunakan tata cara perkawinan sikep, juga menggunakan tata cara pernikahan berdasarkan agama tertentu. Akan tetapi, sebaliknya, ada juga Sedulur Sikep yang telah merevitalisasi dirinya sendiri; kembali meneguhi ajaran sikep setelah cukup lama meninggalkan ajaran sikep. Ada juga satu keluarga besar kiai, di Sukolilo-Pati, yang berikrar dan berubah menjadi Sedulur Sikep.

Ajaran-ajaran sikep, pada beberapa keluarga Sedulur Sikep, telah mulai luntur penerapannya. Ajaran (moral) untuk menjauhi: *drengki, srei, panasten, dahwen,* dan *kemeren* mulai ditinggalkan oleh beberapa keluarga. Rasa *drengki* dan *kemeren* mulai terjadi di antara beberapa keluarga Sedulur Sikep; pergunjingan soal diterima atau ditolaknya bantuan telah menjadi pergunjingan panas, serta tidak dilihat secara arif seperti dulu lagi sebagai hak setiap keluarga untuk menerima atau menolak bantuan.

Tekanan Negara dan Kehidupan Sekitar

Para tokoh pendiri Negara Indonesia sangatlah luar biasa. Kesadaran akan pluralitas bangsa dan kuatnya hak asal-usul diakui dengan tegas dalam Pasal 18 UUD 1945. Pengakuan terhadap keragaman agama dan kepercayaan disuratkan dalam UUD 1945 Pasal 29, yang pada intinya mengakui hak setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

Sayangnya kesadaran tinggi para tokoh pendiri negara ini, tidak dipahami benar oleh para pelaksana pemerintahan dari pusat sampai yang terendah (desa). Berbagai perundangan sebagai turunan dari UUD 1945 dan berbagai peraturan praktis di tingkat lapangan malahan mengijinkan dominasi agama-agama tertentu, dan mengabaikan keberadaan agama minoritas seperti agama Adam yang dianut oleh Sedulur Sikep.

Sampai saat ini tidak ada satu instansipun yang mengakui agama yang dianut Sedulur Sikep (agama Adam) sebagai salah satu agama resmi. Berbagai penganut agama yang dominan (Islam, Kristen, dll.) di sekitar permukiman Sedulur Sikep dibiarkan begitu saja secara agresif melakukan dakwah yang sistematis dengan sasaran Sedulur Sikep, yang sebenarnya telah memiliki agama Adam. Tata cara perkawinan Sedulur Sikep, sampai sekarang, masih tidak bisa dicatatkan ke Catatan Sipil; untungnya pada

umumnya Sedulur Sikep tidak peduli terhadap adanya surat nikah. Pada tanggal 7 Agustus 1989, 117 pasangan Sedulur Sikep dinikahkan masal dengan tata cara agama Budha di Bombong-Bacem (Baturejo-Pati); sampai sekarang pun KTP Sedulur Sikep di Bombong-Bacem kebanyakan masih tersurat sebagai beragama Budha. Pemaksaan untuk masuk agama dominan tertentu masih terus berlangsung sampai sekarang.

Dulu, Sedulur Sikep tidak peduli dengan tanda pengenal; baik itu kartu tanda penduduk (KTP), surat ijin mengemudi (SIM), dan kartu tanda pengenal yang lain. Akan tetapi dengan semakin tingginya frekuensi perjalanan – karena tuntutan pekerjaan – dan perlunya tanda pengenal untuk mengatur hak kepemilikan (sertifikat, girik, akta jual beli, dll.), maka kartu tanda pengenal menjadi sangat penting artinya untuk Sedulur Sikep. Tanpa kartu tanda pengenal, Sedulur Sikep tidak akan bisa membeli sepeda motor dan mengurus surat-suratnya. Tanpa SIM, polisi akan menangkap Sedulur Sikep yang mengendarai kendaraan bermotor. Sayangnya kolom agama pada tanda pengenal harus diisi dengan salah satu agama resmi yang diakui pemerintah; agama Adam tidak boleh dicantumkan dalam kolom agama di tanda pengenal itu.

Laki-laki Sedulur Sikep memiliki ciri khas dalam bepergian; yakni menggunakan ikat kepala dan memakai celana potong di bawah lutut; karena salah satu pantangan Sedulur Sikep adalah memakai celana panjang. Sebagian besar kantor pemerintahan mengganggap bahwa cara berpakaian yang demikian adalah tidak pantas dan kurang sopan.

Salah satu komunitas Sedulur Sikep di Sukolilo pernah merasakan pengalaman pahit dalam berhubungan dengan penduduk sekitarnya. Karena di permukiman Sedulur Sikep itu masih baru satu generasi (baru ada beberapa keluarga yang menganut ajaran sikep), maka intensitas hubungan dan saling kesepahaman dengan penduduk sekitarnya belumlah terlalu baik. Pada saat salah satu warga Sedulur Sikep di permukiman itu meninggal, penduduk melarang mayat Sedulur Sikep itu dimakamkan di kuburan umum, karena – mungkin – dianggap memiliki agama atau kepercayaan yang tidak lumrah..

Tekanan-tekanan lembaga negara, khususnya di tingkat bawah (kabupaten, kecamatan, desa, instansi sipil), dan tekanan-tekanan masyarakat sekitar terhadap Sedulur Sikep masih akan terus berlangsung. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) para Sedulur Sikep. Seharusnya Negara Indonesia tidak boleh membiarkan pelanggaran HAM ini terus terjadi kepada Sedulur Sikep.

Miskin dan Kaya

Telah diperikan di atas bahwa struktur tertinggi Sedulur Sikep adalah keluarga. Tujuan hidup Sedulur Sikep adalah *sikep rabi*. Maknanya adalah bahwa keluarga (suami-istri-anak) adalah nilai kehidupan tertinggi bagi Sedulur Sikep; tidak ada lagi tujuan hidup atau ambisi yang lain. Setiap keluarga Wong Sikep akan mengurusi "negaranya"/keluarganya sendiri-sendiri. Kalau setiap keluarga baik-baik dan tenteram maka semuanya akan baik-baik saja.

"*Cukup ora cukup kuwi terserah wonge dhewe-dhewe*" (kurang atau kecukupan harta itu terserah masing-masing orang). Kebutuhan kalau dituruti tidak akan pernah ada cukupnya. Salah seorang narasumber Sedulur Sikep berpendapat bahwa boleh-boleh saja pemerintah membuat standar tentang miskin atau kayanya seseorang; tetapi yang paling penting, soal miskin dan kaya, adalah pada orang itu sendiri.

Keluhuran dan kesederhanaan formulasi tujuan hidup, yakni keluarga, dan berbagai *adeg-adeg* (larangan moral) menyebabkan kontrol diri Sedulur Sikep pada umumnya sangat baik. Meskipun tidak punya sawah, menyewa sawah selalu mereka upayakan agar tetap bisa bertani; karena itu etos kerja Sedulur Sikep pada umumnya cukup baik. Karena itu kelakuan-kelakuan yang gegabah (menjual gabah sembarangan, menelantarkan anak istri, mempunyai ambisi yang berlebihan, dll.) sangat jarang dijumpai pada Sedulur Sikep. Ruang tamu – selain untuk menerima tamu -- biasanya juga digunakan untuk menyimpan padi dan karung-karungnya; menyediakan cadangan pangan untuk keluarga. Kesederhanaan cita-cita hidup menyebabkan kebanyakan Sedulur Sikep tidak terlalu *ngoyo* dalam mengejar kehidupan dunia.

Kenyataan Berbagai Program Pembangunan

Sebagaimana wilayah perdesaan yang lain, desa-desa di mana Sedulur Sikep tinggal merupakan sasaran berbagai macam program pembangunan perdesaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, baik program-program yang bersifat fisik maupun berbagai program sosial kemasyarakatan. Berbagai program pembangunan perdesaan ini semakin banyak dan bervariasi penyelenggaraannya pada saat Orde Baru berkuasa.
Pemerintah meluncurkan berbagai macam program pembangunan pertanian,

khususnya ke daerah-daerah perdesaan yang berpotensi persawahan. Berbagai program pemerintah bidang pertanian itu antara lain bimbingan massal (BIMAS) yang diselenggarakan pada tahun 1970-an sebagai bagian dari revolusi hijau (*green revolution*), intensifikasi massal (INMAS) yang juga diselenggarakan pada tahun 1970-an, intensifikasi khusus (INSUS) yang diselenggarakan pada akhir tahun 1980-an, penyuluhan pertanian reguler (pengenalan bibit unggul, percontohan pertanian, pengenalan berbagai jenis input pertanian) yang terus berlangsung sampai saat ini, kredit usaha tani (KUT) reguler. Pada umumnya Sedulur Sikep sangat hati-hati dalam menanggapi berbagai program pertanian pemerintah ini, sebagaimana kehati-hatian Sedulur Sikep dalam berhubungan dengan institusi negara. Meskipun secara umum cara bertani Sedulur Sikep telah menggunakan cara-cara baru yang diintroduksikan program revolusi hijau (penggunaan bibit unggul dan berlabel baik untuk padi dan palawija, penggunaan pupuk buatan berimbang, penggunaan pestisida, dll.), tetapi berbagai pengetahuan cara bertani yang baru ini diperoleh dari masyarakat sekitarnya, dan bukan secara langsung dari institusi negara.

Untuk memulihkan sektor pertanian, pemerintah meluncurkan program kredit usaha tani (KUT) besar-besaran setelah reformasi 1998. Program ini, secara nasional, dianggap gagal memulihkan sektor pertanian; bahkan menyisakan kredit pertanian yang gagal dibayar atau diselewengkan dalam jumlah sangat besar. Program KUT pasca reformasi ini juga "membanjiri" desa-desa tempat Sedulur Sikep tinggal. Respon Sedulur Sikep terhadap program ini sangat bervariasi. Sebagian besar menolak program ini, karena mereka merasa masih bisa menanam padi tanpa mengandalkan KUT sebagai modal tanam. Sebagian lagi menerima program ini. Pada umumnya penerapan program KUT di lapangan banyak yang melenceng dari yang seharusnya. Penyelewengan pelaksanaan program KUT ini bisa berupa jumlah kredit yang diterima petani menjadi lebih kecil dari seharusnya atau bisa berwujud penggelapan kredit/ pengembalian kredit oleh pengurus koperasi atau LSM yang mengelola KUT. Sedulur Sikep yang menerima KUT banyak yang menerima kredit jauh lebih kecil dari yang seharusnya. Sedulur Sikep yang menerima program KUT, kebanyakan, telah mengembalikan KUT yang dipinjamnya. Tetapi tidaklah jelas apakah uang pengembalian KUT itu oleh pengelola KUT telah disetor ke kas negara atau tidak.

Sedulur Sikep sering menemui layanan program-program pertanian yang diselenggarakan aparat negara di lapangan melenceng dari rencana

program yang sesungguhnya. Berbagai program pertanian ini dipersepsikan beragam oleh Sedulur Sikep. Meskipun secara umum Sedulur Sikep sangat menghargai pendapat setiap orang, apakah mau menerima atau menolak suatu program, tetapi harus diakui bahwa berbagai program pertanian yang diselenggarakan oleh negara ini – yang pelaksanaan lapangannya telah menyeleweng dari yang seharusnya direncanakan – telah menyebabkan friksi-friksi kecil di antara para Sedulur Sikep.

Meskipun pada umumnya Sedulur Sikep lebih senang bekerja sama dan percaya kepada sesama Sedulur Sikep, termasuk dalam mengerjakan tanah pertanian, tetapi upaya-upaya bekerja sama dengan "orang lain" dalam bidang pertanian mulai dilakukan oleh Sedulur Sikep. Sedulur Sikep di Bombong Bacem mulai membentuk kelompok tani – yang anggotanya termasuk "orang luar" – yang aktif mengerjakan berbagai kegiatan pertanian secara bersama-sama; misalnya dalam kerjasama mengelola pompa air sebagai alat bantu pengairan di musim kemarau. Kelompok-kelompok tani ini, bersama-sama dengan berbagai kelompok tani yang lain, telah membentuk suatu organisasi tani yang bernama Serikat Petani Pati (SPP). SPP sangat kritis terhadap berbagai program pertanian Dinas Pertanian Pati yang kurang tepat atau dianggap merugikan petani. Baru-baru ini SPP sangat keras mengkritisi program bantuan bibit padi yang digulirkan oleh Dinas Pertanian Pati.

Bantuan langsung tunia (BLT) dan beras untuk rakyat miskin (Raskin) merupakan dua buah program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan yang sangat populer setelah tahun 2000. BLT merupakan bentuk pengalihan subsidi minyak kepada orang miskin, karena "keterpaksaan" pemerintah menaikkan harga minyak di pasaran. Telah kita ketahui bersama, efek kenaikan harga minyak, khususnya harga minyak tanah dan harga bahan bakar kendaraan (bensin dan solar) telah menyebabkan efek domino yang menyebabkan meningkatnya jumlah orang miskin dan terancam miskin di Indonesia. BLT memberikan bantuan tunai kepada setiap keluarga miskin sejumlah Rp. 300.000,00 per tiga bulan kepada setiap keluarga yang digolongkan miskin. Sedulur Sikep merespon BLT dengan tanggapan yang bervariasi. Sebagian besar menolak bantuan ini, karena sudah merasa cukup dan tidak perlu mendapat bantuan. Sebagian lagi bersedia menerima BLT.

Raskin diluncurkan oleh pemerintah sebagai bagian dari subsidi untuk pengentasan kemiskinan. Program ini memberikan sumbangan beras sejumlah 10 kg per bulan untuk setiap keluarga yang digolongkan miskin.

Sedulur Sikep memberikan respon yang beragam terhadap program Raskin. Sebagian besar menolak, karena merasa bahwa gabah yang dimilikinya cukup, dan tidaklah pantas orang yang gabah untuk keluarganya cukup menerima bantuan beras lagi. Sebagian Sedulur Sikep ada yang bersedia menerima Raskin. Akan tetapi praktik program ini sangat berbeda ketika di lapangan. Bukannya 10 kg beras untuk keluarga miskin per bulan, tetapi bantuan Raskin ini malahan diratakan untuk hampir seluruh keluarga, baik yang kaya maupun yang miskin, dengan setiap keluarga hanya mendapatkan 2 kg per bulan. Di desa yang lain setiap keluarga hanya mendapatkan 5 kg setiap bulan. Ada dugaan kuat, aparat desa menyelewengkan sebagian bantuan Raskin untuk dirinya sendiri.

Salah satu program pembangunan yang sampai sekarang kuat teringat di kalangan Sedulur Sikep Bombong Bacem (Baturejo) adalah program komunitas adat tertinggal (KAT) yang digulirkan oleh Departemen Sosial (Depsos). Program ini diperuntukkan berbagai komunitas masyarakat yang dianggap terasing, terpencil dan ketinggalan dibandingkan dengan berbagai komunitas lain di Indonesia. Sebenarnya program ini sudah digulirkan Depsos sejak pertengahan 1970-an; yang pada awalnya sasaran program ini adalah ”suku terasing”. Pada tahun 1987 istilah ”suku terasing” diubah menjadi ”masyarakat terasing”. Setelah reformasi 1998, istilah ”masyarakat terasing” diubah menjadi ”komunitas adat terpencil”.

Sedulur Sikep memperoleh program KAT, karena Sedulur Sikep dianggap terpencil adat istiadatnya; dianggap memiliki budaya yang tidak umum. Program KAT ini, yang mulai dilaksanakan di Bombong Bacem pada tahun 2004, cukup kuat diingat oleh Sedulur Sikep di Bombong Bacem, karena kontroversi yang meliputi kelangsungan program ini Bombong Bacem. Dari beberapa permukiman Sedulur Sikep yang menyebar di bagian timur Jawa Tengah, hanya Sedulur Sikep di Bombong Bacem yang menjadi sasaran program KAT.

Program KAT meliputi beragam kegiatan: perbaikan sarana fisik, dukungan perbaikan tempat tinggal, pengadaan sarana produksi pertanian (saprotan), dan dukungan kesejahteraan (beras, dll.). Sebagaimana berbagai program pemerintah yang lain, Sedulur Sikep menanggapi KAT secara berbeda; terdapat 3 kelompok pandangan terhadap program KAT. Golongan pertama adalah keluarga-keluarga yang benar-benar menolak program KAT, karena mereka menolak Sedulur Sikep disebut sebagai masyarakat terpencil dan terasing. Golongan kedua adalah keluarga-keluarga yang menyetujui sebagian program KAT, terutama yang berkaitan

dengan perbaikan fasilitas umum. Golongan ketiga adalah keluarga-keluarga yang menerima program KAT sepenuhnya.

Program KAT ditujukan untuk 123 keluarga Sedulur Sikep di Bombong Bacem. Akan tetapi 97 keluarga Sedulur Sikep menolak program ini; dan hanya 26 keluarga yang menerima sepenuhnya program KAT. Bantuan program KAT (pasir, semen, bantuan pangan, saprotan, dll.) akhirnya menumpuk pada ke-26 keluarga ini. Pengelolaan program ini – yang dilakukan aparat pemerintah – tidaklah terlalu transparan; tidaklah jelas benar jumlah dan jenis bantuan program KAT yang seharusnya diberikan kepada Sedulur Sikep.

Meskipun secara umum Sedulur Sikep sangat menghargai otoritas keluarga masing-masing, tetapi adanya program KAT di Bombong Bacem ini telah menimbulkan friksi di antara Sedulur Sikep. Meskipun tidak sampai menimbulkan konflik yang keras, program KAT membuat friksi-friksi di Sedulur Sikep yang sedikit merenggangkan hubungan persaudaraan di antara Sedulur Sikep.

Program-program reguler pemerintah untuk ibu-ibu dan anak-anak juga ”membanjiri” desa-desa di mana Sedulur Sikep tinggal; program pendidikan kesejahteraan keluarga (PKK), keluarga berencana (KB) dan pemasangan kontrasepsi, pos pelayanan terpadu (Posyandu), tanaman obat keluarga (TOGA), imunisasi anak, pemberian vitamin tambahan pada anak, tawaran beragam arisan, dll. Para perempuan Sedulur Sikep pada umumnya menolak berbagai program ini. Bagi mereka, yang terpenting adalah mengurus dan membuat baik ”negaranya” (keluarganya) sendiri. Kalau keluarganya sendiri sudah baik (suami-istri-anak), maka berbagai program dari luar ini tidak perlu lagi. Daripada mengikuti berbagai program yang tidak jelas ”dununge” ini lebih baik mengurus keluarga sendiri atau membantu suami menggarap sawah. Berbagai program dari luar ini ditakutkan akan mempengaruhi keluguan Sedulur Sikep dan anak cucunya.

Bersekolah formal adalah salah satu pantangan untuk anak-anak Sedulur Sikep. Sedulur Sikep mengganggap bahwa ajaran-ajaran di sekolah akan mempengaruhi seorang anak sehingga nantinya tidak mungkin lagi dia akan *mligi*. Pemerintah sangat gencar mensosialisasikan pentingnya pendidikan kepada keluarga-keluarga Sedulur Sikep. Banyak juga anak-anak Sedulur Sikep yang telah ”kalah” dan terpaksa bersekolah agar dianggap lumrah.

Meskipun selalu hati-hati terhadap berbagai program pembangunan negara, pada umumnya Sedulur Sikep – saat ini – memahami pentingnya negara. Pajak bumi dan bangunan (PBB) pada umumnya telah diterima sebagai pungutan resmi yang ”dununge” jelas. Di Balong (Blora) pemerintah telah memberikan bantuan pompa air, sehingga pada musim kemarau sawah masih tetap bisa ditanami; Sedulur Sikep di Balong (Blora) dan masyarakat sekitar membentuk kelompok untuk mengelola pompa air ini.

Telah sangat banyak dan beragam jenis program pembangunan perdesaan yang telah dirasakan Sedulur Sikep. Berbagai program ini ada yang cukup baik, tetapi ada juga program-program tertentu yang memiliki filosofi yang salah. Sayangnya, tidak banyak program pembangunan yang pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan yang direncanakan di tingkat pusat. Banyak contoh program pembangunan yang pelaksanaannya di lapangan penuh penyelewengan dan kolusi. Berbagai program pembangunan ini, apalagi yang pelaksanaannya banyak penyelewengan, sangat mempengaruhi perkembangan kekerabatan antar Sedulur Sikep. Program-program pembangunan ini, baik yang bermanfaat maupun yang tidak jelas manfaatnya, merupakan tekanan dari luar yang mempengaruhi keutuhan Sedulur Sikep; ini seharusnya dipahami oleh pemerintah.

Sikap *mligi* (lugu) dan kritis terhadap hal-hal dari luar, khususnya berbagai campur tangan negara, seharusnya dilihat sebagai potensi; dan bukannya dilihat sebagai hal yang tidak lumrah. Sedulur Sikep berhak memilih tanpa tekanan, apakah akan mengikuti berbagai program pembangunan pemerintah itu atau memilih cara hidup yang telah dikukuhinya selama ini. Cara hidup Sedulur Sikep yang *mligi* (lugu) dalam menghadapi hidup dan mandiri tidak menggantungkan pertolongan orang lain, termasuk pemerintah, merupakan contoh yang langka dalam era merosotnya perekonomian masyarakat yang selalu mengharapkan subsidi dari pemerintah. Sikap kritis Sedulur Sikep terhadap program-program pemerintah seharusnya dilihat sebagai koreksi terhadap tata cara dan birokrasi pelaksanaan program yang memang buruk; dan bukannya dilihat sebagai bentuk perlawanan masyarakat terhadap program pemerintah.

Penutup

Sedulur Sikep adalah contoh ”komunitas” adat yang tetap mampu mempertahankan eksistensinya – dengan formulasi tujuan hidup yang sederhana dan luhur – di tengah-tengah perkembangan peradaban dunia yang tidak menentu. Seharusnya tata cara kehidupan Sedulur Sikep yang luhur ini – tanpa kegelisahan dan kerakusan sumberdaya – menjadi contoh hidup untuk masyarakat yang lain.

Sayangnya negara tidak memahami makna ”mutiara” ini. Aparatus negara terus menggelontorkan program-program pembangunan yang tidak *dumunung*[4] filosofi dan manfaatnya. Pelaksana-pelaksana lapangan, kebanyakan, gagal melaksanakan berbagai program pembangunan ini dengan sebenar-benarnya.

Penyelewengan-penyelewengan dan berbagai deviasi penerapan program pembangunan ini, mau tidak mau, berpengaruh (buruk) terhadap keutuhan persaudaraan Sedulur Sikep. Pengaruh buruk ini, kalau dibiarkan terjadi terus, akan semakin menyurutkan keutuhan Sedulur Sikep.

Penyusunan konsep pembangunan dan aplikasinya terhadap Sedulur Sikep seharusnya bisa menjadi bahan introspeksi aparat negara. Filosofi pembangunan harus diselidiki lebih dalam; pembangunan tentunya bukan hanya penggelontoran proyek-proyek yang tidak jelas maknanya. Penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus ditempatkan pada prioritas tertinggi.

4 “*Dumunung”* = jelas letak dan maknanya

4

KEMISKINAN MENURUT CARA PANDANG MASYARAKAT ADAT

Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Bentek, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Barat – NTB

Oleh : Kamardi

Tentang Nusa Tenggara Barat (NTB)

Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di kawasan timur Indonesia; memiliki penduduk 4,1 juta jiwa. NTB bisa digolongkan sebagai provinsi kepulauan; dengan P. Lombok dan P. Sumbawa sebagai pulau utama. Masyarakat NTB adalah masyarakat yang plural, baik dilihat dari keragaman suku bangsa maupun agama dan kepercayaan.

Pertumbuhan ekonomi NTB cenderung lebih rendah bila dibandingkan dengan angka pertembuhan ekonomi nasional yang sekitar 6% per tahun. Tahun 2004, pertumbuhan ekonomi NTB adalah 4,66%, dan 4,19% pada tahun berikutnya. Pertumbuhan sektor riil agak lamban. Hanya 30% persen saja kredit perbankan yang disalurkan ke sektor riil, sedangkan selebihnya (70%) adalah untuk kredit konsumtif. Berdasarkan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 25,3% penduduk NTB tergolong miskin. Berdasarkan capaian IPM pula, NTB berada pada urutan ke 27 dari seluruh provinsi di Indonesia.

Perekonomian NTB digerakkan oleh usaha mikro kecil dan menengah. Survey Ekonomi Nasional (Susenas) 1996 menunjukkan bahwa 99,7% sektor usaha di NTB adalah usaha kecil; usaha Mikro tidak terdata. Ini menunjukkan bahwa potensi usaha kerakyatan di NTB sangatlah luar biasa.

Masyarakat Adat Desa Bentek : Desa Pertanian Yang Plural

Desa Bentek adalah salah satu desa di Kecamatan Gangga Kab. Lombok Barat, NTB; terletak 41 km dari pusat Kota Mataram ke arah utara. Desa Bentek, yang terletak di bagian utara P. Lombok ini, merupakan daerah lahan kering yang berbukit-bukit. Ketinggian wilayahnya bervariasi antara 12 dan 500 meter dari permukaan laut. Luas Desa Bentek adalah 3.727,586 hektar; wilayah yang cukup luas untuk sebuah desa. Desa ini berada di tepian hutan (hutan lindung). Desa Bentek terdiri atas 10 dusun.

Jumlah Penduduk Desa Bentek pada Agustus 2007 adalah 8206 jiwa atau 2304 KK. Masyarakat adat (MA) Desa Bentek terdiri atas tiga kelompok besar. Yang pertama adalah komunitas *Sanpak Kalipucak Barusatan* yang beragama "Bode" (Budha). Kedua adalah komunitas *Bebekeq Selelos* yang beragama Islam. Dan ketiga adalah komunitas masyarakat Hindu Bali; bertransmigrasi ke Bentek pada tahun 1963 setelah meletusnya Gunung Agung di P. Bali. Berdasarkan pengelompokan agama, penduduk Desa Bentek terdiri atas 57% penganut agama Islam, 30% penganut agama Budha, dan 13% penganut agama Hindu.

Desa Bentek merupakan desa pertanian. Penggunaan lahan di Desa Bentek adalah 59% perkebunan rakyat, 3% persawahan, dan sekitar 38% hutan lindung. Masyarakat sangat terbatas bisa memanfaatkan hutan lindung, karena merupakan hutan negara. Berdasarkan mata pencaharian maka komposisi penduduk Desa Bentek adalah 56% buruh tani, 18% petani pemilik, serta berbagai profesi lain (pegawai negeri, bidang transportasi, pekerja bangunan, dan berbagai usaha kecil mandiri yang lain).

Dengan potensi pertanian utama lahan kering maka Desa Bentek menghasilkan berbagai produk pertanian berikut ini: jambu mete, kelapa, cengkeh, kopi, vanili, cacao, bambu, mangga, rambutan, salak, nanas, dan pisang.

Asal Usul Dan Struktur Sosial

Pada mulanya penduduk Desa Bentek yang asli adalah berasal dari komunitas Masyarakat Adat Bebekeq (Nama Desa Bentek tahun 1930). Antara tahun 1965-1970 – setelah peristiwa usaha kudeta Pemerintahan RI pada akhir September 1965 yang kemudian dituduhkan Partai Komunis

Indonesia (PKI) sebagai pelaku upaya kude -- terjadi gejolak menyangkut pilihan kepercayaan pada masyarakat Desa Bentek; sebagai akibat dari gerakan-gerakan ikutan penumpasan masyarakat yang dituduh simpatisan PKI. Masyarakat Desa Bentek terpecah menjadi dua kelompok, yakni masyarakat yang tetap memeluk "Bode" dan masyarakat yang kemudian memilih agama Islam. Masyarakat yang tetap memeluk "Bode" belakangan disebut masyarakat beragama Budha, yang mengelompokkan diri menjadi komunitas besar yang melingkupi Sanpak di Desa Tegal Maja dan Panasan di Desa Tanjung (keduanya berada di Kecamatan Tanjung). Komunitas ini kemudian menyebar ke pusat-pusat kegiatan ritualnya di Desa Bentek yang meliputi tempat-tempat seperti Kalipucak, Baru dan Satan sehingga sampai saat ini induk besar komunitas "Bode" ini disebut *Sanpak Panasan Kalipucak Barusatan*. Kehidupan komunitas ini seringkali ditempatkan menjadi kelas-kelas di bawah mayoritas penduduk yang beragama Islam. Komunitas "Bode" tinggal di bagian lembah-lembah perbukitan dengan bermata pencaharian bertani ladang di kawasan pinggir hutan.

Kelompok kedua adalah kelompok masyarakat yang beragama Islam. Kelompok yang beragama Islam merupakan kelompok yang dominan di Desa Bentek; meliputi 57% dari seluruh penduduk di Desa Bentek. Kelompok ini memiliki akses yang kuat dalam Pemerintahan Desa Bentek. Meskipun menghasilkan banyak kalangan intelektual di Desa Bentek, sebagian besar dari masyarakat Islam Desa Bentek adalah masyarakat yang miskin.

Setelah Gunung Agung di P. Bali meletus, satu kelompok penduduk dari P. Bali yang beragama Hindu mulai tinggal di bagian ujung selatan Desa Bentek; tepatnya di Dusun Selelos. Kelompok ini hidup dari bercocok tanam dan berburu. Karena ulet dan tekun menghadapi tantangan alam, saat ini, kelompok ini memiliki tingkat kehidupan ekonomi yang lebih baik dan mapan bila dibandingkan dengan kelompok lain di Desa Bentek. Masyarakat Hindu Bali di Desa Bentek sangat memperhatikan soal kemajuan di bidang pendidikan.

Struktur sosial Masyarakat Adat di Desa Bentek berupa bentukan kelompok-kelompok masyarakat yang disebut Banjar. Banjar merupakan institusi lokal yang mengatur kehidupan sosial dan ekonomi. Di tiap dusun terdiri dari beberapa banjar; jumlah banjar di Desa Bentek adalah 27 buah. Banjar menata kerukunan dan keharmonisan kehidupan masyarakat sehari-hari. Banjar-banjar ini memiliki aturan local yang dipatuhi oleh warganya dan sangat potensial dalam mendukung kehidupan bermasyarakat,

beragama dan bernegara. Pola ini kemudian dilembagakan di tingkat desa yang disebut sebagai Majelis Krama Adat desa (MKAD). MKAD berfungsi dalam penegakan aturan; membantu tugas–tugas Kepala desa (Pemusungan) dalam melerai dan mendamaikan perselisihan antar warga desa.

Identifikasi Masalah-Masalah Pembangunan

Meskipun sejak 1969 pemerintah telah menyelenggarakan pembangunan untuk mengurangi kemiskinan melalui berbagai kegiatan dan program, tetapi harus diakui bahwa hasilnya belum memadai; angka kemiskinan di Desa Bentek tetaplah tinggi. Program-progam penanggulangan kemiskinan yang selama ini diselenggarakan, seperti bantuan beras untuk orang miskin (Raskin), subsidi bahan bakar minyak (BBM), bantuan langsung tunai (BLT), asuransi kesehatan untuk orang miskin (ASKESKIN), dll. belum menunjukkan hasil yang maksimal. Jumlah orang miskin terus bertambah.

Ilustrasi berikut adalah sebagai contoh jalannya suatu program pembangunan. Ketika program Raskin diluncurkan, maka masyarakat yang sebenarnya tidak miskin ngotot dan memaksakan diri agar digolongkan sebagai keluarga miskin dan mendapatkan surat keterangan miskin (SKM). Ini adalah contoh kelompok masyarakat yang tidak memiliki "budaya malu" lagi terhadap lingkungan di sekitarnya. Kerumitan klasifikasi dan prosedur berbagai program pengentasan kemiskinan tersebut – sementara target waktunya sangat mendesak – menyebabkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan itu kurang baik. Di Desa Bentek telah terjadi beberapa konflik antar masyarakat akibat dari kesenjangan pelaksanaan berbagai program pengentasan kemiskinan ini.

Masyarakat adat Desa Bentek, pada tahun 2006, telah berusaha secara rinci mengklasifikasikan beberapa penyebab kegagalan berbagai program pengentasan kemiskinan:

1. Banyaknya sumber data yang tidak sinkron dengan kenyataan di lapangan
2. Pendataan dilakukan oleh kalangan-kalangan tertentu, dan tidak dilakukan oleh masyarakat setempat.
3. Kerangka dasar dan indikator kemiskinan dibuat oleh instansi-instansi, tanpa melakukan konsultasi dengan masyarakat.

4. Pendataan kemiskinan seringkali hanya mempergunakan indikator tunggal.
5. Perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dilakukan secara top down, dan bukan bottom up.

Harus diakui bahwa program-program pembangunan, khususnya program-program pengentasan kemiskinan, memiliki masalah yang rumit, baik prosedur, struktur, operasional, maupun akuntabilitasnya. Program-program ini, kalau tidak hati-hati, menyebabkan konflik yang keras di masyarakat; beberapa kantor desa telah dirusak warga karena dianggap lalai melaksanakan program pengentasan kemiskinan; petugas sensus kemiskinan dikeroyok warga; tidak sedikit kepala desa yang menjadi pelampiasan kekesalan masyarakat karena dianggap tidak transparan.

Masyarakat adat Desa Bentek merinci sebab dan akibat dari kemiskinan sebagai berikut:

a) Bidang Kesehatan; karena jarangnya penyuluhan tentang kesehatan maka masyarakat Desa Bentek sering mengalami sakit-sakitan, sehingga berdampak pada penghasilan yang tidak menentu, serta berdampak pada lingkungan yang tidak terawat dan bersih.
b) Bidang Pendidikan; rendahnya pendidikan adalah penyebab timbulnya kemiskinan, akibatnya masyarakat hanya bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan sebagai buruh tani. Akibat dari rendahnya pendidikan maka mutu teknologi pengolahan hasil pertanian masih bersifat tradisional dan tidak berkembang.
c) Bidang Agama sosial dan budaya; di Desa Bentek tedapat 3 (tiga) mayoritas agama, yaitu Budha, Hindu dan Islam. Hasil analisis faktor kemiskinan oleh masyarakat, muncul bahwa biaya ritual yang tinggi menjadi penyebab kemiskinan; ini paling banyak terjadi pada masyarakat yang beragama Hindu dan Budha, maka akibatnya untuk memenuhi kebutuhan ritual tersebut mereka harus merelakan diri untuk berhutang kepada rentenir walaupun dengan jumlah yang cukup besar.
d) Bidang Ekonomi; bebera faktor penyebab masyarakat Desa Bentek miskin secara ekonomi adalah harga hasil panen menurun, tidak adanya keterampilan, tidak adanya modal usaha, dll.

Kesejahteraan Menurut Masyarakat

"Amaq Budiman adalah seorang pengusaha hasil bumi yang tingkat pendidikannya hanya Sekolah Dasar, kehidupan sehari-harinya serba berkecukupan. Dia memiliki mobil yang dipergunakan untuk mengangkut hasil bumi tersebut. Rumah mewah dengan lantai keramik dan beratapkan genteng yang mahal. Amaq Budiaman tidak pernah memiliki waktu untuk beristirahat, ia bekerja terus setiap hari, serta tidak memiliki keluangan waktu untuk berkumpul dengan anak dan istrinya hanya untuk mengurus bisnisnya.

Di sisi lain untuk mengembangkan bisnisnya Amaq Budiman meminjam dana sebagai modal untuk usahanya di bank dengan nilai yang cukup besar. Nah, itulah alasan kuat Bapak Budiman untuk terus bekerja siang dan malam".

Kutipan di atas adalah bagian dari pernyataan salah satu warga Bentek yang menjadi peserta diskusi tentang kesejahteraan MA Desa Bentek. Kutipan ini menggambarkan pandangan masyarakat tentang apa itu yang disebut sebagai sejahtera. Hidup yang berkecukupan seperti yang tergambar dalam ilustrasi di atas adalah dambaan setiap manusia. Memiliki usaha yang bagus, modal yang besar, memiliki fasilitas yang memadai seperti Mobil, rumah mewah, pendidikan tinggi. Tetapi masyarakat di Desa Bentek tidak mengukur kesejahteraan hanya dari dari sisi materi atau harta kekayaan yang dimiliki. Tetapi hidup sejahtera dalam versi masyarakat adat tersebut berdasarkan ciri-ciri adalah sebagai berikut :

- Punya kendaraan
- Punya rumah
- Dapat makan 3 kali sehari
- Bisa sekolah sampai perguruan tinggi
- Bisa berkumpul setiap hari dengan keluarga
- Hidup tenang
- Berwisata (piknik)

Kesejahteraan menurut MA Desa Bentek memiliki dua kategori; yakni sejahtera berdasarkan kondisi lahiriah (materi) dan sejahtera berdasarkan kondisi batiniah. Sejahtera lahiriah merupakan kondisi dan faktor yang lumrah terjadi bagi setiap insan. Sejahtera batiniah merupakan tiga kategori pada akhir ciri-ciri hidup sejahtera versi masyarakat pada

paragraf sebelumnya (bisa berkumpul setiap hari dengan keluarga, hidup tenang, berwisata).

Ketiga kategori yang menjadi tolak ukur sejahtera batiniah dirinci sebagai berikut:

a) Hidup Tenang

Menentukan tolok ukur hidup tenang bukanlah hal yang mudah. Ketenangan itu belum tentu hanya dimiliki oleh mereka yang serba kecukupan, atau hanya dimiliki oleh mereka yang berada di lingkaran kesengsaraan. Oleh karena itu indikator ini muncul dari perasaan yang paling dalam masyarakat adat. Karena mereka menggambarkan dengan memiliki harta berlimpah justru akan menjadi beban pikiran kita sehingga ketenangan hidup terganggu. Sebaliknya, ketidaktenangan muncul sebagai reaksi dari ketidakberdayaan secara ekonomi. Rasa hidup tenang akan muncul setelah terpenuhinya kebutuhan pokok yang mendasar secara lahiriah (kecukupan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan serta kepemilikan lahan dan ternak).

b) Dapat berkumpul setiap hari dengan keluarga

Keluarga adalah suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga keluarga merupakan tanggung jawab secara lahiriah dan batiniah. Banyak orang yang jarang bertemu dan berkumpul dengan keluarga karena kesibukan, sehingga apapun yang didapatkan akan terasa kurang bilamana tidak dapat berkumpul dan bersama-sama dengan keluarga. Walaupun kehidupan sehari-hari menjadi buruh tani, namun akan terasa lengkap apabila keluarga mendukung dan memberi motivasi; mereka terus berada di samping kita dikala kita sakit, susah dan bahagia.

c) Berwisata (piknik)

Wisata melepas beban pikiran dari kegiatan rutin sehari-hari cukup penting. Kategori ini sangat menarik dan luar biasa, karena dimunculkan oleh masyarakat dari pinggir hutan yang sebagian besar miskin.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Konsep Kesejahteraan Yang Berlaku Sekarang

Konsep kesejahteraan yang berlaku di Indonesia saat ini masih dalam tataran ideal dan bersifat parsial. Karena itu berbagai kebijakan

pembangunan dan pengentasan kemiskinan selalu menitikberatkan pada konsep ekonomi kapitalis global. Kenyataan di lapangan adalah konsep tersebut hanya berlaku pada sekelompok elit tertentu yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri atau sekelompok orang saja. Akibatnya masyarakat miskin tetap terkungkung dalam kondisi kemiskinan serta menjadi objek penderita.

Konsep-konsep kesejahteraan yang mengarusutamakan pada pertumbuhan ekonomi telah menimbulkan implikasi negatif pada nilai-nilai tradisional yang selama ini menjadi pegangan dan harapan masyarakat adat. Kalaupun ada perhatian pemerintah terhadap nilai-nilai ini, dipastikan itu dilatarbelakangi oleh kepentingan sosial ekonomi politik tertentu.

Untuk membangun konsep kesejateraan yang memiliki keberpihakan dan keadilan, maka:

1. perlu ada kehendak politik yang kuat untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat;
2. perlunya perbaikan pengelolaan anggaran dengan mengalihkan pengeluaran tidak produktif dan memperbesar pengeluaran yang dinikmati oleh sebagian besar masyarakat;
3. perlunya dukungan dan peran-serta seluruh pelaku pembangunan.

Kemiskinan Menurut Masyarakat Adat

Masalah kemiskinan di Indonesia sangatlah beragam, karena Indonesia memiliki wilayah yang luas dan memiliki budaya yang beragam, sehingga karakteristik kemiskinan mempunyai perbedaan antara satu wilayah atau masyarakat dengan wilayah atau masyarakat lainnya. Satu hal penting dalam sistem penanggulangan kemiskinan adalah untuk dapat memahami kemiskinan dan persoalannya berdasarkan suara dan penilaian masyarakat miskin itu sendiri, sehingga dapat dirumuskan strategi dan program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat dan efektif.

Dalam bahasa setempat, menurut masyarakat adat Desa Bentek, pengganti kata "miskin" adalah *"bangkang"* atau *"bilai"*; yang maknanya "miskin" atau "sangat miskin".

Masyarakat adat Desa Bentek menggolongkan strata sosial dalam 3 kategori, yaitu kaya, sedang dan miskin. Warga masyarakat disebut

kaya apabila berpenghasilan lebih dari Rp. 1.500.000,00; digolongkan sedang apabila berpenghasilan Rp. 750.000,00 s/d Rp. 1.500.000,00; dan digolongkan miskin apabila berpenghasilan kurang dari Rp. 750.000,00.

Berdasarkan analisis kemiskinan partisipatif (AKP) di Desa Bentek tahun 2006, sebaran penghasilan masyarakat yang miskin adalah sebagai berikut:

	Penghasilan per Bulan	Jumlah Keluarga Miskin
1	50.000 – 100.000	196 KK
2	101.000 – 200.000	56 KK
3	201.000 – 300.000	242 KK
4	301.000 – 750.000	438 KK

Masyarakat Bentek berpendapat bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari kebendaan (materi), tetapi juga diukur dari non kebendaan (immaterial), seperti miskin ilmu, miskin akhlak (adat), miskin kesehatan, miskin pengetahuan, dan miskin dari rasa keadilan.

Kondisi kemiskinan digolongkan menjadi tiga, yakni: kemiskinan struktural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan absolut. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat adat di desa. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang tumbuh karena berbagai perilaku negatif, seperti: malas, boros, gengsi, tidak jujur, tidak percaya diri, dll. Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang diwarisi secara turun temurun:

a. Kemiskinan Struktural

- Penyebab kemiskinan adalah ketidak-adilan struktural maupun kebijakan yang berdampak pada kelompok miskin.
- Proses pemiskinan terjadi manakala formasi sosial yang terbentuk membatasi akses dan peluang bagi orang miskin untuk bisa mendayagunakan sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.
- Kemiskinan politik timbul akibat kebijakan yang semakin memiskinkan. Sebagai contoh adalah kasus petani cengkeh yang tiba-tiba miskin karena ketidakberdayaan mereka menghadapi monopoli ekonomi yang diciptakan pemerintah dalam pemasaran cengkeh.
- Berikut ini adalah perian sebagai ilustrasi: (i) keterbatasan aset tanah petani Sasak melahirkan *petani gurem* yang sekalipun mereka rajin, mereka tetap miskin, oleh karena terbatasnya

luas lahan yang mereka miliki; (ii) nelayan terus berada dalam kondisi miskin, bukan karena mereka malas bekerja, tetapi lebih disebabkan oleh belitan struktural baik yang disebabkan oleh alam, keterbatasan aset peralatan, jeratan kaum juragan, maupun dampak kebijakan.

b. Kemiskinan Kultural

- Menyangkut ketimpangan akses dan perlakukan diskriminatif terhadap kelompok yang sudah miskin sehingga menjadi semakin miskin dan marjinal karena proses pemiskinan.
- Kemiskinan budaya menjelaskan munculnya suatu budaya akibat penderitaan ekonomi yang berlangsung lama. Budaya kemiskinan ini seperti sikap pasrah, kemalasan yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya

c. Kemiskinan Absolut

- Penyebab kemiskinan adalah karena merupakan faktor alamiah dari garis keturunan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan.
- Kemiskinan semacam ini berlangsung dalam garis keturunan secara turun temurun.

TANGGAPAN MASYARAKAT TERHADAP KONSEP PENANGGULANGAN

Kemiskinan Yang Berlaku Sekarang

Masalah utama pembangunan di Desa Bentek adalah dipraktikkannnya konsep penanggulangan kemiskinan yang berorientesi pada pembangunan fisik belaka, serta diwujudkan dalam bentuk proyek-proyek pembangunan. Kondisi ini mengabaikan keberlanjutan dari konsep penanggulangan kemiskinan itu sendiri, sehingga praktis tidak mengatasi problem kemiskinan itu sendiri, serta jumlah penduduk desa yang miskin tetaplah besar.

Konsep penanggulangan kemiskinan melalui di sektor pendidikan juga hanya berorientasi kepada pembangunan fisik sekolah tanpa mendorong kesadaran dan daya beli masyarakat, sehingga mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Meskipun dinamika kehidupan politik masyarakat sangat tinggi, namun kelompok masyarakat dari kalangan pendapatan yang rendah banyak yang putus sekolah dan tidak mampu melanjutkan ke bangku SMP.

Masyarakat adat Desa Bentek berpendapat bahwa:

1. Bantuan yang bersifat karitatif tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan, dan justru menambah parah kemiskinan;
2. Bantuan-bantuan langsung seperti BLT, RASKIN, GAKIN tidaklah cukup menyelesaikan persoalan kemiskinan justru menciptakan ketergantungan;

FAKTOR-FAKTOR YANG MENENTUKAN MASYARAKAT ADAT BISA

Sejahtera Dan Miskin

Ukuran tentang sejahtera dan miskin merupakan satu kajian yang sangat sulit; artinya bahwa berbagai versi dalam tatanan masyarakat dan pemerintah selalu berbeda. Berbagai kalangan mencoba merumuskan definisi tentang kemiskinan itu serta seperti apa ukuran sejahtera itu. Pemerintah, melalui dinas-dinas terkait, berlomba untuk merumuskan definisi dan menentukan indikator kemiskinan dan kesejahteraan di

masyarakat. Dinas Kesehatan misalnya menentukan sebuah indikator kemiskinan berdasarkan faktor-faktor kesehatan; sangat berbeda dengan dinas-dinas yang lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian, dll. Perbedaan-perbedaan indikator antar instansi ini menyebabkan data dan formulasi yang dibuat untuk menentukan ukuran masyarakat itu sejahtera dan miskin menjadi tumpang tindih. Hal ini sering berakibat pada runyamnya tatanan sosial kemasyarakatan sehingga tidak jarang muncul konflik dan perseteruan ketika pemerintah memunculkan program pengentasan kemiskinan untuk masyarakat. Sangatlah jelas bahwa masyarakat hanya dijadikan objek pendataan dan program, dan bukan pelaku atau subyek. Penentuan kriteria masyarakat itu miskin atau kaya, ada indikasi, terjadi manipulasi di belakang meja yang hanya untuk kepentingan proyek.

Apabila secara transparan masyarakat diajak secara bersama-sama mulai dari perumusan konsep kegiatan, membuat kebijakan, sampai pada implementasinya, mungkin setiap program pemerintah akan berjalan tanpa ada konflik dan masalah. Karena setiap program yang turun ke masyarakat adalah produk yang dihasilkan berdasarkan kemauan dari pemeritah sendiri, bukan semata kemauan serta keinginan dari masyarakat yang menentukan pilihannya dalam pembangunan selama ini.

Sangatlah berbeda ketika kita bersama membahas dan menentukan kriteria sejahtera dan kriteria miskin dari komunitas masyarakat adat. Karena ketika kita berbicara tentang masyarakat adat yang terekam dalam pikiran kita adalah bahwa masyarakat adat adalah sekelompok orang yang paling miskin, paling kotor dan semua pikiran negatif. Namun sebenarnya kalau kita telusuri lebih jauh, bahwa kondisi masyarakat adat sama dengan kehidupan kita yang ada di lingkungan kota. Masyarakat adat juga melaksanakan sebuah aturan yang mereka sepakati dan mereka yakini harus di taati. Hanya saja persoalan yang membedakan adalah teritorial, serta ketidak berpihakan pemerintah terhadap komunitas ini.

Berdasarkan hasil survey serta kompilasi data dari kegiatan AKP (Analisis Kemiskinan Partisipatif) serta hasil survey dengan kategori pendapat kaum laki-laki dan perempuan, maka terdapat beberapa tolak ukur/indikator kesejahteraan dan kemiskinan. Adapun beberapa penyebab–penyebab kemiskinan di Desa Bentek diklasifikasikan ke dalam dua kategori: :

Laki-laki	Perempuan
• pendidikan rendah	• kurang penyuluhan oleh pemerintah
• biaya ritual tinggi	• tidak punya pekerjaan dan keterampilan
• kurang penyuluhan kesehatan	• penghasilan pas-pasan dan tidak tetap
• lahan kering	• susah mencari buruhan
• hasil produksi rendah	• sering begawe (acara tasyakuran)
• tidak ada modal usaha	• lingkungan kotor
• harga hasil produksi pertanian rendah	• SDM rendah
• kurangnya pembinaan pemerintah	• faktor keturunan
• pasar jauh	• berhutang
• jalan rusak	• tidak adanya modal usaha
• tidak punya lahan	• kurang optimalnya kelompok pengairan
• kurangnya sarana dan pelayanan kesehatan oleh petugas	• biaya pendidikan tinggi
• tidak ada lapangan pekerjaan	• kurangnya lapangan pekerjaan
• tidak punya keterampilan	• harga hasil produksi pertanian rendah
• hutang TKI	• ongkos buruh murah
• pekerjaan berburuh	• permainan pelaku usaha
• penghasilan pas-pasan	• fasilitas jalan rusak
• sakit-sakitan	• sakit-sakitan
• menjadi buruh musiman	• tidak punya lahan pertanian
• sering kawin	• banyak anak
• tidak dipercaya pengusaha	• panen musiman
• tidak punya warisan	• tidak punya rumah
• ongkos buruh murah	• janda
• tidak ada pekerjaan	

Selain faktor-faktor kemiskinan yang didasarkan hasil AKP tersebut, ada beberapa faktor yang lebih mendasar yang diungkapkan oleh masyarakat adat di Desa Bentek, yaitu :

- **Malas**

Bukanlah menjadi suatu hal yang baru ketika kita memunculkan indikator bahwa ketidakberdayaan kita secara ekonomi, pendidikan dan kesehatan itu adalah malas. Malas dilambangkan sebagai sikap masa bodoh terhadap diri sendiri, tidak perduli dengan keluarga, tidak mau bekerja, selalu berfikiran dapat makan saja syukur dan sebagainya. Sehingga budaya itulah yang berkembang dan beranak pinak menjadi komunitas-komunitas malas.

- **Tidak jujur**

Siapapun di dunia ini tidak ingin berbohong dan siapapun di dunia ini tidak ingin dibohongi. Dalam persoalan tidak jujur masyarakat adat di Desa Bentek menilai bahwa penyebebab kita miskin itu bukan hanya bersumber dari persoalan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Tetapi lebih bersumber dari sikap, etika dan perilaku hidup. Ilustrasinya adalah ketika kita sering berbohong kepada orang lain atau sering tidak jujur terhadap siapa saja, maka imbasnya adalah orang tidak akan senang dengan kita dan menjauhi kita. Akibatnya adalah kita tidak punya teman, sahabat, kerabat karena orang bersikap skeptis terhadap kita. Maka secara batin kita akan tersiksa, merasa tidak teneng, dan tidak ada tempat mengadu

- **Tidak percaya diri**

Negara-negara Barat yang justru kekayaan sumber alamnya sangat terbatas bila dibandingkan negara kita kenapa maju dan berkembang? Kenapa orang-orangnya sukses? Masyarakat adat Bentek berpendapat bahwa tidak percaya diri adalah faktor terjadinya kemiskinan.

Ketika kita memiliki suatu ide, gagasan yang sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki hajat hidup secara ekonomi dengan membutuhkan modal yang besar, sering kali kita kita menjadi ragu-ragu dan tidak pecaya diri. Misalkan kita ingin mendapatkan suatu pinjaman uang atau permodalan dari bank, kita justru melihat bank sebagai sesuatu momok yang menakutkan. Atau ketika kita berusaha kita selalu berpikiran "jangan-jangan". Jangan-jangan aku rugi, jangan-jangan barang aku gak laku. Sehingga itu terus yang berkembang dalam pikiran kita, maka kondisi psikis akan menjawab bahwa untuk keluar dari zona ketidaknyamanan kita memang tidak percaya diri.

- **Munculnya berbagai program pemerintah menyebabkan banyak orang yang mengaku diri miskin**

Ini adalah sebuah gambaran nyata yang terjadi di masyarakat. Janganlah heran kalau setiap tahun data masyarakat miskin bukannya berkurang, tetapi malah bertambah. Misalkan saat pemerintah menurunkan program Raskin, orang akan berbondong-bondong ke rumah kepala dusun untuk meminta namanya dimasukkan sebagai penerima manfaat Raskin, walaupun sebenarnya mereka orang yang serba kecukupan sandang, pangan dan papap. Lain lagi misalkan dalam pembuatan SKM (Surat keterangan Miskin), tidak sedikit dari masyarakat menyembunyikan sifat malunya hanya untuk mendapatkan secarik kertas bertuliskan "Surat Keterangan Miskin". Sehingga itulah yang akan disodorkan oleh mereka ke Puskesmas untuk berobat, atau untuk mendapatkan beasiswa.

- **Berlebihan dalam pengeluaran tanpa melihat kemampuan finansial**

Masyarakat Desa Bentek merupakan masyarakat yang masih syarat kekentalan adatnya, sehingga dikategorikan sebagai desa adat. Masyarakat masih melaksanakan prosesi-prosesi ritual yang dilakukan secara turun-temurun. Lalu seperti apa hubungannya kemiskinan dengan kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat disana serta dikaitkan dengan ritual?

Seringkali orang tidak ingin dianggap tidak memiliki apa-apa, atau orang tidak ingin dianggap miskin. Maka yang terjadi adalah masyarakat akan melakukan apapun untuk menjaga image bahwa mereka tidak miskin, mampu, dan sebagainya. Orang tidak takut berhutang untuk membeli motor padahal daya beli untuk memiliki motor sebenarnya tidak ada. Orang ingin acara prosesi adatnya besar dengan memotong 3 ekor sapi, padahal kemampuannya hanya mampu dengan seekor sapi saja. Maka inilah yang dikatakan sebagai pemaksaan nurani demi menutupi yang dikatakan aib sendiri.

- **Adanya budaya gengsi**

Budaya gengsi telah sangat mengakar di masyarakat. Kondisinya hampir sama dengan memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhannya secara finansial. Namun gengsi lebih mengkotak-kotakkan diri. Misalkan hanya mau bergaul dengan dengan orang kaya. Kalau belum motor maka isi rumah belum diangap cukup. Kalau tidak punya televisi rela berhutang. Maka di komunitas masyarkat adat kondisi semacam inipun masih terjadi, walaupun tidak semuanya.

Ukuran sebuah kemiskinan ternyata tidak hanya dilandaskan pada persoalan ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan berbagai diskusi kualitatif, penyebab kemiskinan adalah miskin hati, miskin etika dan tata krama (miskin adat).

Hubungan Sistem Adat Dan Kemiskinan -Kesejahteraan

Di Desa Bentek tedapat tiga mayoritas agama, yaitu Budha, Hindu dan Islam. Dari hasil analisis faktor kemiskinan oleh masyarakat, muncul bahwa biaya ritual yang tinggi menjadi penyebab kemiskinan, dan ini paling banyak terjadi pada masyarakat yang beragama Hindu dan Budha. Untuk memenuhi berbagai kebutuhan ritual di agama Hindu dan Budha, mereka harus merelakan diri untuk meminjam uang/berhutang kepada rentenir walaupun dengan jumlah bunga yang cukup besar.

Kebiasaan melaksanakan ritual merupakan prosesi adat yang biasa dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat adat di desa Bentek. Di Desa Bentek terdapat berbagai lembaga yang non struktural (lembaga teknis) di bawah pemerintahan desa yang merupakan bagian dari sistem nilai adat yang bekembang di masyarakat, antara lain :

1. Kelompok Masyarakat Pengelola Lingkungan (KMPL)

Kelompok ini terbentuk atas inisiatif bersama masyarakat sekitar kawasan hutan Pandanmas yang beranggotakan ratusan orang petani penggarap lahan hutan. Masyarakat mengelola hutan secara sistematis dan ada mekanisme lokal yang dikenal dengan awig-awig untuk dijalankan dalam pengelolaan hutan tersebut.

Dalam mekanisme pengelolaannya, KMPL ini membagi kawasan-kawan hutan yang di kelola rakyat dalam bentuk blok-blok terpisah. Sehingga semua anggotanya mendapatkan lahan garapan. Dan tidak sembarangan tanaman yang dapat di tanam. Selain tanaman-tanaman perkebunan juga diharuskan menanaminya dengan kayu-kayuan agar hutan tetap lestari dan terjaga dari kemungkinan-kemungkinan bencana alam yang terjadi.

Pada hari-hari tertentu kelompok ini memiliki acara-acara ritual dan selamatan dengan mengumpulkan seluruh anggota dan masyarakat disekitarnya.

2. Kelompok Pemakai Air (Pokmair) dan Subak.

Untuk menjawab kebutuhan sumber daya air (irigasi dan rumah tangga), masyarakat membentuk lembaga-lembaga yang dikhususkan untuk pengelolaan dan pemanfaatan air, misalnya kelompok pemakai air bersih yang ada di San Baro, KBPH Semenjer yang terdapat di Dusun Batu Ringgit dan kelompok Subak Kakong Dusun Batu Ringgit dan Subak Todo .

Setiap tahun Subak ini memiliki acara selamatan Jelinjing (selamatan parit irigasi). Sistem subak yang berada pada saluran tersier berbeda dengan subak Kakong yang berhubungan langsung dengan mata air, sehingga di samping ritual selamat jelinjing setiap tahunnya pada setiap 5 tahun ada upacara ritual selamatan Dam mata air dengan kewajiban harus memotong kerbau lengkap dengan kebutuhan sesajian lainnya serta makan bersama di tempat mata air tersebut.

3. Banjar-banjar

Dilahirkan atas dasar kebutuhan bersama senasib dan sepenanggungan, maka di setiap dusun/ kampung terdapat banjar-banjar yang sangat berperan aktif di tengah masyarakat. Banjar merupakan institusi masyarakat adat yang berfungsi menjembatani urusan-urusan sosial ekonomi dan politik bercirikan kekentalan kekerabatan`, dengan sistem swadaya dan gotong royong.

Kekompakan dalam gotong royong tampak jelas manakala ada hajatan-hajatan dan musibah yang menimpa salah satu angota Banjar .

Ada dua upacara adat dalam ritual besar untuk menjalankan apa yang disebut sebagai bagian dari Adat Krama (adat perkawinan) dan Adat Gama (upacara adat yang berkaitan dengan agama). Upacara-upacara ini disebut Gawe yang dibagi menjadi Gawe Ala dan Gawe Ayu .

Gawe Ala adalah upacara-upacara ritual yang berkaitan dengan upacara kematian yang membutuhkan pembiayaan tidak sedikit mulai dari rangkaian acara penguburan-selamatan nyusur tanah-7 malam tahlilan, upara hari ke 7, hari ke-9, hari ke-40, hari ke-100, nekolang hingga hari ke 1000 atau menyoyang (mengakhiri semua urusan dengan yang meninggal).

Gawe Ayu adalah upacara-upacara ritual yang berkaitan dengan upacara hidup (terkadang disebut gawe urip). Upacara-upara ini seperti upacara cukur rambut, asah gigi, sunatan, pesta perkawinan, dan lain-lainnya.

Demikian juga dalam kategori upacara adat gama (gawe 'gama) seperti hari-hari besar agama (lebaran, Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, dll.)

Dalam perkembangannya, institusi banjar tidak hanya berorientasi pada acara adat krama dan adat gama, tetapi berperan juga menjadi bagian dari lingkar inti yang membantu pemerintah desa dalam menyalurkan Raskin dan menjadi media-media urusan pemerintahan lainnya.

4. Lembaga-lembaga Keagamaan

Lembaga-lembaga keagamaan berkembang dalam waktu yang hampir bersamaan. Ada NW, NU dan Muhammadiyah, bahkan ada juga kelompok-kelompok jamaah tablig yang menjadi bagian dari masyaralat Desa Bentek. Juga lembaga-lembaga keagamaan lainnya yang berasal dari agama Hindu dan Budha. Lembaga-lembaga keagamaan ini sangat berperan sebagai barometer dalam pengembangan di bidang agama
Selain itu pula setiap masjid yang ada di setiap Dusun memiliki pengurus masjid dengan dibantu oleh pengurus-pengurus organisasi remaja masjid.

5. Lembaga Adat

Dalam komunitas masyarakat hukum adat terdapat lembaga-lembaga adat yang muncul dan lahir secara alamiah. Karena kelembagaan adat ini tidak seperti lembaga-lembaga yang lainnya, tetapi memiliki keunikan tersendiri, sebab merupakan lembaga-lembaga yang secara turun temurun ada sejak zaman nenek moyang.
Peran lembaga adat ini sangat besar, terutama dalam pelestarian dan penjagaan terhadap pawang-pawang (hutan) adat yang ada di beberapa titik kawasan hutan yang kita kenal dengan hutan adat.
Keberadaan Lembaga adat dalam perkembangannya didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang dipimpin oleh mangku-mangku yang fungsi dan perannya juga bersama Pemusungan (kepala Desa); Penghulu untuk melaksanakan adat perkawinan, pembagian warisan dan penyelsaian sengketa-sengketa lainnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hukum adat.

Lembaga-lembaga tersebut muncul berdasarkan nilai kebutuhan. Lembaga-lembaga adat ini memiliki aturan lokal yang disebut awig-awig. Aturan tersebut diberlakukan sebagai wujud komitmen dalam melaksanakan sistem adat dan nilai di masyarakat. Selain itu perwujudan dari beberapa lembaga seperti banjar-banjar di tiap dusun, lembaga adat lebih dominan pada acara-acara ritual. Seperti banjar misalnya perannya sangat penting untuk memfasilitsi prosesi acara kematian atau prosesi acar tasyakuran. Juga lembaga-lembaga adat yang ada sangat berperan penting dalam prosesi ritual adat yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Misalnya lembaga adat di Bebekek, Buani, Baru Murmas dan lain sebagainya.

Dalam prosesi ritual atau acara-acara adat dan hajatan di kampung-kampung, tidak sedikit biaya yang dibutuhkan. Karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat adat Desa Bentek adalah dalam pelaksanaan acara begawe atau tasyakuran harus mengundang seluruh anggota banjar dan jumlahnya cukup banyak dan yang dijamu dengan aneka ragam makanan mulai dari jenis kue tradisional hingga jenis kue modern. Pada acara ini pos pembiayaan yang punya hajatan sangat tinggi mulai dari persiapan acara di mana warga banjar tempat tinggalnya adalah sebagai tenaga kerja yang mengerjakan segala yang dibutuhkan 3-4 hari sebelum puncak acara, dan keseluruhan warga banjar yang bekerja ini dijamu untuk makan siang dan malam harinya (bahasa sasak = *periap*).

Dapat kita bayangkan betapa besar biaya yang dibutuhkan untuk acara-acara semacam itu; belum lagi mereka harus memotong hewan kurban. Satu ekor sapi saja bisa dikatakan tidak cukup dalam prosesi adat itu; minimal dua ekor sapi untuk dipergunakan dalam acara tersebut yang akan disuguhkan kepada semua undangan yang hadir.
Menariknya lagi ketika akan dilaksankan acara *begawe* semacam itu, tidak mengenal apakah orang tersebut kaya atau miskin, kondisi acaranya tidak jauh berbeda, suguhannya pun juga tidak jauh berbeda. Orang kaya memotong kerbau, si miskin pun memotong kerbau.
Inilah kondisi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan terjadi secara turun temurun. Bahkan untuk melaksanakan prosesi tersebut masyarakat rela untuk meminjam uang, menggadaikan apa yang dimiliki, serta menjual harta keluarga. Sehinggab biaya ritual tinggi menjadi sebuah kebiasaan turun temurun, yang berdampak pada tingkat ekonomi masyarakat.

Ketika acara sudah selesai tergambar di wajah mereka *rasa puas dan bahagia* yang begitu mendalam, acara berjalan dengan lancar, undangan hadir semua, sanak saudara dan kerabat juga hadir dalam acara tersebut. Juga keyakinan semakin bertambah serta apa yang dilaksanakan merupakan suatu perwujudan dari rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, ibadah karena telah memberikan rizki yang dimiliki kepada orang lain, juga media *ukhuwah islamiyah* (silaturrahmi).

Rasa sejahtera yang ditimbulkan dari ritual adat dan agama (kesejahteraan batin) oleh komunitas Masyarakat Adat adalah :

- Adanya kepuasan batin dapat menunaikan kewajiban karena keterikatan secara kultur (rasa terbebaskan terhadap tanggung jawab adat), misalnya komunitas Budha masih merasa berutang kewajiban kepada alam yang memberi kehidupan bagi mereka kalau ritual *"Nunas Kaya"* dan *"Muleq Kaya"* belum dilakukan. Komunitas muslim merasa hidup tidak tenang karena memikirkan arwah keluarganya yang meninggal dunia belum di *"Soyang"* (belum diupacarakan untuk terakhir kali, biasanya terhitung dari 1000 hari ke atas setelah prosesi hari ketujuh, hari kesembilan, hari keempatpuluh ,hari ke seratus, dan ritual-rual penyela lainnya. Demikian juga komunitas Hindu yang terkenal dengan banyak acara ritualnya sisi lain dapat memberikan spirit dalam etos kerja.
- Dapat berkumpul dan bersilaturrahmi dengan keluarga dan kerabat dekat merupakan kewajiban yang diharuskan baik secara agama maupun secara adat, sebuah keluarga dikucilkan secara adat (sosial) dan menjadi bahan omongan manakala keluarga itu tidak menciptakan keharmonisan dengan keluarga lainnya.
- Dapat berbagi rizki/makanan dengan kerabat lainnya, adanya kewajiban untuk memberi antar sesama dan menimbulkan rasa mengayomi keluarga lainnya walaupun setiap hari tidak dapat memberi namun ada rasa tuntutan batin harus pernah memberikan sesuatu kepada orang lain.
- Ritual sebagai perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kontek adapt, budaya rasa sukur tidak cukup hanya dengan lisan, namun perlu diwujudkan dalam bentuk upacara ritual dan kalimat syukur itu diucapkan berbarengan dengan acara ritual.

Tidak sebanding dengan nilai kepuasan batin yang sulit diukur, nilai negatif yang ditimbulkan oleh acara adalah sebagai sebuah pemborosan, yang menyebabkan kemiskinan yang berdampak pada:

- timbulnya hutang;
- hidup dalam pas-pasan tanpa memperhatikan gizi makanan karena sebagaian penghasilan disimpan untuk persiapan ritual adat *begawe*;
- menggadaikan hak miliknya untuk kepentingan ritual;
- budaya Gengsi

5

MENGUKUR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ADAT TANA AI, NUSA TENGGARA TIMUR

Oleh: Nus Ukru

Letak dan Sumber Kehidupan Masyarakat Adat Tana Ai

Tana Ai adalah salah satu wilayah persekutuan masyarakat adat yang berada di Pulau Flores; tepatnya di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Persekutuan adat Tana Ai tersebar di 18 desa Kec. Talibura. Jumlah penduduk persekutuan masyarakat adat ini adalah 27.713 jiwa[1] atau lebih dari 6.500 keluarga.

Salah satu desa yang termasuk dalam persekutuan adat Tana Ai ini adalah Desa Nangahale – tempat studi kasus ini berlangsung. Desa ini terletak di bagian timur Kabupaten Sikka; kurang lebih 35 km arah timur dari Kota Maumere (ibukota Kab. Sikka). Di sebelah utara, Desa Nangahale berbatasan langsung dengan Laut Flores. Nangahale adalah desa yang cukup padat untuk ukuran P. Flores; penduduknya berjumlah 644 keluarga.

Pada umumnya masyarakat adat Tana Ai bermata pencaharian sebagai petani -- terutama petani penggarap ladang – yang masih bercocok tanam dengan teknik tradisional; hanya sebagian kecil saja yang bermata pencaharian nelayan. Masyarakat Tana Ai mengenal pola pertanian campuran (*polyculture*) yang masih mempertahankan penggunaan benih-benih lokal, seperti padi, jagung, ubi kayu, pisang dan kacang-kacangan. Masyarakat Tana Ai juga menanam berbagai tanaman tahunan, seperti *pau paranbeda, gelo, kabor*, damar, pohon alpukat, pohon ara nonang, mage, peli, kopi, dan sebagainya. Keadaan alam atau topografi wilayah Tana Ai

1 Data diperoleh dari Organisasi Masyarakat Adat Flores (ORMAF)

cenderung berbukit-bukit di mana bagian utaranya berbatasan langsung dengan pantai. Lahan pertanian masyarakat Tana Ai pada umumnya terletak di lereng-lereng perbukitan.

Meskipun pada umumnya masih bertani secara tradisional, masyarakat Tana Ai – sebagaimana yang dialami oleh para petani Indonesia di wilayah lain – juga telah merasakan berbagai program pertanian pemerintah yang masuk ke desa-desa. Program-program itu antara lain Operasi Nusa Makmur, Bimbingan Massal (Bimas), dan Intensifikasi Massal (Inmas).

Pemerintah juga memperkenalkan berbagai jenis tanaman perkebunan kepada masyarakat Tana Ai dalam bentuk paket tanaman seperti kakao, mente, kemiri dan kelapa hibrida. Berbagai program pertanian pemerintah ini menyebabkan, sedikit demi sedikit, bergesernya sistem bercocok tanam masyarakat Tana Ai yang *polyculture* menjadi model bertani yang *monoculture*. Bercocok tanam *monoculture* memerlukan curahan tenaga dan biaya yang khusus; sehingga penanaman tanaman pangan – yang menjadi bagian model *polyculture* – mulai ditinggalkan. Ada dugaan kuat bahwa terjadinya rawan pangan pada tahun 2006 di sebagian Kab. Flores adalah akibat mulai bergesernya pola bercocok tanam masyarakat; dari *polyculture* menjadi *monoculture*.

Sejarah Asal Usul Masyarakat Tana Ai

Tana Ai adalah sebuah persekutuan masyarakat adat yang bertempat tinggal di 18 desa di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Flores – NTT. Masing-masing desa memiliki sekitar 3 – 5 Dusun. Secara keseluruhan, jumlah dusun yang ada di wilayah persekutuan masyarakat adat Tana Ai adalah sebanyak 54 dusun. Menurut sejarah, leluhur masyarakat Tana Ai adalah masyarakat yang bermigrasi dari Malaka di ujung utara Pulau Sumatera. Di samping tidak diketahui dengan pasti kapan mereka menginjakan kaki di wilayah Tana Ai, kurang jelas pula alasan yang menyebabkan leluhur masyarakat Tana Ai bermigrasi ke Pulau Flores. Namun demikian, menurut cerita dari mulut ke mulut, masyarakat Tana Ai yang sekarang adalah generasi ke-40 sejak pertama kali nenek moyang mereka menjejakkan kaki di wilayah Tana Ai. Dikisahkan bahwa mereka bermigrasi dalam jumlah yang besar, yaitu sebanyak limabelas suku. Ke-15 suku itu adalah: Suku Soge Laka, Suku Goban, suku Keringa, Suku Liwu Jawa, Suku Liwurung, Suku Watu, Suku Lewar, Suku Rawa, Suku

Aur, Suku Ipir, Suku Rotan, Suku Lewuk, Suku Wuran, Suku Watu Leto dan Suku Watu Jengu.

Ke-15 suku ini bermigrasi ke Tana Ai di bawah pimpinan Suku Soge Laka. Mereka menggunakan *tena* atau sampan. Saat ini, sampan tersebut masih dapat ditemukan dalam bentuk batu yang berbentuk sampan di Desa Talibura.

Ketika mereka sampai di Talibura, mereka tidak menemukan adanya mata air di daerah itu. Oleh karena itu mereka mencari daerah-daerah di sekitar Talibura yang ada mata airnya. Akhirnya mereka menemukan mata air di suatu daerah di sekitar Talibura dan kemudian mereka menamakan daerah itu dengan nama Wair Kolong (wair = air).

Selanjutnya mereka berusaha memperluas wilayah mereka dengan berpindah ke suatu daerah yang bernama Pedan. Di daerah Pedan inilah mereka membangun sebuah prasasti yang mereka namakan *Nuba Napun Teke* sebagai pertanda bahwa mereka telah menemukan tanah yang cocok untuk mereka. *Nuba Napun Teke* berarti ”prasasti sungai teke” atau ”prasasti napun teke”.

Bagi mereka *nuba* (prasasti) ini berfungsi sebagai tempat dilakukannya upacara adat. Upacara adat itu sendiri bertujuan untuk meminta kepada yang empunya tanah agar mendatangkan hasil yang baik dalam bidang pertanian, perkebunan dan perburuan; mendatangkan hujan dan panas yang seimbang; dan supaya kesehatan terjaga dengan baik dalam keluarga dan lingkungannya (kesehatan jasmani dan rohani).

Masih dalam rangka perluasan wilayah, ke-15 suku leluhur masyarakat Tana Ai ini berpindah lagi ke daerah barat, yang saat ini berdekatan dengan Desa Nangahale. Di daerah itu mereka membangun sebuah *nuba* (prasasti) yang mereka beri nama *Nuba Sao Wair*. Akan tetapi air di daerah itu kurang baik. Kondisi itulah yang menyebabkan seorang ibu yang bernama Hale yang berasal dari Suku Soge Laka bertekad untuk mencari sumber air. Dari Sao Wair, ia berjalan mencari sumber air ke arah barat sampai ia menemukan sumber mata air. Masyarakat kemudian menamakan daerah itu dengan sebutan Nangahale. *Nanga* berarti muara sungai dan *hale* adalah nama orang yang menemukan daerah itu. Adapun *Nuba Sao Wair* dipindahkan ke daerah yang lebih tinggi, yaitu di daerah yang dekat dengan sebuah sumber mata air yang bernama Utan Wair.

Atas dasar keinginan untuk memperluas lahan, mereka kemudian berpindah lagi ke sebuah daerah yang bernama Wair Hek. Di daerah ini mereka membangun sebuah prasasti yang bernama *Nuba Koja Laka*.

Namun kemudian, mereka berpindah lagi ke sebuah daerah yang mereka beri nama Utan Detun. Di daerah inilah mereka mendirikan sebuah rumah yang merupakan cikal bakal rumah adat Suku Soge Laka. Rumah adat ini mereka beri nama *Ledu Labang* dan nama itu tidak berubah hingga saat ini. Adapun proses pembuatan rumah adat ini mereka rangkai dalam sebuah ungkapan yaitu *"Laba Lepo Sorong Woga"* yang berarti "membangun tempat tinggal."

Mereka kemudian membagi wilayah-wilayah yang telah mereka kuasai itu kepada masing-masing suku. Nuba Talibura diberikan kepada orang-orang Uru Doren yang terdiri dari beberapa suku. Nuba Napun Teke dikuasi oleh orang-orang dari Uru Ledu yang juga terdiri dari beberapa suku. Sementara itu Nuba Kojalaka dikuasai oleh Suku Soge Laka dan suku Goban. Nuba Sao Wair dikuasai oleh suku Keso Kuit dan sebagian kecilnya dikuasai oleh suku Soge Laka.

Suku Soge dan suku-suku lainnya kemudian membangun *mahe*. *Mahe* adalah suatu tempat yang berfungsi untuk mempersatukan orang-orang yang menetap dan bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu dan juga dipakai sebagai tempat pelaksanaan upacara adat untuk meminta hasil yang baik dalam segala pekerjaan mereka. *Mahe* juga menggambarkan kesatuan antara laki-laki dan perempuan. Ini tercermin dari ungkapan "*wua du'a mahe mo'an*." (*du'a* = perempuan, dan *mo'an* = laki-laki). Ungkapan ini sering disingkat dengan "*mahe*."

Upacara adat yang dilakukan di *mahe* (upacara *mahe*) dilakukan secara tidak menentu waktunya. Kadang upacara adat ini dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun sekali, lima tahun sekali, 6 tahun sekali dan seterusnya, tergantung pada kesiapan masyarakat.

Alasan-alasan dalam membangun *mahe* ada berbagai macam, yaitu:

1. *Mahe Nuhu*: *mahe* ini adalah prasasti perang yang disebabkan oleh terjadinya perang antar suku. Pihak yang menang akan membangun *mahe* ini dan kepala dari orang yang berasal dari pihak yang kalah akan ditanam di bawah *mahe nuhu* ini. Jadi sebab pertama membangun *mahe* adalah sebab perang.
2. *Mahe Ihindolo*: *mahe* ini dibangun sebagai tempat mempersatukan semua masyarakat yang berada di suatu wilayah ketika mereka mau membuka lahan di suatu wilayah tertentu.

3. *Mahe Tanah*: *mahe* ini bertujuan untuk memberi batas antara wilayah yang satu dengan wilayah lainnya sehingga tidak terjadi kekacauan. Upacara adat juga dilakukan di *mahe* ini, yaitu upacara adat yang dilakukan ketika mereka mau membuka kebun di wilayah bersangkutan. Upacara adat ini dilakukan oleh masyarakat di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan wilayah yang akan dijadikan kebun.
4. *Mahe Ngen*: *mahe* ini menggambarkan tentang sejarah kedatangan orang baru ke dalam suatu wilayah tertentu di sepanjang wilayah kesatuan adat Tana Ai dengan catatan bahwa orang itu melakukan pekerjaan yang baik sepanjang hidupnya di wilayah mereka.
5. *Mahe Waibrama*: *mahe* ini adalah mahe tertua di wilayah kesatuan adat Tana Ai. *Mahe* ini berfungsi untuk mempersatukan *mahe-mahe* yang lainnya. *Mahe* ini memiliki sejarahnya sendiri. Konon ada seorang laki-laki yang tidak memiliki isteri dan ibu. Laki-laki ini adalah termasuk orang yang pertama kali datang dari Malaka bersama dengan yang lainnya melalui sampan, tetapi kemudian setelah mereka sampai di Talibura, ia memilih untuk berjalan sendiri. Ketika sang laki-laki sedang mengerjakan rumah, tiba tiba ia mendapati seorang perempuan di dalam pondoknya. Singkat cerita, akhirnya mereka menjadi suami isteri,tetapi sang isteri kemudian melahirkan "*buah bei dan wo'ar*." Oleh karena keanehan itu, maka masyarakat kemudian membangun sebuah *mahe* yang dikenal dengan nama "*mahe waibrama*." Selain fungsi untuk mempersatukan *mahe-mahe* kecil lainnya, *mahe waibrama* juga berfungsi sebagai tempat dilaksanakannya upacara adat untuk meminta hasil yang baik dari segala perkerjaan mereka.

Sistem Tenurial di Tana Ai

Di masyarakat Tana Ai, sistem tenurial diatur oleh seorang *Tana Pu'an*. Tugas utama *Tana Pu'an* adalah mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tanah, termasuk pembagian tanah dalam skala besar (pembagian tanah kepada suku-suku dan bukan kepada orang per orang),

melaksanakan upacara adat dalam membuka kebun, upacara adat waktu panen, dan sebagainya. Masyarakat biasanya memberikan imbalan kepada *Tana Pu'an* berupa hasil-hasil panen; jumlah pemberian ini sesuai dengan kemampuan orang yang bersangkutan. Upacara adat yang dilakukan oleh *Tana Pu'an* mencakup upacara adat ketika pembukaan lahan hingga upacara adat ketika panen dan upacara adat penolakan hama tanaman. Upacara adat pada waktu panen biasanya dilakukan oleh suku masing-masing. *Tana Pu'an* biasanya menggunakan rahang bawah dari hewan (babi atau kambing) sebagai kurban pada saat upacara adat dilakukan. Pemberian rahang bawah hewan kepada *Tanah Pu'an* melambangkan kuasa yang dimiliki oleh *Tanah Pu'an* dalam pengaturan tanah.

Tanah yang dibagikan oleh *Tanah Pu'an* kepada masing-masing suku menjadi hak komunal suku yang bersangkutan. Tiap-tiap suku yang mendapat pembagian tanah dari *Tanah Pu'an* membagikan tanah tersebut kepada anggota suku yang diatur oleh kepala suku. Dalam memberikan tanah -- luas dan batas-batasnya -- kepada tiap-tiap suku, *Tanah Pu'an* berpedoman pada pertimbangan suku mana yang pertama kali menancapkan parang di suatu wilayah tertentu sebagai tanda bahwa suku tersebut berniat mengelola wilayah bersangkutan. *Tanah Pu'an* hanya berfungsi untuk mengukuhkan kepemilikan yang sudah ditentukan melalui tancapan parang dari suatu suku. Sementara itu, pembagian tanah di dalam suku dilakukan oleh kepala suku berdasarkan pada pertimbangan jumlah anggota sukunya.

Penentuan batas wilayah kelola suatu suku yang ditentukan berdasarkan tancapan parang suku yang bersangkutan pada dasarnya hanyalah merupakan simbol karena luas wilayah kelola sebuah suku ditentukan oleh seberapa luas aktivitas suku yang bersangkutan. Tiap-tiap komunitas/suku memiliki wilayah adatnya sendiri.

Pada dasarnya masyarakat adat di wilayah kesatuan adat Tana Ai mengenal zonasi dalam pengelolaan hutannya. Mereka membagi wilayah hutan adatnya ke dalam berbagai peruntukan, yaitu:

1. *Nian Opi Kare Dunan*, artinya adalah tempat yang berada dekat dengan puncak gunung. Ini termasuk dalam klasifikasi hutan larangan masyarakat adat. Di kawasan hutan ini tidak boleh ada aktivitas apapun.
2. *Opi Dun Kare Taden*, yaitu hutan yang terletak di bawah *Nian Opi Kare Dunan*. *Opi Dun Kare Taden* biasanya dibuka untuk kegiatan apapun termasuk perladangan, dengan catatan bahwa

pembukaan *Opi Dun Kare Taden* hanya boleh dilakukan jika populasi masyarakat bertambah secara signifikan.

3. Setelah *Opi Dun Kare Taden*, terletak sebuah kawasan yang boleh dilakukan untuk kegiatan perladangan dan peternakan. Secara topografi, wilayah ini sudah mulai datar.
4. Wilayah Pemukiman, yaitu sebuah wilayah yang terletak di bawah kawasan perladangan dan peternakan.
5. *Urun Buluk*: Wilayah ini adalah wilayah berburu binatang liar.
6. *Plakat Tohe Maga*: merupakan wilayah pesisir pantai yang ditumbuhi oleh hutan bakau. Wilayah ini (yang kebanyakan ditumbuhi oleh hutan bakau) tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan apapun karena akan mendatangkan bahaya abrasi pantai. Fungsi kawasan ini adalah juga sebagai hutan larangan masyarakat adat.
7. Setelah wilayah ini terletak wilayah lain yaitu di daerah perairan (laut). Daerah ini bisa dimanfaatkan untuk mencari ikan dengan tuba (akar-akaran), bukan dengan bahan kimia.
8. Perbatasan laut dangkal dan laut dalam: adalah daerah laut yang bisa dipergunakan untuk mencari ikan dengan cara memancing. Pencarian ikan di daerah ini tidak boleh dilakukan dengan menggunakan bom.

Pada wilayah atau hutan nomor tiga di atas – areal yang bisa diperuntukkan untuk perladangan dan beternak -- terdapat tempat-tempat tertentu yang merupakan hutan keramat atau hutan larangan. Ada berbagai macam hutan keramat, yaitu:

1. *Ai Pa'en Watu Gelang*
2. *Kokong Kepit:* yaitu tempat yang pada umumnya berjurang.
3. *Wair Pu'an Terang Matan*: adalah tempat di mana terdapat mata air. Hutan di daerah ini tidak boleh ditebang dalam radius 100 meter dari mata airnya.
4. *Nari wain Pelo Nain*: adalah tempat yang biasa dipergunakan untuk beristirahat oleh masyarakat. Tempat seperti ini pada umumnya masih berupa hutan.

5. *Wua Du'a Mahe Moa'n*: adalah hutan di mana *mahe-mahe* berada. Luas wilayah ini bisa mencapai dua kali lebih luas dari wilayah *Nari Wain Pelo Nain*.
6. Sepanjang daerah aliran sungai (DAS) hutan tidak boleh ditebang dalam radius 50 meter di pinggir kiri dan kanan DAS.
7. *Nitu Deri Noan Gera*: adalah jenis hutan yang berada pada berbagai areal hutan. Pada hutan ini tidak boleh dilakukan aktivitas apapun karena hutan ini adalah hutan keramat.
8. Kali Mati: adalah kali-kali atau sungai-sungai yang sudah kering. Hutan pada kali-kali ini tidak boleh ditebang dalam radius 20 meter di kiri dan kanannya.
9. *Nuba Pu'an Nanga Wan*: adalah tempat keramat yang luasnya bisa mencapai 50 meter persegi. *nuba* ini akhirnya dipindahkan karena wilayah di mana *nuba* ini berada telah diberikan oleh negara kepada sebuah perusahaan swasta melalui pemberian hak guna usaha (HGU).

Masyarakat Adat Tana Ai memiliki pengaturan tenurial yang sangat rinci, baik untuk budidaya maupun wilayah yang berfungsi lindung atau keramat. Berikut ini berbagai sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap berbagai pengaturan tenurial:

1. Kalau merusak hutan yang ada *mahe*-nya, maka sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya adalah 1 ekor babi dan 1 ekor kambing, 2 atau 3 butir telur ayam, dan beras merah. Babi dan kambing disembelih dan dimakan bersama. Sanksi ini disebut "*Nua Ai Sube Tali*" yang berarti menyambung kembali tali dan akar-akar kayu dan pohon yang telah ditebang oleh si pelanggar. Saat ini, sanksi tersebut direvisi sehingga menjadi "tebang satu tanam tiga", di samping denda babi, kambing dan telur ayam tersebut di atas. Alasan pemilihan telur ayam sebagai sanksi didasarkan pada keyakinan bahwa para roh memandang telur ayam sebagai makanan besar.
2. Jika terjadi pelanggaran di hutan yang lainnya, maka sanksi yang diberikan kepada si pelanggara adalah menanam 3 batang pohon untuk 1 pohon yang ditebangnya dan membayar telur ayam yang akan dipergunakan pada saat dilakukannya upacara adat untuk kemudian diberikan kepada para roh.

Bagi masyarakat Tana Ai, tanah adalah "mama" atau "ibu." Dalam setiap kegiatan pengusahaan tanah harus selalu dilakukan upacara adat yang berfungsi untuk memberi tahu bumi bahwa mereka akan mengusahakan tanah tersebut. Bumi adalah "mama" dan matahari adalah "bapak"; tercermin dalam ungkapan yang terdapat di masyarakat Tana Ai, yaitu: "*Ina Nia'n Tana'n Wawa Amalero Wulan Reta*". Wujud pemberitahuan ini adalah telur ayam dan kertas kosong atau kain putih yang tidak bertuliskan apa-apa (*daha* dan *patan*); *daha* = telur dan *pata* = kain. Selain tanah, masyarakat memandang air sebagai susu ibu. Sedangkan tanaman dan sumber daya alam lainnya dianggap sebagai makanan.

Adanya aturan adat dalam pemanfaatan tanah dan sumber daya alam lainnya, termasuk hutan, adalah supaya warga tidak berada dalam bahaya kelaparan, bencana alam, dan sebagainya.

Pemerintahan Adat

Masyarakat Tana Ai mengenal dan masih mempraktikkan struktur dan mekanisme pemerintahan adat yang khas; meskipun mekanisme pemerintahan formal (kepala desa, camat, dll.) juga diakui. Beberapa ini adalah berbagai kedudukan dalam struktur pemerintahan adat di Tana Ai:

1. *Tana Pu'an*: Mengatur seluruh kehidupan masyarakat termasuk pembagian tanah dan menyelenggarakan upacara adat. *Tana Pu'an* ini berfungsi sebagai pengatur secara umum.
2. *Bian Pu'an*: melaksanakan secara teknis dan terperinci segala tugas yang diberikan oleh *Tana Pu'an*.
3. *Bian Lepo*: Bertugas sebagai penjaga dalam rumah, termasuk barang-barang antik dan kekayaan lainnya yang ada di dalam rumah.
4. *Rego Reog*: Orang yang bertugas untuk menyampaikan tugas-tugas yang diberikan oleh *Bian Pu'an*. Dengan kata lain, *Rego Reog* berfungsi sebagai penyambung lidah Bian Pua'an.
5. *Litin*: Orang yang melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh *Bian Pu'an*. *Litin* tidak boleh mengubah tugas-tugas yang diberikan kepadanya.

6. *Piong*: adalah orang yang bertugas untuk memberikan sesajian kepada leluhur yang telah meningal dunia.
7. *Karat*: Orang ini bertugas untuk memotong hewan persembahan pada waktu upacara adat dilakukan.
8. *Lo'en*: Orang yang memegang tali yang berada di dekat hidung hewan persembahan ketika hendak disembelih oleh Karat.
9. *Wa'i*n: Orang yang memegang kaki hewan persembahan yang hendak disembelih oleh *Karat*.
10. *Marang*: Pada saat hewan persembahan hendak disembelih, *marang* berfungsi untuk mengucapkan doa-doa dan memohon keselamatan bagi warga.
11. *Leba Soge*: Bertugas untuk memikul bakul yang berisi potongan kuku ibu jari kaki kanan dan kuku ibu jari tangan kanan serta rambut dari orang yang telah meninggal dunia. Bakul ini dianggap sebagai surga bagi orang yang telah meninggal dunia. Bakul ini kemudian ditaruh di dalam *Lepo* (rumah).
12. *Henin*: bertugas untuk melaksanakan upacara adat pada saat membuka kebun baru. Ia akan memastikan bahwa ketika kebun itu menghasilkan akan ada upacara adat "*wihi lo'e unur*," yaitu mengisi/menyimpan kuku ibu jari kaki kanan dan kuku ibu jari tangan kanan serta rambut dari orang yang meninggal ke dalam bakul/sbe.
13. *Luka*: bertugas untuk mengatur pembagian makanan ketika seorang anggota suku memanen hasil kebunnya. Luka inilah yang memakan hasil panen pertama kali, lalu membagi kepada anggota-anggota sukunya dan orang-orang yang membantu pekerjaan. Sisanya akan disimpan oleh anggota suku yang memanen tersebut.

Pembicaraan *Bian Pu'an* harus dituruti karena kalau tidak maka *Bian Pu'an* ini akan melaporkan orang yang tidak mendengarnya kepada *Tana Pu'an*. Selanjutnya *Tana Pu'an* inilah yang akan mengambil keputusan bagi orang yang tidak mendengar *Bian Pu'an*.

Masalah-Masalah Pembangunan

Ketersingkiran masyarakat Tana Ai sebenarnya telah berlangsung sejak lama. Pada tahun 1900, Pemerintah Belanda masuk ke wilayah ini dan menguasai hampir semua tanah masyarakat. Pada saat itu Raja Nai Roa memerintahkan masyarakat untuk pindah ke daerah pegunungan dengan alasan bahwa di daerah ini sedang terjadi perang dan banyaknya nyamuk malaria. Pada tahun 1912, pemerintah Belanda mengusahakan kapas di Tana Ai. Namun karena hasilnya tidak memuaskan maka mereka mengganti perkebunan kapas dengan kebun kelapa. Kelapa masih merupakan salah satu tanaman yang diusahakan oleh masyarakat Tana Ai. Setelah Indonesia merdeka, kehidupan masyarakat mulai berubah lagi. Ketika masyarakat mulai telah biasa dengan kehidupan daerah pegunungan -- mereka pindah ke daerah pegunungan karena diperintahkan oleh Raja Nai Roa --, pada tahun 1948 Departemen Kehutanan mulai melakukan survey untuk keperluan hutan lindung. Pada tahun 1984, Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka mengeluarkan SK Pengukuhan Hutan Lindung tanpa terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan masyarakat yang hidup di daerah pegunungan ini.

Kebijakan instansi kehutanan yang mengusir masyarakat Tana Ai dari ”pegunungan” adalah salah satu contoh kebijakan pembangunan yang hanya menempatkan masyarakat Tana Ai sebagai obyek belaka. Masih banyak lagi contoh-contoh lain kebijakan pembangunan lain yang menjadikan masyarakat Tana Ai sebagai obyek belaka. Tidaklah mengherankan kalau sampai saat ini masyarakat Tana Ai merasa bahwa kebijakan pembangunan pemerintah (daerah) hanya menambah kemiskinan mereka. Pola pikir pemerintah (daerah) tidak menempatkan masyarakat Tana Ai sebagai subyek dari pembangunan. Ada dugaan bahwa masyarakat Kabupaten Sikka, khususnya Pemda Kab. Sikka – secara sistematis memberikan stigma yang negatif terhadap masyarakat Tana Ai; masyarakat Tana Ai dipandang sebagai orang yang bodoh dan terbelakang. Dalam bahasa setempat, stigma negatif ini dikenal dengan sebutan “*Tana Ai ngangan*.” Penempatan masyarakat Tana Ai sebagai sekadar obyek pembangunan yang kemudian menyebabkan ketersingkiran mereka tercermin dalam berbagai inisiatif pembangunan berikut:

1. Penetapan Areal Hak Guna Usaha

Sebanyak 500 hektar tanah adat (hutan) masyarakat Tana Ai telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sikka kepada

Gereja Katolik (missi) melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU) kepada perusahaan yang bernama PT.Diosis Agung (DIAG). Perusahaan ini dimiliki oleh Gereja Katolik (missi). Gereja menanam kelapa sebagai komoditi andalan di atas lahan HGU tersebut. Sementara itu, sebagian hutan di wilayah adat dijadikan oleh pemerintah daerah sebagai hutan tutupan dan hutan lindung. Pertambahan jumlah penduduk dan perubahan peruntukan hutan adat oleh pemerintah daerah menyebabkan lahan garapan masyarakat semakin sempit. Pada awalnya, masyarakat masih diperbolehkan oleh Gereja untuk mengelola HGU PT. DIAG dengan menanam tanaman umur pendek di sela-sela tanaman kelapa. Menurut masyarakat, izin itu bahkan diberikan oleh gereja melalui kesepakatan tidak tertulis dengan masyarakat. Akan tetapi perubahan struktur kekuasaan di dalam gereja yang terjadi beberapa bulan belakangan ini mendatangkan masalah bagi masyarakat. Mereka tidak lagi diperbolehkan untuk mengusahakan tanah di areal HGU PT.DIAG. Bahkan, tanaman-tanaman masyarakat seperti pisang, ubi kayu, dan tanaman lainnya digusur oleh pihak PT. DIAG. Masyarakat sempat melakukan demonstrasi untuk menuntut PT DIAG dan gereja katolik agar memerhatikan nasib warga. Namun gereja tidak lagi menggubris tuntutan warga. HGU PT. DIAG akan berakhir pada tahun 2013. Masyarakat berharap bahwa setelah berakhirnya HGU PT. DIAG lahan seluas 500 hektar tersebut dikembalikan lagi kepada mereka, karena tanah tersebut adalah tanah ulayat persekutuan adat Tana Ai.

Konflik di areal HGU antara masyarakat adat Tana Ai dengan Pemeintah Daerah Kabupaten Sikka merupakan konflik yang berdimensi struktural. Pemda telah memberikan HGU kepada PT DIAG untuk dijadikan perkebunan kelapa, sementara berdasarkan hak asal usul, tanah HGU tersebut adalah adalah hak milik Masyarakat Adat Tana Puan Suku Soge, Suku Laka dan hak Tana Puan Suku Watu dan Goban yang merupakan sebagian suku yang mendiami wilayah kesatuan adat Tana Ai.

Di tanah HGU ini, banyak tanaman masyarakat seperti kelapa, mangga, lontar, pohon asam. Di samping itu juga ada pekuburan para leluhur mereka. Keberadaan tanaman masyarakat ini dapat dilihat dengan jelas dalam lahan HGU karena tanaman masyarakat pada umumnya tidak teratur jaraknya. Tanaman-tanaman ini ditanam oleh masyarakat sebelum mereka disuruh ke daerah pedalaman oleh Raja Nairoa.

2. Pembangunan di bidang pertanian.

Terjadi ketimpangan penguasaan lahan di wilayah adat Tana Ai. Akibat dari perubahan peruntukan lahan dalam skala yang cukup besar, lahan yang dikelola oleh masyarakat menjadi semakin sempit. Saat ini rata-rata lahan yang dimiliki oleh masing-masing keluarga di wilayah kesatuan adat Tana Ai hanya seluas 1 hektar/keluarga, sementara tidak ada sektor lain yang menjadi andalan warga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi yang lain iklim yang keras dan pola pertanian masyarakat yang sangat sederhana tidak mendukung kecukupan kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, masyarakat juga kesulitan mendapatkan biaya untuk memberantas hama tanaman pertanian mereka.

3. Pembangunan di bidang Kesehatan

Sempitnya lahan merupakan msalah yang paling krusial saat ini di Tana Ai termasuk di Desa Nangahale. Kondisi ini berdampak pada semakin sulitnya masyarakat untuk mendapatkan lahan bahkan untuk membangun rumah sekalipun. Di Desa Nangahale ini bahkan terdapat sekelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah sejak tahun 1969. Hidup berpindah-pindah ini terpaksa mereka lakukan karena mereka tidak punya tanah meskipun untuk membangun rumah sekalipun. Kondisi demikian menyebabkan kesehatan mereka sangat rentan. Kondisi lain dalam bidang kesehatan ini adalah letak Puskesmas yang sangat jauh dan juga harga obat-obatan yang tidak bisa dijangkau oleh masyarakat.

Selain masalah kekurangan lahan untuk membangun rumah, kekurangan air menjadi masalah rutin bagi masyarakat Tana Ai. Pada umumnya, kondisi pemukiman masyarakat cenderung kumuh dan dengan sanitasi yang buruk. Rata-rata tiap keluarga hanya memiliki lahan untuk rumah dan pekarangan hanya seluas 8 x 12 meter persegi.

4. Program Pengentasan Kemiskinan

Masyarakat Tana Ai menilai bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah tidak tepat sasaran. Pendataan untuk menentukan siapa yang berhak menjadi penerima dana bantuan tidak tepat. Bantuan program hanya diterima oleh orang-orang tertentu saja. Para pendata hanya mendata orang-orang atau keluarga-keluarga yang mereka kenal sebagai calon penerima manfaat program pengentasan kemiskinan; yang pada umumnya hanya berkisar di antara keluarga dan kenalannya sendiri.

Kesejahteraan Menurut Masyarakat Adat

Bagi masyarakat adat di wilayah persekutuan adat Tana Ai, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar dan kebutuhan-kebutuhan lain yang mereka perlukan merupakan kondisi di mana mereka bisa disebut sejahtera. Kondisi-kondisi yang memungkinkan mereka mencapai kehidupan sejahtera adalah sebagai berikut:

1. Ada musyawarah yang mereka lakukan bersama untuk mendiskusikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
2. Ada proses yang mendudukkan masyarakat adat dan pemerintah daerah setempat untuk bersama-sama membicarakan dan menyelesaikan masalah-masalah mereka.
3. Terpenuhinya kebutuhan atas makanan yang memenuhi standar kesehatan (makanan pokok berupa jagung, ditambah dengan beras dan umbi-umbian) dan air yang bersih untuk dipergunakan sebagai sumber kehidupan mereka. Ini juga mencakup tersedianya makanan sampingan.
4. Adanya perhatian dari pemerintah
5. Rumah yang sehat (misalnya rumah batu) serta dihuni oleh satu keluarga per rumah bukan oleh dua atau lebih keluarga per rumah.
6. Ada pakaian yang cukup, minimal tiga kali berganti pakaian dalam sehari
7. Khusus untuk perempuan, kesejahteraan juga baru akan terjadi jika mereka tidak dipukuli, tidak dibohongi, dan tidak dikhianati.
8. Memiliki tanah dengan status kepemilikan yang jelas untuk dikelola
9. Terdapat kehidupan yang rukun dengan sesama anggota komunitas dan juga dengan pihak lain
10. Kesehatan yang terjamin baik dan biaya untuk pengobatan murah. Kalau memungkinkan, biaya-biaya pengobatan gratis.

Kalau diperhatikan dengan saksama, maka kita bisa melihat bahwa masyarakat adat, setidaknya di wilayah kesatuan adat Tana Ai memandang bahwa kesejahteraan tidak hanya terbatas pada terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar (sandang, pangan dan papan) tetapi juga menghendaki berjalannya kehidupan demokrasi dan juga terciptanya derajat kesehatan secara signifikan.

Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kesejahteraan dan Kemiskinan

1. Kebijakan

Berbagai kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah di komunitas adat Tana Ai cenderung tidak memperhatikan kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat. Sebagaimana telah diperikan di atas, kebijakan di berbagai sektor pembangunan justru membuat masyarakat kehilangan akses atas sumber-sumber penghidupan mereka. Di sisi yang lain, keinginan pemerintah untuk membantu masyarakat keluar dari kondisi yang memprihatinkan terutama ketika terjadi rawan pangan justru tidak tepat sasaran. Ini terbukti dari pendataan yang dilakukan oleh aparat pemerintahan desa yang hanya mendata orang-orang yang dekat dengan mereka, meskipun kondisi ekonomi orang yang bersangkutan cukup berada.

2. Faktor Mental

Harus diakui bahwa masyarakat Tana Ai belum sepenuhnya menyalurkan potensi dirinya, serta belum sepenuhnya memanfaatkan alam di sekitarnya untuk meningkatkan taraf kehidupan. Terdapat sikap ogah-ogahan dan kurang percaya diri di antara masyarakat Tana Ai yang bisa menjadi kendala pengembangan masyarakat pada masa yang akan datang. Masyarakat harus sungguh-sungguh meninggalkan sikap mental negatif apabila ingin taraf hidup dan kesejahteraannya meningkat.

3. Faktor Teknologi

Cara bertani dan teknik nelayan di Tana Ai masih menggunakan teknik dan peralatan tradisional. Tidak banyak terobosan dan perubahan dalam

pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; karena itu masyarakat sering merasa kurang puas terhadap harga komoditi pertanian. Masyarakat Tana Ai sangat memerlukan terobosan-terobosan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi alam Tana Ai, baik teknologi budidaya pertanian, teknik pemanenan, teknik pasca penen, diversifikasi komoditi, terobosan pemasaran, maupun terobosan kelembagaan; sehingga mampu meningkatkan produksi komoditi, memperbaiki teknik pengemasan, serta meningkatkan harga produk pertanian. Pada akhirnya ini semua akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tana Ai.

4. Faktor Keterbatasan Tanah dan SDA yang lain

Jenis tanah dan kondisi topografi wilayah adat Tana Ai kurang menguntungkan. Kurangnya kesuburan tanah ini diiringi dengan sulitnya mendapatkan sumber air bersih yang memadai. Meningkatnya jumlah penduduk juga menyebabkan semakin sempitnya lahan garapan petani di Tana Ai. Intensifikasi pertanian – dengan tetap mempertahankan pola polyculture – sangat dibutuhkan oleh masyarakat Tana Ai.

5. Faktor Iklim

Iklim dan musim di Tana Ai cenderung tidak menentu. Beberapa tahun ini perubahan musim semakin sulit diperkirakan, sehingga kasus gagal panen karena salah menduga musim makin sering terjadi. Pada bulan-bulan tertentu musim angina yang sangat kencang merusakkan hampir seluruh komoditi pertanian yang ditanam. Tanaman tahunan yang diharapkan dapat melindungi tanaman semusim dari terjangan angina seringkali tidak berfungsi dengan baik, karena memang musim angin sangat kencang. Perlu ada teknik pendugaan musim yang lebih tepat, sehingga lebih memastikan keberlangsungan pola pertanian di Tana Ai. Dalam jangka panjang, masyarakat Tana Ai perlu melakukan perlindungan hutan dan memperbanyak tanaman tahunan.

6

AKHIRAN:

MASYARAKAT ADAT MENILAI KESEJAHTERAAN DIRI

Oleh : Restu Achmaliadi

"Cukup ora cukup kuwi terserah wonge dhewe-dhewe"
(kurang atau kecukupan harta itu terserah masing-masing orang).

Gunondo-Sedulur Sikep

Paksaan yang Sulit Dielakkan

Sebagian besar masyarakat adat adalah petani yang tinggal di perdesaan dan sekitar hutan. Sebagian besar komunitas yang menyatakan dirinya masyarakat adat ini berada di luar Pulau Jawa. Perdesaan, kepulauan dan masyarakat sekitar hutan merupakan kantong-kantong kemiskinan. Pulau Jawa, sebagai pusat utama eksploitasi kolonial pada masa lalu dan sebagai pusat utama putaran industrialisasi di Nusantara ini, masih "beruntung" menyisakan beberapa komunitas adat yang masih tetap mampu bertahan meskipun berbagai tekanan mengelilingi berbagai komunitas ini.

Kehidupan petani, seakan-akan, telah difitrahkan sebagai jalan hidup yang penuh kesederhanaan. Kompromi dan ketergantungan terhadap sumberdaya alam merupakan jalan hidup yang telah ditempuh berbagai komunitas adat ini bergenerasi. Kehidupan yang sederhana dan hidup dengan memanfaatkan alam di sekitarnya menjadi filosofi hidup yang tumbuh dan berkembang bersama komunitas adat itu sendiri. Kutipan pendapat dari salah seorang informan di Komunitas Sedulur Sikep pada awal bagian ini menunjukkan kesederhanaan filosofi hidup dan toleransi yang tinggi komunitas adat terhadap pilihan hidup yang akan dipilih oleh anggota komunitasnya.

Filosofi kehidupan yang diformulasikan dengan penuh kesederhanaan ini tentunya sangat berbeda dengan "kebutuhan untuk berprestasi" (*the need for achievement*) yang melatari paradigma modernisasi dalam pembangunan. Modernisasi akan memacu manusia untuk mewujudkan puncak eksistensi dirinya dalam berbagai lapangan kehidupan: ekonomi, sosial, kebudayaan, teknologi, hegemoni, dan lain-lain. Krisis global yang terus berulang dan krisis kerusakan alam yang mulai terlihat nyata pada akhir abad XX merupakan konsekuensi dominannya paradigma modernisasi yang telah dianut oleh sebagian besar negara-negara dunia.

Sedulur Sikep adalah contoh "komunitas" adat yang tetap mampu mempertahankan eksistensinya – dengan formulasi tujuan hidup yang sederhana dan luhur – di tengah-tengah perkembangan peradaban dunia yang tidak menentu. Seharusnya tata cara kehidupan Sedulur Sikep yang luhur ini – tanpa kegelisahan dan kerakusan sumberdaya – menjadi contoh hidup untuk masyarakat yang lain.

Sayangnya pilihan untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan mengandalkan alam sekitar untuk kehidupan pada masa yang didominasi oleh paradigma modernisasi pembangunan seperti saat ini bukanlah hal yang mudah. Hegemoni modernisasi akan terus merasuk ke relung yang paling jauh berbagai komunitas adat. Masyarakat adat bukanlah komunitas yang statis; akan terus berubah sebagai tanggapan terhadap alam di sekitarnya. Tetapi, sayangnya, perubahan itu, saat ini, karena tekanan hegemoni modernisasi yang semakin dipaksakan dan belum tentu diinginkan oleh berbagai komunitas adat itu. Hegemoni modernisasi ini menyebabkan terkurasnya sumberdaya alam yang menjadi gantungan hidup berbagai komunitas adat, menyebabkan maraknya konflik perebutan sumberdaya alam, menyebabkan pemaksaan sistem kenegaraan yang sebenarnya merupakan kepongahan modernisasi, menyebabkan intrusi sistem sosial modern berlebihan yang tidak diingini masyarakat adat, dan lain-lain. Pemaksaan hegemoni ke dalam kehidupan masyarakat adat ini menyebabkan kemiskinan.

Studi singkat di empat komunitas masyarakat yang dipaparkan pada buku ini menunjukkan berbagai perubahan paksa yang telah terjadi pada keempat komunitas itu. "Kemiskinan" yang kemudian terjadi bukanlah sekedar disebabkan oleh penipisan layanan alam, tetapi "kemiskinan" itu terjadi karena marjinalisasi pada berbagai lapangan kehidupan yang dialami oleh komunitas-komunitas adat ini; sebagai konsekuensi berhadap-hadapan dengan hegemoni modernisasi.

Mengatasi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan merupakan bagian tujuan modernisasi pembangunan. Tetapi, anehnya, proses pembangunan juga selalu diiringi dengan kejadian-kejadian marjinalisasi hak-hak penduduk yang kemudian juga menyebabkan kemiskinan. Kemiskinan memiliki dimensi yang luas; paradigma yang dianut akan sangat menentukan penilaian dan penelusuran pihak dan tingkat kemiskinan.

Program pembangunan Pemerintah Indonesia selalu memberikan tekanan khusus pada upaya-upaya pengentasan kemiskinan. Cukup banyak jenis dan variasi program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat yang terpencil. Tentu saja, berbagai program, ukuran, dan pelaksanaan pengentasan kemiskinan ini berparadigma modernisasi, dan cenderung mengesampingkan ragam paradigma kehidupan yang memang telah ada dalam masyarakat.

Harus diakui bahwa penerapan berbagai program pengentasan kemiskinan ini masih jauh dari memuaskan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan berbagai program pengentasan kemiskinan ini kurang berhasil. Pertama, metode identifikasi kemiskinan yang dibuat bersifat terlalu umum dan seragam, sehingga kurang melihat berbagai perbedaan karakteristik kehidupan masyarakat. Akibatnya teknik identifikasi yang dibuat menjadi kurang akurat. Salah satu banyaknya kericuhan di masyarakat ketika sebuah program pengentasan kemiskinan dilaksanakan adalah kurang akuratnya teknik identifikasi kemiskinan yang dibuat.

Kedua, berbagai program pengentasan kemiskinan yang digelontorkan, sama dengan metode identifikasi kemiskinan, merupakan paket-paket seragam untuk semua tempat di Nusantara ini. Ini sebenarnya sangat aneh; mengingat keragaman sosial dan geografis Indonesia yang kepulauan. Selain banyak menimbulkan kericuhan di lapangan, berbagai program pengentasan kemiskinan ini pada khirnya hanya sekedar membagi-bagi "ikan" yang kemudian habis begitu saja, serta tidak menimbulkan stimulasi positif untuk jangka panjang. Berbagai program pengentasan kemiskinan ini, saat ini, dianggap program bagi-bagi uang untuk mendapatkan keuntungan politik pihak yang berkuasa.

Ketiga, karena berbagai program pengentasan kemiskinan itu merupakan paket-paket dari "pusat" yang bersifat seragam, maka komunitas masyarakat hanya sekedar dijadikan sasaran dan obyek program. Bahkan berbagai program ini langsung merupakan bantuan kepada individu-individu yang dianggap miskin. Setiap komunitas memiliki potensi sistem sosial untuk menyelesaikan berbagai persoalan ketimpangan yang ada di

sekitarnya. Seharusnya berbagai *input* program yang akan diberikan kepada komunitas terlebih dahulu didialogkan dengan komunitas secara mendalam, sehingga berbagai program itu sesuai benar dengan kondisi komunitas. Kemiskinan merupakan problem masalah yang yang komplek dan terjadi setelah melalui proses yang panjang. Karena itu menyelesaikan problem kemiskinan tidak bisa hanya sekedar memberikan paket-paket program karitatif belaka; tetapi harus merupakan komitmen jangka panjang pada berbagai sistem kehidupan masyarakat. Masyarakat perlu diajak bicara lebih banyak, karena pada umumnya tatanan sosial yang ada di masyarakat sudah berjalan dengan baik; berbagai program ini seharusnya berdasarkan kemauan masyarakat sendiri serta mendasarkannya pada tatanan sosial yang telah ada dalam masyarakat.

Pengaruh idiologi pembangunan memang sangat sulit untuk dihindarkan. Peningkatan ekonomi seakan-akan telah menjadi jalan hidup yang harus ditempuh oleh umat manusia. Tetapi, seharusnya, adanya pilihan-pilihan lain selain "pembangunan" seperti yang sekarang ini sedang berlangsung harus tetap dihargai. Setiap komunitas adat berhak menentukan sikapnya sendiri terhadap model-model pembangunan yang memasuki wilayah hidupnya. Penghargaan terhadap hak asasi manusia (HAM) harus ditempatkan pada prioritas tertinggi. Karena itu marjinalisasi dan perlakuan tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan terhadap masyarakat adat harus dihilangkan dalam proses pembangunan selanjutnya. Jaminan pencukupan kebutuhan dasar warga negara sudah seharusnya menjadi tanggung jawab Negara.

Sejahtera Lahir dan Batin

Meskipun empat komunitas yang menjadi tempat studi singkat ini memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi terdapat benang merah yang jelas tentang bagaimana setiap komunitas itu memandang kesejahteraan dan kemiskinan. Benang merah kesejahteraan itu secara umum bisa dibedakan menjadi dua hal; yakni yang bersifat fisik (lahir) dan kedua bersifat non fisik (batin). Kesejahteraan lahir (fisik) saja tidaklah cukup; hal-hal yang bersifat non fisik (batin) juga sangat penting diperhatikan dalam menilai kesejahteraan.

Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan atau timbulnya kemiskinan dalam masyarakat:

1. Kebijakan

Banyak kebijakan dan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah yang malahan tidak memperhatikan kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakat adat. Sebagaimana telah diperikan di atas, banyak kebijakan di berbagai sektor pembangunan yang justru membuat masyarakat kehilangan akses atas sumber-sumber penghidupan mereka. Di sisi yang lain, keinginan pemerintah untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan seringkali tidak tepat sasaran dan memiliki metode yang salah. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi sayangnya berbagai kebijakan ini tidak konsisten dan sering salah sasaran.

2. Faktor mental

Harus diakui bahwa ada masyarakat adat yang belum sepenuhnya menyalurkan potensi dirinya, serta belum sepenuhnya memanfaatkan alam di sekitarnya untuk meningkatkan taraf kehidupan. Sikap ogah-ogahan, boros, dan kurang percaya diri bisa menjadi kendala pengembangan masyarakat pada masa yang akan datang. Masyarakat harus sungguh-sungguh meninggalkan sikap mental negatif apabila ingin taraf hidup dan kesejahteraannya meningkat.

3. Faktor teknologi

Cara bertani dan teknik nelayan kebanyakan masih menggunakan teknik dan peralatan tradisional. Tidak banyak terobosan dan adopsi teknologi baru selama beberapa puluh tahun ini. Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian juga tidak banyak terobosan dan perubahan; karena itu masyarakat sering merasa kurang puas terhadap harga komoditi pertanian. Masyarakat adat secara hati-hati memerlukan terobosan dan adopsi berbagai teknik-teknik pertanian/perikanan serta pemasaran hasil pertanian/perikanan.

4. Faktor keterbatasan tanah dan sumber daya alam yang lain

Banyak masyarakat adat yang wilayah hidupnya bertanah dan dengan kondisi topografi yang kurang menguntungkan. Banyak masyarakat adat yang tidak memiliki kebebasan dalam mengakses air bersih. Meningkatnya jumlah penduduk – artinya semakin terbatasnya tanah yang bisa menjadi tumpuan hidup – juga menjadi masalah pada masa mendatang.

5. Faktor iklim

Global warming menyebabkan musim semakin sulit diperkirakan, sehingga kasus gagal panen karena salah menduga musim makin sering terjadi. Banyaknya kasus gagal panen atau rusaknya tanaman pertanian atau semakin tingginya hari tidak bisa melaut merupakan beberapa akibat dari semakin sulitnya pendugaan musim.

6. Marjinalisasi dan perampasan hak.

Masyarakat adat telah seringkali mengalami marjinalisasi terhadap berbagai aspek kehidupan, karena berbagai stigma minor yang seringkali ditujukan kepada masyarakat adat. Selain itu, sebagaimana berbagai kelompok marjinal yang lain, masyarakat adat sering dirampas atau dikurangi haknya tanpa mendapatkan kompensasi yang layak. Seringkali berbagai perampasan hak ini mengatasnamakan pembangunan.

7. Konflik dan kekerasan

Konflik berkepanjangan sering terjadi di berbagai tempat di Indonesia, baik yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal. Masyarakat adat seringkali terpaksa berada di tengah-tengah konflik itu tanpa kemauannya sendiri. Akhirnya masyarakat menjadi korban paling besar dari berbagai konflik berkepanjangan ini.

Studi di keempat komunitas adat ini, secara umum, menyebutkan tentang perlu dicukupinya berbagai kebutuhan fisik dasar, baik sosial maupun ekonomi, untuk bisa disebut sejahtera. Berbagai kebutuhan dasar ini antara lain kecukupan kebutuhan pangan yang memenuhi standar gizi, rumah yang sehat, sanitasi lingkungan yang baik, terjangkau dan murahnya layanan kesehatan, tersedianya prasarana pendidikan, akses terhadap air bersih, pakaian yang cukup, dan lain-lain. Selain punya kemampuan mendapatkan berbagai kebutuhan dasar ini, maka berbagai kebutuhan dasar masyarakat ini harus mudah dan cepat didapatkan. Untuk memiliki kemampuan mencukupi berbagai kebutuhan dasar ini maka berbagai diskriminasi terhadap hak-hak masyarakat adat harus dihilangkan, serta masyarakat memiliki keleluasaan untuk mengelola sumberdaya alam yang mereka miliki. Ukuran kecukupan kebutuhan dasar berbagai komunitas ini berbeda-beda.

Keempat komunitas adat tersebut juga menyebutkan beberapa faktor non fisik (batin) yang perlu dipenuhi untuk mencapai kesejahteraan:

1. Perlunya akhlak dan pendidikan yang cukup, karena kesejahteraan dan kemiskinan berhubungan dengan perilaku yang baik, akal budi dan pendidikan seseorang atau rumah tangga;
2. Perlunya keamanan, ketentraman dan bebas dari rasa takut karena kondisi yang mengancam, karena tanpa keamanan dan ketentraman – meskipun kebutuhan fisik terpenuhi – maka tidak mungkin tercapai kesejahteraan; selain itu ketentraman dan kebebasan dari rasa takut akan memudahkan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan hidupnya.
3. Perlunya sistem dan kehidupan sosial yang baik (hidupnya mekanisme musyawarah mufakat dalam kehidupan masyarakat, dihargainya pranata lokal oleh pihak luar yang memiliki rencana tertentu untuk masyarakat, tumbuhnya keharmonisan di dalam masyarakat, dll.).
4. Perlunya kesetaraan hak dan kewajiban antara perempuan dan laki-laki; karena para perempuan dalam komunitas masih menemukan berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga; karena itu salah satu faktor khusus untuk kesejahteraan perempuan adalah tidak dipukuli, tidak dibohongi, dan tidak dikhianati.

Sistem sosial kemasyarakatan di dalam kehidupan masyarakat adat pada umumnya masih sangat baik. Sangat banyak mekanisme dan sistem kelembagaan tradisional masyarakat adat yang bisa menjadi teladan dalam berkehidupan. Berbagai program pembangunan seharusnya mendasarkan penyusunan program beserta implementasinya pada berbagai mekanisme tradisional ini. Berbagai mekanisme proyek modern seringkali tidak cocok diterapkan dalam kehidupan masyarakat; bahkan menyesatkan dan menimbulkan berbagai pertengkaran dalam kehidupan masyarakat.

Etika moral kehidupan yang dimiliki oleh masyarakat adat pada umumnya juga masih terjaga dengan baik. Kebutuhan terhadap kecukupan materi, kalau tidak hati-hati dan hanya mendasarkannya pada paradigma modernisasi, akan mengarah pada kerakusan akan sumberdaya. Telah kita ketahui bersama bahwa kerakusan terhadap sumberdaya inilah pangkal dari berbagai krisis ekonomi yang terus berulang, serta krisis kerusakan bumi yang semakin parah. Berbagai paradigma kehidupan tradisional ini seharusnya bisa menjadi sumber inspirasi Negara dalam menyusun berbagai program pembangunan.

PENGURUS CABANG ISTIMEWA

NAHDLATUL ULAMA BELANDA

https://nubelanda.nl

Sajogyo
Institute
https://sajogyo-institute.org

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN)
Jl. Tebet Utara II.C No.22
Jakarta Selatan 12820
Indonesia

T/F: +62 21 8297954
email: rumahaman@cbn.net.id
www.aman.or.id

ICCO South East Asia and Pasific
Jl.Tukad Batanghari IX/8
Panjer, Denpasar 80225,
Bali - Indonesia

T: +62 (361) 8955801
Fax: +62 (361) 8955805
www.icco.nl